

**KRITIK DAN PERLAWANAN WIJI THUKUL  
TERHADAP REZIM ORDE BARU DALAM  
AKU INGIN JADI PELURU**

**YULITIN SUNGKOWATI  
132233986**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PUSAT BAHASA  
BALAI BAHASA SURABAYA**

**Jalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon/Faksimili 031-8051752**

## KATA PENGANTAR

Sembilan tahun lalu, langit Jakarta mendadak hitam kelabu. Bukan oleh cerobong asap pabrik seperti biasanya, tetapi memumbung dari gedung-gedung pemerintah yang terbakar. Sebuah peristiwa memilukan yang mestinya tak terjadi, andai saja penguasa punya cukup kearifan untuk menerima perbedaan pendapat. Satu pelajaran yang berharga darinya bahwa gagasan tidak dapat dilawan dengan kekerasan, apalagi dimatikan. Gagasan hanya mungkin dilawan dengan gagasan yang lebih baik, lebih canggih, dan lebih menjanjikan. Pikiran dan perasaan manusia juga tak dapat diseragamkan dengan alasan apapun, apalagi hanya demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan. Cinta pun tak harus selalu diekspresikan dengan hamburan kata-kata pujian, tetapi juga dengan kritikan.

Sembilan tahun lalu, langit Jakarta berubah hitam kelabu. Bukan oleh kepulan asap pabrik seperti biasanya, tetapi oleh lembaran-lembaran sejarah buram yang kembali dibuka dan bertambah banyak isinya. Karena penguasa hanya bisa memaknai cinta dengan pujian, mereka yang pandai memujilah yang diberi nafas panjang kehidupan, meski sejarah selalu membuktikan merekalah yang tidak sungguh-sungguh mencintai. Sementara itu, cinta yang tulus dalam ekspresi kritik tidak dikenal oleh bahasa penguasa, bahkan dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban sehingga tidak cukup hanya diteror, ditindas, dimarginalkan, tetapi harus dilenyapkan.

Sembilan tahun lalu, tidak hanya Jakarta yang berubah kelabu. Asap hitam menggelayuti langit Indonesia, lewat televisi, surat kabar, radio, juga sastra. Dengan caranya sendiri, sastra “merekam” ekspresi cinta, tetapi bukan dengan bahasa penguasa yang penuh tipu daya. Karenanya, sastra pun harus berhadapan dengan ribuan pucuk senjata. Jika sastra tidak berarti apa-apa, tentu penguasa tidak akan *jengah* olehnya. Untuk itulah, atas nama sastra, karya ini penulis dedikasikan kepada semua yang telah menjadi korban dan dikorbankan selama 32<sup>tahun</sup> kekuasaan rezim Orde Baru, dan kepada semua yang berani mencintai dengan cara berbeda. Bukankah pelangi menjadi indah karena warnanya yang tidak sama?

Yogyakarta, 27 Juli 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.5 Landasan Teori	9
1.6 Metode penelitian	14
1.6.1 Langkah penelitian	15
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.3 Populasi dan Sampel	15
1.6.4 Teknik Analisis	17
1.7 Sistematika Penyajian	17
<b>Bab II Latar Belakang Wiji Thukul dan Kehidupan Sosial Politik Era Orde Baru</b>	<b>19</b>
2.1 Latar Belakang Wiji Thukul	19
2.2 Kehidupan Sosial Politik Era Orde Baru	31
<b>Bab III Kritik dan Perlawanan Wiji Thukul</b>	<b>46</b>
3.1 Kritik Terhadap Masalah Sosial, Militarisme, dan Politik	46
3.1.1 Kritik Terhadap Masalah Sosial	46
3.1.1.1 Pembangunan Menyebabkan Penggusuran	47
3.1.1.2 Pembangunan Menyengsarakan Kaum Buruh	57

3.1.1.3 Pembangunan Menciptakan Kemiskinan	61
3.1.1.4 Pembangunan Menciptakan <i>Gap</i> Sosial	69
3.1.2 Kritik Terhadap Masalah Militarisme	74
3.1.2.1 Kekerasan dan Teror	76
3.1.2.2 Penyeragaman	90
3.1.3 Kritik Terhadap Masalah Politik	93
3.1.3.1 Pemilu Tidak Membawa Perubahan	94
3.1.3.2 Demokrasi Manipulatif	99
3.2 Perlawanan	104
3.2.1 Perlawanan Thukul Sebelum Kasus 27 Juli 1996	105
3.2.1 Perlawanan Thukul Setelah Kasus 27 Juli 1996	113
Bab IV Simpulan	123
Daftar Pustaka	126

## Abstrak

Sungkowati, Yulitin. 2005. *Kritik dan Perlawanan Wiji Thukul Terhadap Rezim Orde Baru dalam Aku Ingin Jadi Peluru*. Sidoarjo: Balai Bahasa Jawa Timur  
130 hlm. + vii

**Kata-kata kunci :** kritik, perlawanan, Wiji Thukul, Orde Baru, Sosiologi

Penelitian ini bertujuan mengungkap kritik dan perlawanan Wiji Thukul terhadap rezim Orde baru dalam sajak-sajaknya. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra dan metode kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh sajak Thukul yang berjumlah 134 dan terkumpul dalam antologi puisi *Aku Ingin Jadi Peluru* yang diterbitkan oleh Indonesia Tera tahun 2000. Sampel penelitian ini meliputi 64 sajak yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik studi pustaka dan wawancara.

Penelitian ini menghasilkan hal-hal berikut. *Pertama*, kritik Wiji Thukul ditujukan pada masalah sosial, militerisme, dan politik. Kritik terhadap masalah sosial, yaitu (1) pembangunan menyebabkan terjadinya penggusuran di berbagai bidang, seperti nampak dalam sajak "Nyanyian Akar Rumput", "Di Tanah Negeri Ini Milikmu Cuma Tanah Air", "Sajak Kepada Bung Dadi", "Kepada Ibuku", "Jalan", "Apa yang Berharga dari Puisiku", "Sajak Setumbu Nasi dan Sepiring Sayur", "Sajak Bapak Tua", "Ceritakanlah Ini Kepada Siapapun", "Tanah", "Sajak Anak-anak", "Kampung", dan "Jalan Slamet Riyadi Solo", (2) pembangunan menciptakan kesengsaraan kaum buruh, yang terdapat dalam sajak 'Lingkungan Kita Si Mulut Besar', "Catatan Malam", "Kepada Bung Dadi", "Suti", dan "Ayolah Warsini", (3) pembangunan menciptakan kemiskinan nampak dalam sajak "Batas Panggung: Kepada pelaku", "Sajak Malam", "Balada Pak Bejo", "Suara dari Rumah Miring", "Sajak Bapak Tua", "Gumam Sehari-hari", "Kuburan Purwolojo", "Pemandangan", "Sajak Setumbu Nasi, Sepanci Sayur", "Nyanyian Abang Becak", "Catatan Suram", "Suram", "Pasar Malam Sriwedari", "Gentong Kosong", "Catatan 10 Januari 1989, Siang", "Jam Dua Malam, Dingin Sampai ke Tulang", "Kampung", "Dalam Kamar 6 x 7 Meter", "Kepada Nasri dan Adikku yang Lain", dan "Apa yang Berharga dari Puisiku", dan (4) pembangunan telah menciptakan gap sosial, seperti dalam sajak "Nonton Harga", "Catatan", "Kota ini Milik Kalian", dan "Sajak Semua".

Kritik terhadap masalah militerisme difokuskan pada dua aspek, yaitu kekerasan dan penyeragaman. Kritik terhadap perilaku militerisme yang tercermin dalam bentuk penggunaan kekerasan terdapat pada sajak "Ceritakanlah Ini Kepada Siapa pun", "Tetangga Sebelahku", "Sajak Suara", "Tikus", "Ibunda", "Merontokkan

Pidato", "Derita Sudah Naik Seleher", "Rumput Ilalang", "Harimau", dan "Kampung". Kritik terhadap militerisme yang berwujud upaya-upaya penyeragaman dilakukan Thukul dalam sajak "Buron" dan "Aku Berkelana di Udara".

Kritik terhadap masalah politik secara khusus ditunjukkan untuk mengkritik sistem demokrasi semu yang tercermin dalam pelaksanaan Pemilu. Ada dua hal yang dikritik dalam pelaksanaan Pemilu sebagai mekanisme demokrasi dalam sistem politik, yaitu (1) pemilu tidak membawa perubahan, terdapat dalam sajak "Kuburan Purwoloyo" dan "Hari ini Aku Bersiul-siul" dan (2) demokrasi manipulatif yang dapat dilihat pada sajak "Terus Terang Saja".

*Kedua*, perlawanan Wiji Thukul dapat dipilah menjadi dua periode waktu, yaitu sebelum kasus 27 Juli 1996 dan setelah kasus 27 Juli 1996. Sebelum kasus 27 Juli, Thukul masih menjadi manusia bebas meskipun sering mendapat ancaman, tetapi setelah kasus 27 Juli Thukul hidup dalam pelarian sebagai buron. Perlawanan Thukul sebelum kasus 27 Juli sudah dimulai sejak tahun 1986, seperti nampak pada sajak "Peringatan", "Sajak Suara", "Untuk D", "Istirahatlah Kata-kata", "Rumput Liar", dan "Tentang Sebuah Gerakan". Setelah kasus 27 Juli meledak dan Thukul menjadi buron penguasa, sajaknya tidak memperlihatkan pengenduran, bahkan makin tegas sikap perlawanannya terhadap penguasa, seperti terlihat pada sajak "Momok Hiyong", "Puisi Menolak Patu", "Catatan", "Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa", dan "Tujuan Kita Satu, Ibu".

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Karya sastra senantiasa tidak lahir dari sebuah ruang vakum. Kehadiran karya sastra dengan segala dinamikannya tidak mungkin lepas dari kondisi yang melingkunginya. Demikian pula dengan sastra Indonesia <sup>Sejak</sup> awal perkembangannya, sastra Indonesia modern merupakan arena untuk menggambarkan ketimpangan sosial dan menyampaikan kritik terhadap ketimpangan tersebut (Damono, 1998:89). Sastra Indonesia modern padat dengan pengemis, gelandangan, kere, orang buangan, orang yang tidak bertanah, dan <sup>se</sup> mahluk Tuhan yang papa. Bahkan, agak sulit mencari pengarang Indonesia yang sama sekali tidak pernah menampilkan masalah dan kritik sosial dalam karyanya (Damono, 1999:89). Hal itu membuktikan bahwa (1) ketimpangan sosial tidak pernah terhapus dari negeri ini sejak zaman penjajahan Belanda hingga setelah 32 tahun merdeka, (2) simpati sastrawan terhadap kaum miskin, (3) sastra Indonesia tidak pernah melupakan kemiskinan sebagai problem (Damono, 1999:84—85), (4) para sastrawan bukan hanya mereka yang diam “di menara gading” sebagai pertapa agung, tetapi juga penafsir, *the voice of the people* (Heidegger dlm. Dhakidae, 2000:9), (5) sastrawan merasa bertanggung jawab terhadap masalah yang dialami masyarakat, dan (6) ada hubungan timbal balik antara sastrawan dengan masyarakat.

Dominannya kritik sosial dalam karya sastra identik dengan dominannya masalah sosial dalam kehidupan di luar sastra (Sardjono, 2001:93). Masalah-masalah sosial yang mulai memuncak pada tahun 1980-an sebagai akibat strategi politik ekonomi Rezim Orde Baru, yang hanya memprioritaskan pertumbuhan tanpa diiringi dengan pemerataan hasil-hasilnya, telah memunculkan kembali tema-tema sosial dalam karya sastra Indonesia di penghujung tahun 80-an dan 90-an (Sardjono, 2001:93-95). Tema dan kritik tersebut sebelumnya cenderung dihindari oleh para penyair karena pada umumnya mereka trauma dengan persoalan sosial politik (Sardjono, 2002:92) yang sangat sensitif. Pada masa Rezim Orde Baru, bahasa seni cenderung mengerut ke wilayah simbol supaya "aman" di koran dan majalah yang tumbuh di bawah ancaman pencabutan SIUPP dan pembredelan (Wachid, 2000:67).

Kritik yang mengendap memang telah muncul pada tahun 70-an ketika banyak pengarang menulis mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah (Kuntowijoyo, 1987:149) dan protes-protes sosial Rendra dengan puisi pamfletnya sebagai akibat mulai dijalankannya Repelita I tahun 1971 dengan hasil berupa situasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang makin bobrok, tetapi pada saat yang sama juga muncul tradisi anti-intelektualisme yang ingin membangun sastra sebagai alternatif, suatu dunia yang otonom, tidak mengikuti aturan-aturan logika sosial, dan menolak realitas sosial itu sendiri (Kuntowijoyo, 1987:149—150).

Ketidakpercayaan pada realitas itu muncul karena pengarang merasakan adanya *anomie* dalam masyarakat ketika sistem sosial dan sistem nilai tidak lagi koheren. Keadaan seperti itu terjadi karena masyarakat sedang menuju masyarakat teknologis dengan kecepatan tinggi. Pengarang sebagai anggota masyarakat juga mewakili

masyarakat yang teralienasi dalam proses teknologisasi tersebut. Gejala sastra tersebut paralel dengan munculnya Dadaisme di Eropa pada kurun Perang Dunia Pertama ketika orang tidak lagi percaya pada kebenaran rasionalisme dan dengan sastra Amerika yang pada tahun 60-an penuh dengan “kontradiksi budaya kapitalis” dengan *counter culture*-nya sebagaimana dikemukakan Daniel Bell (Kuntowijoyo, 1987:150).

Sebagaimana gejala yang terjadi pada tahun 70-an, pada tahun 80-an dan 90-an juga muncul dua fenomena dalam bersastra. Munculnya masalah-masalah sosial yang kompleks dan semakin kuatnya hegemoni negara di bawah Rezim Orde Baru yang represif telah menyebabkan munculnya puisi sosial dan puisi sufi. Puisi Sufi yang tumbuh subur di Yogya merupakan bentuk perlawanan terhadap negara yang begitu kuat dan memanfaatkan kekuatannya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menekan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran puisi sufisme, yang antara lain dimotori oleh Emha Ainun Nadjib, merupakan upaya memperebutkan dominasi ideologis (Salam, 2004:13).

Wiji Thukul merupakan generasi terkini setelah Rendra dan Emha yang berani keluar dari dominasi estetisme koran dan majalah dan memilih berhadapan langsung dengan negara (Wachid, 2001:67). Thukul dikenal sebagai seorang penyair “pedalaman” yang lantang menyuarakan persoalan sosial masyarakat kelas bawah. Namanya hampir tidak pernah disebut dalam “kanon” kesusasteraan Indonesia (Dhakidae, 2000:15) sampai surat kabar dan majalah ramai membicarakannya sebagai korban praktek penghilangan orang “*involuntary desaperances*” yang dilakukan oleh negara (Munir, 2000:67). Keberadaan Thukul memang tidak dapat

dilepaskan dari hiruk pikuk kehidupan politik dan sorak-sorai demonstrasi para buruh. Oleh karena itu, melepaskan Thukul dari konteks pergerakan politik ibarat melepaskan darah dari dagingnya (Laksmi, 2001).

Thukul dikenal sebagai penyair radikal, sudah sejak kecil ia mempunyai naluri memberontak. Sajak-sajaknya bernuansa perlawanan (Laksmi, 2001). Akan tetapi, ia diburu bagai tikus oleh penguasa Orde Baru bukan hanya karena sajak-sajaknya dianggap membela rakyat yang tertindas dan menyuarakan paham sosialis-komunis (Wachid, 2000:56), tetapi lebih-lebih karena aktivitas politiknya di Partai Rakyat Demokratik (Maulana, 2001) sebagai ketua Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker). Partai Rakyat Demokratik atau PRD adalah partai sayap kiri radikal (Curtis, 2000:2) yang dijadikan kambing hitam peristiwa kerusuhan Sabtu Kelabu, 17 Juli 1996, setelah terjadi pengambilalihan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Sebanyak 16 aktivis, khususnya aktivis PRD, termasuk Thukul hilang dalam rangkaian kerusuhan itu. Hilangnya Thukul dianggap sebagai kenyataan tragis yang menimpa seorang penyair karena sebelumnya penyair-penyair yang vokal "hanya" dimasukkan ke penjara atau dilarang pentas (Maulana, 2001). Para sastrawan, meskipun bukan orang suci, tetapi tidak pernah menggusur tanah-tanah rakyat dan mengusir mereka dari masyarakat yang melingkunginya. Sebaliknya, seperti yang terjadi pada Thukul, sastrawan justru menjadi tumbal dalam membela rakyat yang ditindas oleh penguasa Orde Baru (Maulana, 2001).

Thukul memang telah "dilenyapkan" oleh tangan-tangan kekuasaan, tetapi sastra berbeda dengan laporan jurnalisisme yang berbicara dengan fakta. Fakta dapat ditutupi atau dilenyapkan, tetapi kebenaran yang ada dalam sastra menyatu bersama

udara (Ajidarma, 1997:1). Kebenaran-kebenaran yang diyakini Thukul dan dibayar mahal dengan nyawanya itu telah dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk stensilan yang disponsori oleh Taman Budaya Surakarta, yaitu *Puisi Pelo* (1984—1988) dan *Darman dan Lain-lain* (1985). Dua kumpulan puisinya lainnya, yaitu *Ketika Rakyat Pergi* (1986—1991) dan *Lingkaran Kita Si Mulut Besar* (1986—1991) telah diterbitkan pula atas bantuan teman-temannya. Keempat kumpulan puisi itu kemudian disatukan dan diterbitkan kembali dalam satu buku oleh penerbit Teramnesia dengan judul *Aku Ingin Jadi Peluru* pada tahun 2000. Oleh karena itu, meskipun keberadaan Thukul kini tidak jelas, karya-karyanya dapat terus “berbicara” bahwa pembangunan pada masa Rezim Orde Baru telah menciptakan masalah-masalah sosial yang sangat kompleks. Aveling (dalam Bambang, 2004) mengatakan bahwa sajak penting Indonesia bukan hanya karya-karya penyair besar, seperti Goenawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan Rendra, tetapi juga sajak-sajak Thukul. Dengan pendekatan humanisme liberal, Aveling melihat pentingnya posisi sajak-sajak Thukul karena keterkaitannya secara langsung dengan perlawanan terhadap rezim Orde Baru pada masa yang paling represif. Sejarah memang telah mencatat namanya sebagai seorang penyair muda yang telah menorehkan sajak perlawanan (Munir, 2000:xv). Untuk itu, bersama Rendra, ia menjadi penerima *Wertheim Encourage Award* pertama yang diberikan oleh Wertheim Stichting di Belanda sejak yayasan yang didirikan untuk menghormati tokoh sosiologi itu didirikan

Karya sastra Thukul dikenal sebagai sastra arus bawah karena keterlibatannya yang sangat intens dengan persoalan-persoalan masyarakat kelas bawah. Ia juga

sering disebut sebagai penyair buruh bersama dengan Wowok Hesti Prabowo karena sajak-sajaknya yang banyak membela dan menyuarakan nasib kaum buruh. Julukan sebagai penyair tanah juga pernah didapatnya karena sajak-sajaknya banyak mengkritik penguasaan tanah oleh segelintir orang dan semakin berkurangnya tanah pertanian. Untuk aktivitasnya yang merakyat, Thukul juga dikenal sebagai seniman rakyat. Semua aktivitas kesastranya dan masalah-masalah yang digarap dalam karyanya tidak terlepas dari pandangannya tentang sastra. Ia berpendapat bahwa sastra harus kontekstual, sastra harus hidup di tempat ia hidup dan merekam peristiwa yang tumbuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Arief Budiman (dalam Thukul, 2000) mengatakan bahwa membaca sajak Thukul adalah membaca otobiografi kejiwaan penyairnya. Dia menceritakan nasib jutaan rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh proses pembangunan yang hanya menguntungkan kaum elitnya. Fenomena sajak-sajak Thukul semakin mengukuhkan pandangan bahwa sastra dan sosiologi memang berbagi masalah yang sama, yaitu manusia dan masyarakat (Damono, 1984:7) karena sastra dapat menjadi kritik sosial yang melakukan perlawanan terhadap sistem sosial dan masyarakat (Kuntowijoyo, 1987:147).

Kehadiran puisi-puisi Thukul yang cukup fenomenal, terlebih bila dikaitkan dengan penculikan terhadap dirinya, dan kuatnya hegemoni negara pada masanya belum dibanangi dengan penelitian yang memadai untuk melihat relasi karya, pengarang, dan konteks sosial budaya politik. Puisi-puisi Thukul merupakan kutub yang cukup penting dalam perkembangan sastra Indonesia di penghujung abad 20. Berbagai tulisan atau aktivitas yang dilakukan selama ini oleh pencinta sastra

maupun aktivis LSM, dan juga media masa baru sebatas mengenang sosok pribadi Thukul. Setelah diterbitkannya *Aku Ingin Jadi Peluru*, penerbit Teraindonesia bekerja sama dengan komunitas sastra di berbagai kota dan kampus di Jawa, menggelar acara untuk mengenang Thukul dengan format diskusi dan pembacaan sajak-sajaknya. Dalam diskusi diketengahkan makalah yang berisi ulasan atau tinjauan terhadap sajak-sajak Thukul.

Pada ulang tahunnya yang ke-51, majalah kebudayaan *Basis*, menurunkan berita utama tentang Thukul dengan judul "Wiji Thukul Digondol Momok Hiyong" yang mengulas misteri hilangnya Thukul dikaitkan dengan aktivitas sastra dan politiknya dalam berhadapan dengan kekuatan negara yang hegemonik.

Majalah *Inside Indonesia* terbitan Australia yang telah mempublikasikan karya-karya Thukul sejak tahun 1987 menurunkan berita "*Where is Wiji Thukul? The Dreadful Silence Outspoken Poet*" dalam terbitannya bulan Juli-September 2000. Majalah *Pantau: Kajian Media dan Jurnalisme* yang dikelola oleh aktivis LSM dalam dua kali terbitannya, yaitu bulan September dan November memuat tulisan "Menunggu Thukul Pulang. Hanya Ada Satu Kata: Lawan!". Harian Umum *Republika* pada tahun 2002 juga pernah menurunkan hasil wawancara dengan Sipon, istri Thukul, satu halaman penuh berkaitan dengan aktivitas Thukul semasa hidup.

Sebuah film dokumenter yang merekam kepenyairan Thukul sejak di Surakarta juga telah dibuat oleh aktivis LSM, Tinuk Yampolsky, Gita Widya Laksmi, dan Dawn Buie. Akan tetapi, belum ada penelitian yang mendalam tentang sajak-sajak Thukul.

Tujuan praktis penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kritik Thukul terhadap masalah sosial, politik, dan militerisme serta perlawanannya yang dilakukan sebelum dan sesudah kasus Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah-masalah sosial, politik, dan militerisme yang muncul semasa rezim Orde Baru berkuasa melalui kacamata seorang penyair. Tujuan praktis lainnya adalah untuk mendokumentasikan kepenyairan Thukul dan menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan atau mendalami penelitian tentang Thukul, relasi sastra dan masyarakat, serta fungsi sastra dalam masyarakat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu sastra dan masyarakat umum. Bagi ilmu sastra, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk pengembangan teori sastra dan sebagai bahan untuk penyusunan sejarah sastra. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji dan meneliti sajak-sajak Thukul lebih lanjut dan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui kehidupan Wiji Thukul, aktivitas kesastranya, karya-karyanya, dan pandangannya tentang rezim Orde Baru.

#### **1.5 Landasan Teori**

Pendekatan sosiologi sastra dimungkinkan dan dimunculkan dalam analisis sastra karena sosiologi dan sastra sesungguhnya berbagi masalah yang sama, yakni manusia dan masyarakat. Sosiologi adalah telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Sosiologi mencoba menjawab tentang proses terbentuknya,

keberlangsungannya, dan kebertahanannya masyarakat. Sebagaimana sosiologi, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat, yaitu usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan mengubah masyarakat, hubungan manusia dengan lingkungan, keluarga, politik, negara, dan sebagainya. Perbedaan yang ada adalah bahwa sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, sedang karya sastra adalah usaha untuk menciptakan kembali dunia sesuai dengan penghayatan dan perasaan pengarangnya (Damono, 1984:7--8). Meskipun terdapat perbedaan, sosiologi dan sastra dapat saling melengkapi.

Teori sosiologi sastra berkembang pesat dan beragam. Akan tetapi, Damono (1984:2--5) menyimpulkan adanya dua kecenderungan utama, yaitu pendekatan yang berdasarkan anggapan bahwa sastra merupakan cermin proses sosial ekonomis belaka. Pendekatan ini bergerak dari faktor-faktor di luar sastra untuk membicarakan sastra. Sastra hanya berharga dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar sastra tersebut. Dalam hal ini, teks sastra tidak dianggap yang utama, tetapi hanya merupakan *ephipenomenon* (gejala kedua). Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berangkat dari teks sastra atau mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. Metode yang dipakai dalam sosiologi sastra ini adalah analisis teks untuk mengetahui strukturnya, kemudian digunakan untuk memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang terdapat di luar sastra.

Dalam sosiologi sastra juga ada anggapan bahwa kesusasteraan merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai sistem lain—subsistem—yang lebih kecil, antara lain pengarang dan karya. Karya sastra merupakan benda budaya yang tidak hadir begitu saja, tetapi diciptakan oleh manusia dan manusia merupakan individu

sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya (Damono, 1984:1). Dengan demikian, pendekatan dalam sosiologi sastra dapat memusatkan perhatiannya pada pengarang karena pengarang adalah penciptanya. Pengarang juga anggota masyarakat yang terikat oleh status sosial tertentu dan terlibat dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat (Damono, 1984:1). Sastra mengangkat masalah kehidupan, sedangkan kehidupan manusia merupakan suatu proses sosial. Sesuatu yang dikerjakan sastrawan dalam karyanya dapat dianggap sebagai bentuk menanggapi, mengkritik, melawan, atau mengafirmasi realitas sekitarnya, berkomunikasi dengan realitas, dan menciptakan kembali realitas (Kuntowijoyo, 1987:18). Dalam kaitan antara pengarang, karya, dan realitas, Kuntowijoyo mengklasifikasikan karya sastra berdasarkan peranannya, yaitu sebagai cara pemahaman (*mode of comprehension*), cara perhubungan (*mode of communication*), dan cara penciptaan (*mode of creation*) (Kuntowijoyo, 1987:127).

Di samping ketiga klasifikasi tersebut, dalam kaitan antara sastra dengan masyarakat (sosial) Kuntowijoyo (1987:145) juga menggolongkan sastra menjadi empat, yaitu sastra *simptomatik*, sastra *diagnostik*, sastra *dialektik*, dan sastra *alternatif*. Sastra *simptomatik* adalah sastra yang hanya sekedar menyajikan gejala-gejala sosial, merupakan konfirmasi terhadap kenyataan-kenyataan sosial tanpa memberikan sikap terhadapnya. Sastra *diagnostik* berusaha menganalisis masyarakat dan menyatakan pendapatnya secara sadar dan mencoba melakukan rekayasa terhadapnya. Sastra *dialektik* adalah sastra yang melakukan kritik sosial sebagaimana ilmu-ilmu sosial, yang mencoba melakukan analisa dengan penuh perlawanan terhadap masyarakatnya dengan mempertentangkan sistem simbol dan sistem sosial.

Sastra *alternatif* adalah sastra yang berusaha membebaskan sastra sebagai sistem simbol masyarakatnya, sastra yang berdiri sendiri sebagai sistem tandingan. Dalam kaitan dengan penggolongan ini, karya sastra Thukul dapat diklasifikasikan ke dalam sastra dialektis sehingga akan didekati dan diperlakukan sebagai sastra dialektis..

Beberapa klasifikasi pendekatan sosiologi sastra juga dikemukakan oleh para teoritis sastra sebagaimana terungkap dalam buku Damono (1984). Welck dan Warren membagi pendekatan sosiologi sastra menjadi tiga, yaitu (1) sosiologi pengarang yang membicarakan dasar ekonomi produksi sastra, latar dan status sosial, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar sastra, (2) pendekatan yang membicarakan isi dan tujuan serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial yang tersirat dalam ksastra itu sendiri, dan (3) pendekatan yang membicarakan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Watt juga mengemukakan tiga macam pendekatan sosiologi sastra, yaitu (1) konteks sosial pengarang yang berhubungan dengan posisi sastrawan dalam masyarakat dan kaitan pengarang dengan masyarakat, (2) sastra sebagai cermin masyarakat yang membicarakan sejauh mana sastra dapat dianggap mencerminkan keadaan masyarakat, dan (3) fungsi sosial sastra yang membicarakan fungsi sastra dalam masyarakat.

Sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan Damono, Grebstein (1968:161—169) dengan teori sosio-kulturalnya mengatakan bahwa dalam rangka memahami karya sastra secara komprehensif, karya tersebut tidak dapat dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan, atau peradaban yang telah menghasilkannya. Karya sastra harus dipahami dalam konteks yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada

karya itu sendiri karena setiap karya sastra pada dasarnya adalah hasil pengaruh timbal balik yang rumit antara faktor-faktor sosial dan kultural. Karya sastra itu sendiri objek kultural yang rumit karena, bagaimanapun, karya sastra bukanlah gejala yang berdiri sendiri lepas dari lingkungan sekitarnya. Grebstein membuat prinsip-prinsip pendekatan karya sastra sebagai gambaran masyarakat, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, karya sastra tidak dapat dipahami secara utuh apabila dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan, atau peradaban yang telah menghasilkannya. Karya sastra harus dipahami dalam konteks seluas-luasnya dan tidak mutlak otonom. Setiap karya sastra merupakan hasil pengaruh timbal balik yang rumit dari faktor-faktor sosial budaya dan karya sastra bukanlah suatu gejala tersendiri. *Kedua*, gagasan yang ada dalam karya sastra sama pentingnya dengan teknik penulisannya, bahkan boleh dikatakan bahwa bentuk dan teknik itu ditentukan oleh gagasan tersebut. Tidak ada karya sastra besar yang diciptakan berdasarkan gagasan yang dangkal; dalam pengertian ini sastra adalah kegiatan yang sungguh-sungguh. *Ketiga*, setiap karya sastra yang dapat bertahan lama pada hakikatnya mengandung moral, baik dalam hubungannya dengan kebudayaan sumbernya, maupun dalam hubungannya dengan orang perorang. Karya sastra bukan merupakan moral dalam arti yang sempit, yakni yang sesuai dengan suatu kode atau sistem perilaku tertentu, tetapi dalam pengertian bahwa karya sastra terlibat dalam kehidupan dan menampilkan tanggapan evaluatif terhadapnya. Dengan demikian, sastra adalah eksperimen moral. *Keempat*, masyarakat dapat mendekati karya sastra dari dua arah. *Pertama*, sebagai suatu kekuatan atau faktor material istimewa. *Kedua*, sebagai tradisi, yakni kecenderungan-kecenderungan spiritual dan kultural yang bersifat

kollektif. Bentuk dan isi karya sastra dapat mencerminkan perkembangan sosiologis ataupun perubahan-perubahan yang halus dalam waktu kultural.

Dengan mengacu pada pandangan Faruk (1994:5) bahwa tidak mungkin membangun suatu sosiologi sastra general, maka pendekatan sosiologi sastra yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra seperti yang dikemukakan oleh Grebstein bahwa untuk memahami karya sastra secara komprehensif, karya tersebut tidak dapat dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan, atau peradaban yang telah menghasilkannya. Karya sastra harus dipahami dalam konteks yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada karya itu sendiri karena setiap karya sastra pada dasarnya adalah hasil pengaruh timbal balik yang rumit antara faktor-faktor sosial dan kultural. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini dibicarakan lingkungan karya, yaitu pengarang dan konteks sosial budaya politik zamannya.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga metode yang digunakan juga metode kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan merupakan pemahaman yang holistik (Moleong, 2002: 23). Metode ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini yang hendak mengungkap kritik dan perlawanan Wujil Thukul terhadap rezim Orde Baru dalam sajak-sajaknya. Pemahaman terhadap relasi antara pengarang, karya, dan konteks kehidupan ekonomi, sosial, politik zamannya merupakan pemahaman yang menyeluruh atau holistik yang hanya dapat dipahami keterkaitannya oleh manusia sesuai dengan karakter penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan laporan

penelitian berisi kutipan data-data untuk memberi gambaran penjelasan laporan tersebut.

### **1.6.1 Langkah Penelitian**

Penelitian diawali dengan mengamati keseluruhan populasi data, baik yang berhubungan dengan sajak-sajak maupun dengan kondisi sosial politik era Orde Baru dan latar belakang pengarang serta pandangannya. Data-data yang didapat dari populasi kemudian diseleksi yang relevan dengan tujuan dan masalah yang menjadi fokus penelitian guna dipecahkan. Data yang sudah diseleksi itu dijadikan sebagai sampel penelitian. Tahap selanjutnya adalah menganalisis data sesuai dengan pendekatan dan metode yang telah ditentukan sampai dicapai hasil yang diharapkan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentatif. Teknik studi pustaka dan dokumentatif yaitu mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan menggunakan atau meneliti dokumen-dokumen tertulis, berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan sebagainya yang tersimpan di perpustakaan.

### **1.6.3 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah sajak-sajak Wiji Thukul yang terkumpul dalam buku kumpulan puisi dengan judul *Aku Ingin Jadi Peluru* terbitan Teraindonesia, Magelang tahun 2000. Kumpulan puisi itu memuat 138 sajak yang dibagi menjadi

lima bagian, yaitu (1) "Lingkungan Kita Si Mulut Besar" terdiri dari 49 sajak, (2) "Ketika Rakyat Pergi" terdiri dari 17 sajak, (3) "Darman dan Lain-lain", 16 sajak, (4) "Puisi Pelo", 29 sajak, dan (5) "Baju Loak Sobek Pundaknya", 27 sajak.

Sampel penelitian adalah 64 sajak yang diambil atau dipilih dari populasi sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, sampel yang diambil adalah sajak yang mempunyai intensitas kritik terhadap masalah sosial, politik, militerisme, dan perlawanan yang tinggi dibandingkan dengan sajak-sajak lainnya. Sampel tersebut adalah "Nyanyian Akar Rumput", "Catatan", "Sajak Ibu", "Sajak Kepada Bung Dadi", "Batas Panggung", "Ceritakanlah Ini Kepada Siapa pun" "Tetangga Sebelahku", "Lingkungan Kita Si Mulut Besar", "Gumam Sehari-hari", "Pemandangan", "Nyanyian Abang Becak", "Lumut", "Tanah", "Suti", "Kampung", "Balada Pak Bejo", "Ayolah Warsini", "Sajak Suara", "Untuk D", "Istirahatlah Kata-kata", "Perngatan", "Biarkanlah Jiwamu Berlibur Hai Penyair", "Kota", "Di Tanah Negen Ini Milikmu Cuma Tanah Air", "Kota Ini Milik Kalian", "Kepada Ibuku", "Nonton Harga", "Tikus", "Catatan Malam", "Jalan", "Apa yang Berharga dari Puisiku", "Hari Ini Aku Brsiul-siul", "Sajak Anak-anak", "Sajak Bapak Tua", "Sajak Setumbu Nasi Sepanci Sayur", "Aku Lebih Suka Dagelan", "Jalan Slamet Riyadi Solo", "Catatan Suram", "Suara-suara dari Rumah Miring", "Hujan", "Pasar Malam Sruwedari", "Gentong Kosong", "Catatan 10 Januari, 1989, Siang", "Pemandangan", "Kuburan Purwoloyo", "Jam Dua Malam Dingin Sampai ke Leher", "Ibunda", "Buron", "Harimau", "Rumput Ilalang", "Tentang Sebuah Gerakan", "Kau Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binas", "Tujuan Kita Satu, Ibu", "Puisi Menolak Patuh", "Terus Terang Saja", "Derita Sudah Naik Seleher", "Puisi

Sikap”, “Merontokkan Pidato”, “Dalam Kamar 5 x 7 Meter”, “Kepada Nasri dan Adikku yang Lain”, “Catatan”, “Aku Berkelana di Udara”, “Sajak Malam”, “Sajak Semua”, dan “Tujuan Kita Satu Ibu”.

#### **1.6.4 Teknik Analisis**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara dialektik dengan model sebagai berikut. Mula-mula memahami sajak-sajak Thukul yang sudah dipilih sebagai sampel. Selanjutnya, memahami kehidupan Wiji Thukul dan keadaan kehidupan ekonomi, sosial, politik di era Orde Baru. Hasil pemahaman terhadap latar belakang kehidupan pengarang dan konteks kehidupan ekonomi, sosial, politik Orde Baru yang melingkunginya itu digunakan untuk memahami kembali sajak-sajaknya. Proses ini berulang terus menerus sampai dicapai pemahaman yang holistik.

#### **1.7 Sistematika Penyajian**

Hasil penelitian ini disajikan dalam 4 bab. Bab I berisi latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penyajian

Bab II berisi uraian atau deskripsi latar belakang kehidupan Wiji Thukul dan situasi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di masa Rezim Orde Baru.

Bab III berisi uraian tentang kritik terhadap masalah sosial, militerisme, dan politik serta perlawanan Wiji Thukul yang nampak dalam sajak-sajaknya. Kritik terhadap masalah sosial, yaitu pembangunan menggusur orang-orang kecil, pembangunan menyengsarakan kaum buruh, pembangunan menciptakan kemiskinan, dan pembangunan menciptakan gap sosial. Kritik terhadap masalah militerisme

meliputi dua aspek, yaitu kritik terhadap penggunaan cara-cara kekerasan dan penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kritik terhadap masalah politik difokuskan pada masalah pemilu. Perlawanan Wiji Thukul di bagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum menjadi buron dan setelah ditetapkan sebagai buron kasus kerusuhan Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996.

Bab IV berisi simpulan.

## BAB II LATARA BELAKANG KEHIDUPAN WIJI THUKUL DAN SITUASI SOSIAL POLITIK ORDE BARU

### 2.1 Latar Belakang Kehidupan Wiji Thukul

Thukul lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogeneng, Solo, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh dan tukang becak. Thukul sendiri berasal dari keluarga tukang becak. Latar belakang itu sudah menunjukkan kelas sosialnya, berbeda dengan Rendra dan Emha yang berasal dari kelas menengah. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Damono (1997:2) mengatakan bahwa tidak pernah ada kesusasteraan proletar dalam arti yang sebenarnya, di Rusia yang komunis sekalipun, yakni wadah bagi kaum proletar untuk mengungkapkan diri; yang ada adalah kisah orang kecil yang dimainkan oleh dalang priayi karena orang kecil yang tertindas ternyata juga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Sastra Indonesia pada dasarnya juga diciptakan oleh *priayi*. Dalam konteks tersebut, kehadiran Thukul menjadi fenomena tersendiri karena ia bukan dalang *priayi* yang memainkan kisah *wong cilik*, tetapi dalang *wong cilik* yang memainkan kisahnya sendiri. Thukul tinggal di sebuah kontrakan seharga Rp 200 ribu per tahun. Gubuk berukuran 3,5 x 3,5 M yang berdinding kayu dengan cat putih luntur itu ditempatinya bersama istri dan dua anaknya. Thukul lahir dari

bagian mereka yang tersingkir oleh arus pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang, seperti penuturannya berikut ini

Lihatlah, saya tukang pelitur, istri buruh jahit, bapak tukang becak, mertua pedagang rongsokan, dan lingkungan saya semua *mlarat*. Mereka semua masuk dalam puisi saya. Jadi saya tidak membela siapapun. Cuma secara kebetulan, dengan membela diri sendiri ternyata juga menyuarakan hak-hak orang lain yang sementara ini entah di mana. (AIJP, 168—169)

Latar belakang kelas itu kemungkinan menjadi salah satu faktor yang membuat penguasa dengan cepat memberikan cap komunis pada Thukul. Thukul mengakui bahwa ia tidak dapat menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dari menulis puisi, tetapi ia tetap menulis puisi karena puisi dianggapnya mampu menyuarakan persoalan orang kecil seperti dirinya. Melalui puisi, Thukul ingin “memberitakan” masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kelas bawah yang setiap hari diakrabinya. Melalui puisi pula, ia dapat mengkritik kebijakan pembangunan yang tidak bijaksana dan melakukan perlawanan terhadapnya. Kegigihan Thukul dalam mengkritik dan melawan Rezim Orde Baru membekas dalam hati seorang penulis Yogya berikut ini.

Wiji Thukul adalah laki-laki kecil yang berani. Ia “diberi waktu” untuk menjeritkan kembali derita kaum tertindas agar hidup menjadi lebih berimbang dan agar politik bukan hanya acara di meja parlemen, tampang rapi para pengamat atau teriakan parau para aktivis. Wiji Thukul hadir untuk membuat kehidupan ini memiliki jantung dan bangsa ini masih punya sedikit “harga diri” (Prasetyo, 2001:ii)

Thukul dianggap menyuarakan paham sosialis komunis karena ia banyak berbicara tentang ‘rakyat’ dalam puisi-puisinya meskipun pembelaan untuk rakyat

lewat sastra bukanlah monopoli kaum Lekra (Budiman, dalam Heryanto, 1986:7) atau komunis. Ketika dalam pembacaan puisi di Kedutaan Besar Jerman ada peserta yang menanyakan apakah ia membaca karya-karya Pramudya Ananta Tour (tokoh Lekra). Thukul menjawab secara diplomatis bahwa pertanyaan serupa mestinya ditanyakan kepada semua sastrawan yang membicarakan masalah sosial dalam karyanya. Rendra dan Emha juga melakukan pembelaan terhadap rakyat dan kaum tertindas dalam sajak-sajaknya, tetapi mereka tidak dicap komunis. Pembelaan diri Thukul dari tuduhan komunis juga dilakukan lewat sajaknya yang berjudul "Biarkanlah Jiwamu Berlibur Hei Penyair" berikut ini.

bahasa kita adalah bahasa Indonesia benar – bukan  
bahasa yang gampang  
dibolakbalik artinya oleh penguasa  
BBM adalah singkatan dari Bahan Bakar Minyak  
bukan Bolak Balik Mencekik  
**maka berbicara tentang nasib rakyat tidak sama dengan  
PKI atau malah dicap  
anti Pancasila  
itu namanya manipulasi bahasa  
(AIJP, 64)**

Thukul *droup out* dari SMKI pada tahun 1982 karena kekurangan biaya. Untuk membantu orang-tuanya, ia kemudian berjualan koran. Berkat bantuan seorang tetangganya, ia memperoleh pekerjaan tetap sebagai tukang pelitur di sebuah perusahaan meubel antik. Di depan teman-teman sekerjanya itu, ia sering membacakan sajak-sajaknya ketika sedang beristirahat. Pengalaman dirinya sebagai buruh dan lingkungan kampungnya yang rata-rata juga buruh membuatnya sangat memahami penderitaan kaum buruh. Sebagai seorang penyair buruh, ia pernah

diminta menjadi fasilitator *workshop* teater untuk buruh-buruh perkebunan di Sukabumi, Bandung, dan Jakarta.

Kepenyairan Thukul semasa muda digodok di pusat-pusat kebudayaan dan aneka sanggar yang bertebaran di Solo. Tahun 1970-an, ia sudah bergabung dengan para seniman di Taman Budaya Surakarta. Menurut teman-temannya di Taman Budaya, Thukul memang mempunyai naluri sebagai pemberontak (Laksmi, 2001). Sebelum bergabung dengan Taman Budaya, Thukul telah memulai aktivitas kesastranya melalui kelompok teater JAGAT (*Jejibahan Agawe Geneping Akal Tumukuk* atau sering pula disebut Jagalan Tengah). Bersama teman-temannya di teater JAGAT, ia mengamen puisi di warung-warung, restoran-restoran, kampus-kampus, dan kampung-kampung dengan menggunakan alat musik rebana, gong, seruling, gitar, *kenthongan*, dan sebagainya. Setelah besar, ia tidak hanya mengamen di Solo, tetapi juga di Yogya, Klaten, Surabaya, Jakarta, Korea, dan kota-kota besar di Australia. Ia pun sering membacakan puisinya dengan suara keras di kampungnya. Aktivitasnya itu merupakan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh para penyair Indonesia sehingga Ariel Heryanto pernah berharap agar lebih banyak lagi "sastra"wan yang bernyanyi, mendongeng lisan, dan berpentas sandiwara yang merakyat luas daripada hanya menulis tentang rakyat jelata. Harapan itu didasarkan pada kenyataan bahwa komunikasi lisan jauh lebih penting daripada tulisan dalam hidup sebagian masyarakat Indonesia (Heryanto, 1986:7). Nampaknya, Thukul, yang berasal dari lingkungan yang pada umumnya buta huruf, menyadari 'kelebihan' komunikasi lisan itu sehingga ia tidak semata-mata menulis puisi tentang rakyat, tetapi sungguh-sungguh merakyat dalam arti menyosialisasikan sajak-sajaknya dalam

berbagai kesempatan untuk menyadarkan rakyat akan ketertindasannya. Untuk aktivitasnya yang merakyat itu, Thukul juga sering disebut seniman rakyat. Akan tetapi, pilihannya itu sering membuatnya mendapat peringatan dan ancaman dari penguasa lokal (*Inside Indonesia*, No. 12, Oktober 1987, hlm. 28). Gubuk kontrakannya yang menyediakan buku-buku bacaan dari pasar loak untuk anak-anak kampung seringkali menjadi sasaran penggeledahan oleh aparat negara. Anak-anak Thukul dan kampungnya telah menyaksikan kesewenang-wenangan aparat ketika mengobrak-abrik gubuknya. Banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya bergaul dengan anak-anak Thukul karena dianggap sebagai anak penjahat negara. Anak-anak Thukul pun harus menanggung penderitaan disingkirkan dari lingkungan pergaulan. Istri Thukul, Sipon, melihat anak sulungnya jadi sering menulis dan suatu ketika ia membaca salah satu tulisannya yang ternyata berisi keluhan "*Apa toh politik itu? Saya tidak mengerti politik, tapi saya kira politik itu kejam. dan orang tua itu sungguh egois, saya punya sahabat, bapaknya golkar. Bapak itu melarang anaknya bermain dengan saya. Kalau ke sini, anak itu harus mencuri-curi*". Sipon sendiri pernah dipanggil dan diinterogasi di Komando Resor Militer Jebres. Ia diinterogasi seputar kehidupan sehari-hari dan aktivitas Thukul, terutama berkaitan dengan demonstrasi buruh. Tentara bergantian bertanya dan memaksanya menjawab sesuai dengan keinginannya. Karena bertahan menjawab sesuai dengan yang diketahuinya. Sipon pun mendapat pukulan dengan *kenop*. Selama berjam-jam ia diinterogasi sambil menggendong anaknya yang masih balita. Tentara baru melepaskannya ketika ia terpaksa menggigit punggung balitanya hingga menangis keras (*Basis*, No. 11, Th. Ke-50, November—Desember 2001, hlm. 31).

Sajak-sajak Thukul terbit dalam media cetak di dalam dan luar negeri, seperti *Suara Pembaharuan*, *Bernas*, *Suara Merdeka*, *Surabaya Post*, *Merdeka*, *Inside Indonesia* (Australia), *Tanah Air* (Belanda), *Politik* (Unhas), *Imbas* (UKSW), *Pijar* (UGM), *Keadilan* (UII), dan berbagai bulletin LSM. Akan tetapi, lebih banyak puisi Thukul yang dipublikasikan dalam bentuk fotokopi oleh dan di antara teman-temannya.

Thukul memperoleh nafkah untuk menghidupi keluarganya dari kerja di luar kesenian, yaitu usaha sablon, pembuatan tikar, tukang pelitur, pembuatan tas, dan sebagainya. Ia tidak percaya bahwa dengan menulis sajak dapat menghidupi keluarganya, tetapi sajak dianggap sebagai media yang dapat menyampaikan persoalan orang kecil seperti dirinya karena sastra sesungguhnya memiliki kekuatan politik yang dapat dioptimalkan fungsinya. Fenomena pengekangan karya sastra atau pentas sastra menunjukkan bahwa sastra memang memiliki kekuatan politik sehingga dianggap berbahaya. Ia mencontohkan pengekangan pembacaan sajak yang terjadi di kota Ngawi, Blitar, Sragen, dan Wonogiri meskipun pers kurang merespon peristiwa itu sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Hal itu juga menunjukkan bahwa pers pun menganut politik pemberitaan dengan hanya memberitakan pengekangan yang terjadi pada tokoh-tokoh terkenal, seperti Rendra dan Emha, yang dinilai punya nilai jual. Sementara itu, penyair-penyair di pedalaman yang sebenarnya lebih rajin berkarya dan cukup banyak jumlahnya kurang mendapat perhatian. Ia juga mendorong seniman-seniman di daerah untuk berani melawan marginalisasi pers dengan jalan memperluas jaringan komunikasi dan membuat penerbitan sendiri yang nonprofit. Thukul mengkritik seniman-seniman yang tidak memiliki kepekaan

terhadap berbagai masalah sosial politik yang terjadi sehari-hari atau yang masih mengandalkan tokoh. Ia mencontohkan pembreidelan yang dilakukan terhadap majalah *Tempo*, tabloid *Detik*, dan *Editor* yang mendapat porsi pemberitaan besar dari media masa dan mengundang simpatisan seniman, tetapi ketika ia mengajak seniman-seniman membuat petisi untuk menanggapi pencekalan dan pembreidela sastra yang terjadi di daerah tidak ada yang mau. Thukul merasa prihatin dengan banyaknya seniman yang masih mengandalkan ketokohan dan alergi atau takut dengan masalah politik. Menurutnya, jika seniman tidak tahu masalah sosial dan politik, maka hanya akan menjadi permainan penguasa. Seniman harus menjadi subjek, bukan objek dan jangan menjadikan sastra tumbuh di awang-awang. Thukul berpendapat bahwa sastra harus hidup di tempatnya hidup untuk merekam peristiwa yang tumbuh. Dengan kata lain, sastra harus kontekstual, tidak mengambang di awang-awang. Sastra tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan politik di tempat sastra itu tumbuh karena sastra berbicara tentang 'kehidupan' dan persoalan sosial politik merupakan bagian dari kehidupan (Jurnal *Revitalisasi Sastra Pedalaman*, Edisi Ke-2, November 1994).

Thukul tidak keberatan terhadap anggapan bahwa kelompok teaternya (komunitas sastra di kampung Kalangan) sebagai sastra arus bawah. Menurutnya, setiap zaman akan melahirkan kekuatan sastra arus bawah. Ia mencontohkan pada masa kolonial ketika pemerintah Belanda mendirikan Balai Pustaka yang menyediakan bacaan-bacaan yang menggunakan bahasa Melayu Tinggi sebagai bacaan yang baik untuk rakyat, muncul sastra arus bawah dengan bahasa Melayu rendah yang dimotori oleh Mas Marcodikromo yang oleh Belanda dianggap sebagai

bacaan liar. Pada masa Jepang juga muncul sastra arus bawah dengan penggeraknya Cak Durasim melalui kidung ludrukannya yang melawan Jepang (Jurnal *Revitalisasi Sastra Pedalaman*, Edisi Ke-2, November 1994). Akan tetapi, sikapnya itu menjadi nampak tidak konsisten dengan pernyataannya bahwa ia tidak membela rakyat dalam sajak-sajaknya. Boleh jadi, pernyataan tidak membela rakyat itu sebagai upaya Thukul untuk merendah karena pada kenyataannya ia dikenal sebagai sosok penyair yang gigih membela orang-orang yang selalu berhadapan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan. Ia juga dikenal sebagai penyair yang banyak menyuarakan hak buruh (Wachid, 2000:56) dan seniman. Ketika ada pencekalan acara Revitalisasi Sastra Pedalaman di Blitar, Thukul mengajak teman-temannya di Semarang untuk membuat petisi, meskipun kurang mendapat respon. Sebagai penduduk Jagalan Pucangsawit, ia bergabung dengan masyarakat sekampungnya untuk memprotes pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tekstil PT Sari Warna Asli. Tahun 1995, ia memimpin demo di pabrik tekstil PT Sritex Sukoharjo. Dalam demo itu, ia hampir kehilangan mata kirinya karena dipopor tentara.

Pernyataan yang bernada merendah juga nampak ketika ia membantah bahwa dirinya tergolong penyair protes. Ia mengatakan bahwa menulis sajak merupakan sebuah proses yang selalu kembali kepada persoalan dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa dahulu ia menulis sajak yang terkumpul dalam *Pelo* dan *Darman* yang diterbitkan oleh Taman Budaya Surakarta dengan bahasa yang dinilai orang sarat dengan simbol. Setelah ia *droup out* dari SMKI dan terpaksa menyambung hidup dengan bekerja sebagai buruh pelitur di perusahaan meubel antik, ia menghadapi dunia yang sungguh berbeda dengan dunia sekolah yang semuanya sudah diatur dan

ditentukan. Dalam dunia "nyata" ia harus memilih dan menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Teman-temannya sesama buruh yang sering diajaknya menyaksikan pentas teater dengan lakon-lakon yang "berat" tidak dapat memahaminya. Kejadian itu membuat Thukul memformulasikan cara bertutur yang berbeda serta mencoba menulis sajak yang dapat dimengerti oleh teman-temannya (*Jurnal Revitalisasi Sastra Pedalaman*, Edisi Ke-2, November 1994). Cara yang diusahakannya itu dengan sendirinya mempengaruhi bahasanya dan yang sekarang menjadi ciri khasnya.

Dengan bahasa seperti yang dikenal sekarang sebagai ciri khasnya itu, sajaknya mudah diterima oleh teman-temannya. Ketika gelombang demonstrasi menuntut Soeharto turun tidak lagi dapat dibendung, puisi Thukul yang berjudul "Peringatan" menjadi larik wajib untuk dikumandangkan (Laksmi, 2001). Di samping melalui media sastra dan gerakan fisik demonstrasi, Thukul juga terlibat langsung dalam organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia menjadi ketua Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER), sebuah lembaga di bawah PRD. JAKKER didirikan di Solo pada tahun 1994 dengan tujuan menyatukan para seniman yang bersedia mengangkat kesenian rakyat dan berjuang bersama rakyat. Keanggotaannya tersebar di Yogyakarta, Semarang, Tegal, Jakarta, dan Surabaya. Lembaga ini aktif melakukan kegiatan pameran kesenian rakyat, menciptakan karya seni yang membela kepentingan dan kesenian rakyat, dan ikut mengisi aksi masa dengan aktivitas budaya, seperti membaca puisi (Subogo dkk, 1996). Partai Rakyat Demokratik sebagai payung JAKKER memiliki program kerja dan pandangan yang revolusioner. Bagi PRD, perubahan yang mendasar harus menyertakan seluruh

rakyat. Oleh karena itu, mereka harus disadarkan dan aksi masa dianggap sebagai wahan pendidikan politik yang memadai bagi rakyat, tidak sekedar menyampaikan teori. PDR yang menganut azas sosial demokrasi kerakyatan sangat memperhatikan para kader dan tidak mengabaikan basis masa, yakni kaum yang selama rezim Orde Baru dimarginalkan dengan berbagai cara. Partai Rakyat Demokratik mewujudkan gerakannya dalam bentuk yang progresif dan revolusioner dengan merumuskan metode implementasi yang meleburkan berbagai komponen rakyat, seperti petani, buruh, dan pekerja untuk bersatu dalam gerakan perlawanan masa. Dalam aksinya, PDR menolak azas tunggal Pancasila, militerisme, dan dwi fungsi ABRI.

Dengan agenda dan tujuan seperti itu, Thukul hampir selalu terlibat dalam berbagai aksi masa, terutama yang diselenggarakan oleh kaum buruh di berbagai kota. Sorak sorai demonstrasi dan berbagai aksi masa seakan menyatu dengan sosok Thukul yang bertubuh kecil. Sajak-sajak yang dibacakannya mampu mengobarkan militansi di kalangan buruh dan pekerja karena sajak-sajaknya secara nyata menggambarkan atau merefleksikan ketertindasan mereka dan mengajak mereka untuk bersatu dalam barisan perlawanan. Demonstrasi kaum buruh yang merebak di berbagai kota dan dibukannya panggung mimbar bebas sekitar bulan April 1996 di halaman kantor pusat DPP PDI, di Jalan Diponegoro, Jakarta membuat penguasa semakin waspada. Aktivis yang terlibat dalam berbagai aksi masa dan mimbar bebas itu menjadi target polisi dan tentara, termasuk Wiji Thukul.

Setelah meletus peristiwa 27 Juli 1996 sebagai *buntut* penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, Thukul diburu oleh militer karena PRD dituding berada di belakang kerusuhan itu. Di samping itu, PRD sebagai organisasi

politik tidak mencantumkan azas Pancasila dalam AD/ART-nya. PRD dengan lembaga-lembaga *onderbouwnya* dianggap oleh Rezim Orde Baru setipe dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dinyatakan terlarang dan haram tumbuh di bumi Indonesia. Dalam pelariannya, Thukul tetap menulis puisi yang dikirimkan kepada teman-temannya dengan menggunakan nama samaran Budi Bang Branang. Pada tanggal 5 Agustus 1996, delapan polisi dan tentara bergerak ke kampung Kalangan untuk menggerebeg rumah Thukul karena Mabes ABRI mendapat informasi bahwa 24 aktivis PRD masih bersembunyi di Solo. Di rumah kecil sederhana berlantai tanah yang berdiri di pinggir sungai itu, polisi tidak menemukan Thukul. Polisi membawa buku-buku kumpulan puisi, antara lain karya Thukul yang berjudul *Mencari Tanah Lapang*, buku-buku lain, poster, dan surat-surat yang dibuat Thukul selaku ketua JAKKER serta sejumlah stiker bertuliskan **INI RUMAH DEMOKRASI**. Rumah Thukul yang juga digunakan sebagai markas Sanggar Suka Banjur untuk melatih anak-anak miskin melukis dan menyediakan buku-buku bacaan dari pasar loak menyimpan banyak lukisan hasil karya anak-anak yang tidak luput dari sitaan aparat. Polisi menghardik istri Thukul ketika menemukan lukisan dengan nama Wani, anak Thukul. Polisi menuduh Thukul dan istrinya sudah menanamkan rasa perlawanan terhadap anaknya yang masih kecil. Penggeledahan itu membuat anak-anak Thukul mengalami trauma sehingga selalu ketakutan setiap kali melihat orang bertampang polisi atau militer atau berseragam loreng. Menurut pengakuan Sipon (*Basis*, Nomor 11—12, Tahun Ke-50, November—Desember 2001, hlm. 32—33), istri Thukul, anak-anaknya sangat membenci polisi dan tentara karena mereka menganggap polisi dan tentaralah yang menculik bapaknya. Sementara itu, ia tidak

dapat berbuat apa-apa, apalagi melarang mereka membencinya karena mereka menyaksikan sendiri kekerasan dan kekasaran aparat polisi dan tentara ketika mengeledah rumahnya. Kesewenang-wenangan telah menanamkan rasa benci kepada anak yang belum saatnya memendam kebencian. Dalam benak anak bungsunya, pekerjaan polisi adalah menembaki mahasiswa seperti yang sering dilihatnya di televisi. Anak bungsunya jadi punya kebiasaan aneh, yakni setiap kali melihat aparat berseragam loreng ia selalu berusaha mendekatinya dan melipat tangannya seraya mengeluarkan kata-kata "*jambore-jambore, bar*". Sipon dan orang-orang dewasa lainnya tidak pernah tahu arti kata-kata tersebut karena Fajar merah, anaknya, tidak pernah mau menceritakan maksudnya. Setiap kali melihat polisi ia juga akan mendekatinya dan membaca nama yang tertera di baju seragamnya lalu diam-diam menghafalkannya. Ia akan mengenali polisi itu di mana pun mereka bertemu, sekalipun tidak memakai seragamnya lagi. Sipon tidak pernah tahu maksudnya dan anaknya pun tidak mau menceritakan. Anak sulungnya yang bernama Wani juga sering terbangun malam-malam lalu menangis. Tangis Wani di malam hari itu mengingatkan Sipon pada Thukul yang pernah dipergokinya sedang menangis di tengah malam. Ternyata Thukul sedang menulis sajak tentang penderitaan penduduk Cimacan yang dirampas tanahnya dengan hanya mendapat ganti rugi Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per meter.

Bulan Desember 1997, dini hari Thukul pulang secara diam-diam menemui keluarganya di Solo. Akan tetapi, ia hanya sempat melihat istrinya karena tergesa-gesa untuk segera pergi lagi. Ia sadar bahwa polisi dan tentara sedang memburunya dan sudah mengumumkan ke masyarakat agar memberikan informasi jika

mengetahui keberadaan dirinya. Pada bulan Februari 1998, untuk yang terakhir kali Thukul menghubungi istrinya melalui telepon. Menurut penuturan istrinya, saat itu Thukul berada di Stasiun Tugu Yogyakarta. Thukul berpesan agar ia menjaga anak-anaknya dengan baik. Pesan terakhir itu seakan sebuah janji kehidupan bahwa meskipun Thukul harus hidup dengan penuh kesulitan, tantangan, dan siksaan, suatu hari nanti ia akan tetap kembali. Setelah itu, Thukul menghilang, tidak ada kejelasan tentang dirinya. Misteri menghilangnya Wiji Thukul baru ditemukan titik terangnya dua tahun kemudian. Menurut laporan KontraS, penghilangan Thukul dilakukan oleh alat-alat negara pada pertengahan Mei 1998, saat-saat terakhir kekuasaan Soeharto bertahan. Thukul telah melengkapi daftar orang hilang karena aktivitas politiknya yang menyinggung batas nafsu kekuasaan Orde Baru (Munir, 2000:xvii).

## **2.1 Situasi Sosial Politik Masa Rezim Orde Baru**

Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Jenderal Soeharto tampil sebagai pemimpin bangsa. Soeharto kemudian membuat perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan politik (Budiman, 1998:86). Naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan menandai berakhirnya Rezim Orde Lama dan dimulainya lembaran Rezim Orde Baru. Soeharto melihat bahwa pendekatan politik sebagai panglima pada rezim Orde Lama justru menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat (Nugroho, 2001:108). Masyarakat mengharapkan rezim Orde Baru dapat membawa perubahan dan membawa Indonesia pada kemakmuran ekonomi. Soeharto menangkap dan merespon tuntutan masyarakat dengan menempatkan pembangunan ekonomi sebagai panglima.

Pembangunan ekonomi ditempatkan pada prioritas utamanya melalui kebijakan ekonomi yang lebih dikenal dengan *trickle-down effect* yang didasarkan pada harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberi tetesan ke bawah (Meier dalam Firdausy, 1998:58).

Pembangunan yang menekankan pada dimensi ekonomi tersebut pada awal Orde Baru sekilas dapat menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu dengan pengambilan modal asing dan diimbangi dengan stabilitas politik dapat menekan laju inflasi menjadi sekitar 10 % sehingga tingkat pertumbuhan GNP meningkat cukup drastis dan menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang pendapatan perkapitanya tertinggi di kawasan Asia. Dalam waktu kurang dari 15 tahun, pendapatan perkapita penduduk menembus angka US\$ 560 membuat Indonesia tidak lagi ditempatkan sebagai negara miskin (Nugroho, 2001:109). Perbaikan yang berarti juga dicapai dalam sektor-sektor lain, seperti pemberantasan tuna aksara di kalangan orang dewasa, peningkatan usia kematian rata-rata, menekan tingginya angka kematian bayi, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1990-an, Indonesia telah berhasil menjadi negara eksportir terbesar di dunia untuk gas alam cair, kayu lapis dan udang, produsen tekstil dan perabotan yang disegani (Winters, 1999: 10). Akan tetapi, strategi Orde Baru yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai panglima dengan tekanan pada pertumbuhan melupakan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan keadilan sosial. Masing-masing pilihan mengandung resiko ekonomi, sosial, dan politik.

Dengan memilih pertumbuhan ekonomi lebih dahulu, maka ketimpangan pendapatan mewarnai proses awal pembangunan. Ketimpangan pendapatan dan ketidakberdayaan sosial tidak dapat dihindari (Nugroho, 2001: 184). Pembangunan ekonomi telah mendatangkan kekayaan yang luar biasa bagi segelintir orang, terutama presiden dan kroninya, di tengah-tengah kemiskinan yang merajalela (Winters, 1999: 8). Pembangunan memerlukan modal dasar yang besar dan hal itu dapat dipenuhi dengan cepat melalui pajak yang ditarik lewat sektor industri, seperti argo industri, peternakan, pertambangan, properti, pabrik, pariwisata, dan mega proyek lain yang memerlukan lahan luas. Oleh karena itu, negara memberikan dukungan kepada para pengusaha dalam rangka melakukan pembebasan tanah dan menyebarkan jargon "berkorban demi pembangunan". Dalam berbagai kasus pembangunan proyek-proyek industri itu yang menjadi korban justru kaum tani yang seharusnya dilindungi dari para kapitalis (Nugroho, 2001:248). Undang-undang Agraria diinterpretasi atas dasar kepentingan rezim yang lebih berpihak kepada kaum pemodal. Sistem sosial depolitis dijadikan sebagai sandaran untuk memilih kepentingan pada akumulasi kapital melalui berbagai program. Kolusi antarapengusaha, birokrat, dan pihak asing menyebabkan kebijakan-kebijakan menyangkut hal pemilikan tanah rakyat terabaikan. Para pengusaha diizinkan dan dilindungi untuk melakukan pengusuran-pengusuran tanah rakyat demi pembangunan industri.

Berbagai masalah seputar pembebasan tanah kemudian muncul di berbagai daerah yang tidak jarang diwarnai dengan konflik berdarah dan menimbulkan korban jiwa, seperti rencana pembangunan bendungan Jipang di Bojonegoro, Gadjah

Mungkur di Wonogiri, Mrican di Banjarnegara, Saguling dan Cirata di Jawa Barat, Nipah, Jenggawah, Tapos, konservasi purbakala Borobudur, Sentul, Lore Lindu, komunitas Dayak, dan Amungne di Jayapura (Nugroho, 2001:248). Pembebasan tanah untuk pembangunan proyek-proyek tersebut sangat melukai hati rakyat karena ganti rugi yang tidak layak. Dalam kasus penggusuran penduduk untuk pembangunan waduk Gajah Mungkur, 51 desa digusur dengan nilai ganti rugi Rp 28,- per meter persegi jauh dari harga pasaran tanah yang ketika itu berkisar Rp 500,- meter persegi. Masalah penggusuran tanah penduduk yang paling menghebohkan adalah kasus Kedung Ombo yang dimulai pada tahun 1984 dan mencapai puncaknya pada tahun 1989. Kasus itu telah menyita perhatian publik sampai tingkat internasional. Berbagai elemen masyarakat, seperti LSM, LBH, mahasiswa, wartawan, dan rohaniawan bahu membahu membantu perjuangan rakyat Kedung Ombo yang dipaksa transmigrasi untuk mendapat hak-haknya. Kedung Ombo dipagar betis dan dinyatakan sebagai zona tertutup oleh aparat keamanan. Penduduk yang terpaksa mau menerima ganti rugi tak layak pun masih mendapat perlakuan tidak adil dari aparat desa berupa pemotongan uang anti rugi yang semakin merugikan penduduk. Penduduk yang menolak transmigrasi atau dipindahkan diintimidasi dengan kekerasan fisik dan mental berupa pemberian tanda ET/OT pada KTP dan cap komunis sehingga banyak penduduk yang ketakutan dan melarikan diri ke hutan atau menginap di kantor LBH. Bahkan, pemerintah tanpa belas kasihan menenggelamkan rumah-rumah penduduk yang tetap bertahan sehingga mengakibatkan lebih dari 10 orang penduduk ikut tenggelam. Mahasiswa bersama-sama berbagai elemen masyarakat membentuk KSKPKO, yaitu Kelompok

Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo yang gigih membela mereka melalui demonstrasi, advokasi, dan "pendudukan" wilayah yang mulai ditenggelamkan dan dinyatakan terlarang bersama-sama penduduk Kedung Ombo yang tetap bertahan. LSM pun bergerak di wilayah internasional dalam pertemuan INGI (*International NGO Forum on Indonesia*) di Nievwport, Belgia dengan mendesak Presiden Direktur Bank Dunia, Barber Conbel, sebagai sponsor pembangunan Kedung Ombo agar memperhatikan masalah pemukiman kembali secara paksa sekitar 5000 keluarga. Pemerintah RI akhirnya mendapat teguran dari Bank Dunia dan penanganan kasus Kedung Ombo mulai berubah, tetapi tetap menyisakan banyak masalah menyangkut ganti rugi yang dinilai tetap tidak layak (Stanley, 1994: 445—451).

Berbagai pengusuran itu menyebabkan marginalisasi sosial masyarakat kelas bawah karena harus kehilangan lahannya atau runtuhnya penguasaan tanah secara tradisional yang dialami komunitas-komunitas lokal (Nugroho, 2001: 248). Konflik tanah yang terus meningkat sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru, tidak hanya terbatas di daerah pedesaan, tetapi juga merambah ke wilayah perkotaan.

Dalam hal tenaga kerja, para buruh mengalami ketidakadilan yang sama dengan para petani yang harus kehilangan lahan pertaniannya. Tekanan pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat Rezim lebih memusatkan perhatiannya kepada pengusaha daripada buruh. Jumlah angkatan kerja yang tinggi membuat kaum pekerja itu menjadi pihak yang lemah karena tidak memiliki posisi tawar. Bahkan, jumlah buruh yang tinggi dan upah yang murah dijadikan sebagai modal dasar dan faktor penarik masuknya modal asing. Hal itu merupakan dampak dari sistem

ekonomi kapitalis yang menganggap pengusaha sebagai pemacu pertumbuhan. Fasilitas-fasilitas istimewa diberikan kepada para pengusaha, sementara itu buruh semakin diperas tenaganya dengan bayaran yang sangat murah (Budiman, 1993:ix) dan jam kerja yang panjang serta tanpa jaminan kesehatan.

Sementara itu, sistem perpajakan yang tidak baik membuat penerimaan pajak dari industri yang tadinya diandalkan sebagai modal dasar pembangunan tidak berjalan sesuai rencana sehingga untuk membiayai pembangunan, Indonesia nyaris hanya mengandalkan pinjaman luar negeri. Pada tahun 1990 Indonesia telah menjadi negara penghutang terbesar setelah India (Budiman, 1993:viii). Meskipun pemerintah telah memberikan banyak fasilitas kepada para pengusaha, pertumbuhan ekonomi ternyata juga berjalan sangat lambat. Padahal, *trickle-down effect* hanya mungkin terrealisasi jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 10 %. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang lambat itu paling dirasakan oleh para petani dan buruh yang tadinya diharapkan akan mendapat tetesan. Biaya produksi terus ditekan dengan cara membayar murah buruh. Rata-rata buruh hanya dibayar Rp 150,00 per jam tanpa ada jaminan kesehatan dengan waktu kerja 9 jam sehari (Tjandraningsih, 1993:167).

Berbagai dampak sosial yang berimbas pada masyarakat kelas bawah itu mengundang keprihatian dari kaum cendekiawan yang kemudian memberikan kritik terhadap elit politik untuk meninjau ulang strategi pembangunan dan berbagai kebijakan yang secara substansial kurang memberi ruang gerak kepada masyarakat sebagai subjek. Partisipasi masyarakat yang diharapkan datang dari bawah justru berbalik menjadi mobilisasi pembangunan dari atas. Teknokrasi dan strategi dalam

hal pengambilan keputusan mewarnai proses transformasi sosial (Nugroho, 2001:110).

Secara nasional, Indonesia nampak sebagai negara yang kaya, tetapi secara sosial kesenjangan ekonomi makin tinggi. Kesenjangan itu dilanggengkan dengan sistem politik yang menjauhkan masyarakat dari proses-proses politik sehingga kesenjangan ekonomi identik dengan kesenjangan politik. Organisasi politik yang dibuat pemerintah terkooptasi. Padahal, masyarakat membutuhkan organisasi yang benar-benar menyuarakan aspirasi mereka. Oleh karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi alternatif masyarakat yang tersisih untuk meminta bantuan dan perlindungan (Sinaga, 1996).

Di sisi lain, pembangunan ekonomi yang digalakkan Rezim Orde Baru memerlukan prasyarat penciptaan stabilitas politik (Leirissa, 1996:100). Perlunya stabilitas politik digunakan sebagai pembenar kepemimpinan militer. Dengan konsep dwi fungsi ABRI, militer Indonesia mendominasi kehidupan politik. Ideologi yang melegitimasi dominasi militer itu terutama diterima oleh kelas menengah ke atas yang lebih diuntungkan (Budiman, 1996:86). Rezim Orde Baru beranggapan bahwa pemulihan ekonomi hanya dapat dicapai—kala itu—jika kehidupan politik dikendalikan dan dikontrol dengan laras senapan (Prasetyo, 2001:67). Protes-protes atau demonstrasi di luar institusi dianggap tidak benar dan ilegal serta dituduh anti pembangunan dan subversif (Budiman, 1996:87).

Demi tercapainya stabilitas politik, pemerintah juga menciptakan sentralisasi kekuasaan dengan pengucilan politik yang ditopang oleh penggunaan aparatur represif Komkamtib/Bakorstanas dan Intelijen. Pengucilan politik itu terlembaga

dalam bentuk depolitisasi lembaga-lembaga pemerintah, pers, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pengintroduksian sistem "masa mengambang" di pedesaan (Sulasmono, 1997:79).

Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin baru juga tidak banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan bangsa karena telah direduksi dan direkayasa untuk melanggengkan kekuasaan. Pesta demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali dan telah diselenggarakan selama enam kali selama penguasa Orde Baru bertahta itu telah diubah menjadi pesta dalam arti yang sebenarnya, yakni berhura-hura dan menghambur-hamburkan uang. Partai politik dibatasi hanya tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan dipaksa untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggalnya. Kampanye pemilu yang seharusnya menjadi sarana pendidikan politik rakyat juga berubah menjadi pesta musik dangdut dan pawai kendaraan sehingga masyarakat tidak bertambah sadar dan dewasa secara politik, tetapi hanyut dalam sorak sore pesta. Dalam kampanye pemilu, juru kampanye juga dilarang mengkritik kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah yang sedang berkuasa karena dianggap dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Juru kampanye hanya diizinkan untuk menawarkan program-program partainya jika menang dan berkuasa sehingga kampanye tidak saja menjadi ajang pesta musik, tetapi juga arena mengumbar janji dan membodohi rakyat. Ironi dan paradoks pun tidak dapat dihindari, terutama ketika Golkar sebagai partai yang berkuasa menurunkan para menteri sebagai juru kampanyenya. Para menteri mengumbar janji hendak mengentaskan kemiskinan,

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kecil, mengurangi pengangguran, dan menegaskan serta menegakan janji-janji Orde Baru untuk melaksanakan amanat yang ada dalam Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Janji-janji itu sangat bertentangan dengan yang mereka lakukan, yaitu membiarkan kesenjangan sosial dan kemiskinan makin meluas, moral dan akhlak merosot, dan KKN merajalela. Janji-janji para juru kampanye dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan bagaikan jauh panggang dari api. Kampanye menjadi mubazir bukan hanya karena menjadi arena mengumbar janji, tetapi juga karena sudah dapat dipastikan pemenangnya sebelum hari pencoblosan digelar. Dapat dikatakan bahwa secara umum sistem politik Indonesia menempatkan Pemilu sebagai faktor yang kurang berarti. Hal itu, dipertegas dengan, antara lain banyak anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh presiden sehingga lebih berorientasi ke atas daripada membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Negara pun sudah berubah menjadi negara korporatik dengan tunduknya semua lembaga negara, lembaga pendidikan, dan pers di bawah naungan presiden. Padahal, jika demokrasi benar-benar berjalan, rakyat sejajar dengan pemerintah sehingga kontrol dapat dilakukan (Noer, 1997).

Berbagai praktek kekuasaan Orde Baru itu membuat Soebadio Sastrosatomo (1994:3—4, Sindunata: 1998) menyimpulkan bahwa Rezim Orde Baru telah menjalankan politik Dasamuka. Sistem politik Dasamuka adalah sistem kekuasaan sepuluh wajah, yaitu (1) kadaulatan rakyat dirampas, (2) Pancasila dijadikan tameng kekuasaan, (3) hukum dikangkangi, (4) parpol dan serikat buruh dipasung, (5) parlemen dikebiri, (6) pers dimandulkan, (7) ekonomi berwajah nepotisme-

monopoli-korupsi-kolusi, (8) pendidikan dijinakan, (9) kebudayaan diseragamkan, dan (10) nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak.

Tidak jauh berbeda dengan analisis Sastrosatomo, Arief Budiman (1993:vii) juga melihat kepemimpinan Soeharto didasarkan pada dua kebijakan

*Pertama*, stabilitas politik dijaga ketat. Maka peran militer menjadi dominan. Perubahan struktur politik dan hubungannya dengan penyelenggaraan stabilitas politik ini, segera dilakukan. Partai-partai dikendalikan geraknya, dan kemudian diperkecil sehingga jumlahnya cuma tinggal tiga. Organisasi-organisasi profesi dibuat menjadi tinggal satu sehingga mudah dikendalikan pemerintah. Dua puluh persen dari kursi yang ada di DPR dan MPR diberikan kepada ABRI sesuai dengan 'mekanisme konsensus nasional', sedangkan para calon anggota DPR lain harus diteliti secara khusus (litsus) supaya kesetiannya kepada negara dan bangsa tidak perlu diragukan lagi.

*Kedua*, memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu inflasi harus dikendalikan. Untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan dana yang besar. Dana itu kemudian dicari melalui pinjaman luar negeri.

Perlawanan terhadap Rezim Orde Baru yang otoriter dan militeristik kemudian dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Akan tetapi, suara-suara kritis selalu dibungkam dengan tindakan represif militer. Untuk membungkam para aktivis atau orang-orang yang dianggap "berbahaya" militer tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, penculikan, bahkan penghilangan orang. Selama Rezim Orde Baru berkuasa ada tiga kasus penghilangan orang secara paksa yang menonjol, yaitu (1) korban penculikan aktivis tahun 1998, (2) penculikan petani dan buruh, dan (3) penculikan di Aceh dan Irian Jaya. Penghilangan orang terjadi di berbagai tempat dari Aceh sampai Jaya Pura. Tahun 1981—1990 sebanyak 490 orang di Kediri, Malang, dan Tanjung Priok hilang. Ratusan orang hilang di Aceh selama

diterapkannya DOM. Paling banyak adalah aktivis yang hilang sebagai akibat peristiwa 27 Juli (*Kompas*, 31 Agustus 2001). Sepanjang kekuasaan Rezim Orde Baru tidak terhitung lagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara berupa penculikan, pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya.

Di samping penculikan, Rezim Orde Baru yang mengharamkan kritik juga tidak segan-segan untuk melakukan pembredelan terhadap surat kabar atau majalah, pencekalan pentas kesenian, pencekalan dan penahanan orang-orang yang dianggap bersberangan dengan penguasa (Sindunata, 1998). Penguasa, yang melihat gerakan oposisi mulai mengkristal pada sosok Megawati yang dipilih oleh warga PDI sebagai ketuanya, merekayasa kongres PDI di Medan yang menghasilkan kepengurusan Suryadi sebagai versi ketua PDI yang diakui pemerintah untuk menghadapi pertarungan Pemilu 1997 yang makin memanas. Megawati dan para pendukungnya membuat panggung mimbar bebas di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta. Hampir setiap hari tampil tokoh politik dan aktivis pro Mega yang berorasi dan mengkritik kebijakan penguasa Orde Baru. Aktivitas di Jalan Diponegoro itu tidak lepas dari pengamatan penguasa. Pada tanggal 22 Juli 1996 (*Kedaulatan Rakyat*, 23 Juli, 1996, hlm. 1) Panglima TNI, Jenderal Feisal Tanjung menyatakan mimbar bebas itu sebagai aktivitas yang terlarang dengan alasan, “*Jelas, memang tujuannya ingin menggulingkan pemerintah. Kalian lihat saja, statemennya. Lihat kata-katanya yang ada di spanduk-spanduknya. Bukan bangsa Indonesia, tapi itu sudah PKF*”. Feisal Tanjung menambahkan bahwa pihaknya akan menangkap para pengunjung rasa dan pengisi mimbar bebas itu. Kasospol Jendral Syarwan Hamid juga mengatakan hal yang senada bahwa gaya-gaya protes dan selebara gelap yang

disebarkan oleh para pendukung Megawati itu berisi, antara lain seruan-seruan untuk mogok nasional, melakukan aksi masa, dan memancing kerusuhan. Mimbar bebas yang juga digelar di berbagai kota memiliki kesamaan dengan pola PKI. Tekanan dari penguasa militer itu membuat Mega membubarkan mimbar bebas itu pada tanggal 25 Juli 1996 (*Kedaulatan Rakyat*, 26 Juli 1996, hlm. 1)

Pengambilalihan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang dilakukan oleh masa Suryadi dengan bantuan aparat militer berbuntut pada kerusuhan 27 Juli 1996. Kerusuhan yang terjadi di jantung ibukota itu merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan karena terjadi di ibukota negara yang selalu dijaga ketat dan kerusuhan pertama yang tidak menjalar pada sentimen etnis. Sasaran pembakaran dan perusakan adalah kantor-kantor pemerintah sebagai simbol kekuasaan sehingga pesan para pengunjuk rasa itu jelas terbaca sebagai perlawanan terhadap pemerintah, bukan pada etnis Tionghoa seperti yang sering terjadi di berbagai daerah. Dalam pernyataannya Menkopolkam Soesilo Soedarmanto mengatakan bahwa kerusuhan itu didalangi oleh PRD yang merupakan reinkarnasi dari PKI. Kemiripan itu ditunjukkan dengan adanya organisasi-organisasi *onderhouwnya*, yaitu Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) yang diketuai Dita Indah Sari sama dengan SOBSI, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID dengan ketua umumnya Andi Arief sama dengan CGMI, Serikat Tani Nasional (STN) dianggap penjelmaan BTI, dan Jaringan Kesenian Rakyat atau Jaker yang diketuai Wiji Thukul dianggap sama dengan LEKRA. PRD merupakan jelmaan dari PKI yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1966 (*Kedaulatan Rakyat*, 30 Juli 1996, hlm. 1). Pada tanggal 2 Agustus 1996, secara resmi Mabes ABRI mengumumkan bahwa otak

kerusuhan 27 Juli adalah Budiman Soedjatmiko sebagai ketua umum PRD. Mabes ABRI memberikan himbuan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan Budiman Soedjatmiko dan rekan-rekannya, seperti Wiji Thukul sehingga mempermudah pihak berwenang untuk menangkapnya. Perburuan terhadap para aktivis PRD pun dilakukan di seluruh penjuru tanah air. Dita Indah sari, Pontoh, dan Soleh tertangkap di Surabaya dengan tuduhan melakukan makar, subversif, dan menentang pemerintahan yang sah. Pihak imigrasi pun memasang daftar pencekalan untuk menghindari para aktivis itu lari ke luar negeri. Perburuan juga dilakukan di Solo setelah Mabes ABRI mendapat laporan tentang 24 orang aktivis yang bersembunyi di kota itu. Aparat pun bergerak ke kampung Kalangan dan mengeledah rumah Wiji Thukul. Kapolwil Surakarta menyatakan bahwa polisi menemukan 8 bundel buku dan sejumlah stiker yang menunjukkan sikap provokatif dan anti pemerintah. Menurutnya, dalam buku Wiji Thukul ditemukan banyak sekali kata rakyat serta terbukti menggunakan kesenian untuk mencapai tujuan melawan pemerintahan yang sah. Selanjutnya, Kapolwil Surakarta juga menyatakan bahwa Wiji Thukul juga mempunyai kecenderungan mental makar (Kedaulatan Rakyat, 9 Agustus 1996, hlm. 1).

Dalam upaya memburu para aktivis itu, aparat melakukannya dengan model penangkapan dan penculikan. Budiman Soedjatmiko ditangkap di Bekasi. Mereka yang ditangkap dan penangkapannya diketahui publik diajukan ke pengadilan. Pengadilan terhadap para aktivis PRD juga mendapat sorotan masyarakat. Mereka yang pada mulanya disetel ke pengadilan dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunis dan mendalangi kerusuhan Sabtu Kelabu, ternyata dijatuhi hukuman dengan

tuduhan subversif, yakni dianggap memutarbalikan fakta, merongrong dan menyelewengkan ideologi negara atau Haluan Negara sesuai dengan 1 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 UU Nomor 11/PNPS/1963?UU Subversif. Pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP, perbuatan subversif itu adalah melakukan rapat pembentukan PRD, menggalang aksi buruh, menyampaikan pernyataan yang memutarbalikan fakta tentang pemerintah Orde Baru. Para aktivis itu dijatuhi hukuman kurungan yang beragam: Budiman Soedjatmiko (13 tahun), Garda Sembiring (12 tahun), Pramono (9 tahun), Eko Kurniawan (8 tahun), Suroso (7 tahun), Haryanto Taslam (6 tahun), Ken Budhi Kusumandaru (4 tahun), Putut Ariantika (18 bulan), Victor da Costa (18 bulan), dan Dita Indah Sari (6 tahun). Dalam pembelaannya, Budiman Soedjatmiko mengatakan bahwa PRD bukanlah gerakan bawah tanah, tetapi organisasi terbuka yang manifesto politiknya juga diumumkan ke publik secara terbuka. Budiman mengatakan bahwa jika aktivitas demonstrasi, mendirikan organisasi, membuat manifesto politik dan sebagainya dianggap melanggar hukum, maka tidak seharusnya mereka diadili dengan UU subversif (Lukas Luwarso, Johan Budi SP, dan Jalil Hakim, *Forum Keadilan*, Nomor 03, Tahun Ke- VI, 9 Mei 1997).

Nasib yang lebih buruk dialami oleh aktivis PRD yang diculik. Pengakuan para korban penculikan yang selamat, seperti Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Desmon Mahesa, dan Andi Arief, mengungkapkan pola-pola penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan aparat. Mereka diculik dan dimasukkan ke mobil dengan mata tertutup, kemudian di bawa ke suatu tempat dan di sekap di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab selama sehari-hari. Dalam interogasi, mereka juga mengalami penyiksaan dengan penyetruman, pemukulan, penendangan,

pencambakan, pemukulan, penyulutan anggota tubuh dengan dengan puntung rokok, dan pemutaran radio dengan suara yang sangat keras sehingga menyakitkan telinga. Masalah penculikan itu tidak hanya makin menghangatkan suhu politik di dalam negeri, tetapi juga mengundang reaksi dunia Internasional. Dunia Internasional ikut menekan Indonesia supaya menghargai Hak-hak Azasi manusia. Di dalam negeri, pengakuan para aktivis selama dalam penyekapan telah mengundang simpati publik dan semakin menimbulkan resistensi terhadap penguasa.

Rezim Orde Baru tidak tinggal diam, tangan-tangan militer kembali digunakan untuk menekan dan menindak semua gerakan perlawanan itu. Represi yang dilakukan oleh aparat militer semakin menimbulkan resistensi dalam masyarakat dan menguatkan gerakan rakyat yang makin besar untuk melakukan perlawanan terhadapnya. Demonstrasi mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat lainnya terjadi di berbagai kota. Perlawanan itu mencapai puncaknya dengan tergulingnya penguasa Orde Baru dari puncak kekuasaannya. Peristiwa itu dibayar dengan biaya yang amat mahal, dengan jatuhnya banyak korban anak bangsa yang mempunyai hati nurani yang mendambakan Indonesia menjadi negara yang berkeadilan. Pada momentum itulah Thukul menghilang bersama banyak aktivis lainnya. Ia telah menjadi korban langkah kasar kekuasaan militer (Munir, 2000:xvi).

## **BAB III**

### **KRITIK DAN PERLAWANAN WIJI THUKUL**

#### **3.1. Kritik Terhadap Masalah Sosial, Politik, dan Militerisme**

Masalah sosial, politik, dan militerisme dalam konteks Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pemilahan dalam pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan keterkaitan antara satu masalah dengan masalah lainnya, tetapi hanya untuk mempermudah mengidentifikasikannya. Dalam pembahasan ini, keterkaitan itu tetap dilihat sebagai satu relasi yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh adalah ketimpangan antara lapisan penduduk dalam suatu masyarakat yang pada hakikatnya bersumber pada problem kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Konsep kemiskinan sendiri tidak dapat dipahami dalam arti sempit, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai problem ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

##### **3.1.1 Kritik Terhadap Masalah Sosial**

Masalah sosial dalam penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pengusuran atau marginalisasi orang-orang kecil, kemiskinan, perburuhan, dan kesenjangan sosial. Pembangunan pada era Orde baru telah menciptakan berbagai masalah sosial, seperti pengusuran, pemiskinan, perburuhan, dan kesenjangan sosial. Pada empat aspek itulah kritik Wiji Thukul terlihat menonjol dalam sajak-sajaknya.

### 3.1.1.1 Pembangunan Menyebabkan Penggusuran

Munculnya kritik tersebut merupakan reaksi dari adanya masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, hadirnya kritik sosial tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial yang timbul selama proses pembangunan berlangsung. Sejak dicanangkannya Pelita pertama tahun 1971, Rezim Orde Baru menerapkan strategi pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan tetesan ke bawah. Strategi pembangunan ekonomi ini dikenal dengan *trickle down effect* (Meier dalam Firdausy, 1998:58). Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan. Akan tetapi, keberhasilan ekonomi ditingkat makro itu tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran untuk melihat realitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Faruk, et.al., 2000:91). Pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro berjalan sangat lambat. Prioritas pada pertumbuhan ekonomi membawa konsekuensi ditelantarkannya kepentingan orang-orang kecil. Tanah-tanah rakyat digusur demi pembangunan pabrik-pabrik, dam, pembangkit listrik, dan pusat perbelanjaan atau pusat-pusat perdagangan. Orang-orang kecil yang tergusur, terpaksa hidup berpindah-pindah, menjadi gelandangan di negeri sendiri. Masyarakat kelas bawah adalah golongan yang paling banyak dirugikan dan menanggung penderitaan sebagai kelas yang dikorbankan. Sebagai bagian dari masyarakat yang lemah secara ekonomi dan politik sehingga harus tersingkir dari arus pembangunan, Thukul mengalami sendiri berbagai kegetiran hidup itu. Rumah-rumah penduduk yang diratakan dengan semena-mena untuk diubah menjadi areal pabrik atau pelebaran jalan raya memaksa orang-orang yang kehilangan tempat tinggal itu

mencari pemukiman baru seadanya. Dengan ganti rugi yang tidak sepadan, mereka sangat sulit mencari tempat tinggal baru yang layak, apalagi di daerah perkotaan yang padat. Kesempatan untuk tetap bertahan hidup hanya mungkin dilakukan dengan mendirikan gubuk-gubuk di pinggir-pinggir bangunan permanen, membangun gubuk-gubuk kardus di lahan kosong yang masih ada, atau di pinggir kali dengan resiko siap menghadapi banjir. Keadaan yang sangat memprihatinkan itu tidak dengan sendirinya dapat membuat mereka hidup aman karena setiap saat pun mereka harus siap digusur atau digaruk dengan alasan merusak keindahan kota atau mengganggu aliran sungai. Thukul merefleksikan penderitaan masyarakat kelas bawah itu dalam sajak-sajaknya, antara lain terlihat dalam "Nyanyian Akar Rumput" dan "Di Tanah Negeri ini Milikmu Cuma Tanah Air" berikut ini.

jalan raya dilebarkan  
kami terusir  
mendirikan kampung  
digusur  
kami pindah-pindah  
menempel di tembok-tembok  
dicabut  
terbuang

(AIJP, 6)

.....  
o tanah-tanah yang segera rata  
berubah menjadi pabrik-pabriknya

kita pun lalu kembali bergerak seperti jamur  
liar di pinggir-pinggir kali  
menjarah tanah-tanah kosong  
mencari tanah pemukiman di sini  
beranak cucu melahirkan anak-anak suku terasing  
yang akrab dengan peluh dan matahari

(AIJP, 75)

Masyarakat bawah yang sudah menjadi korban pembangunan dan tersingkir dari tempat tinggalnya pun, masih harus berhadapan dengan aparat pemerintah ketika hendak mendirikan bangunan atau tempat usaha baru, berupa surat izin mendirikan bangunan. Hal itu diperparah dengan perilaku aparat yang korup dan jadi pungli sehingga untuk mengurus surat-surat izin pun diperlukan dana yang tidak sedikit. Tidak mengherankan apabila banyak orang yang memilih hidup berpindah-pindah, menjadi orang asing di negerinya sendiri, seperti kritik Thukul dalam sajak "Sajak Kepada Bung Dadi" dan "Kepada Ibuku" berikut ini.

ini tanahmu juga  
rumah-rumah yang berdesakan  
manusia dan nestapa  
kampung halaman gadis-gadis muda  
buruh-buruh berangkat pagi pulang sore  
dengan gaji tak pantas  
kampung orang-orang kecil  
yang dibikin bingung  
oleh surat-surat izin dan kebijaksanaan  
dibikin tunduk mengangguk  
bungkuk

ini tanah airmu  
di sini kita bukan turis

(AIJP, 12)

II  
siapa boleh tinggal di tanah Ibu ini?  
tentu saja siapa yang sanggup membayar hukum  
dan membeli surat ijin dagang anakku  
lalu bagaimana dengan saudara-saudaraku yang tak mampu?  
ganpang nak, ikutlah kb jangan banyak anak, ini penting  
demi hidup masa depan sejahtera  
boleh pilih tinggal di tanah negara atau transmigrasi  
ke luar jawa atau  
silahkan jadi kere

(AIJP, 81)

Sebagai refleksi dari keadaan masyarakat yang melingkungi dunia penyair, sajak-sajak di atas telah memberi kesaksian pada derita kaum tertindas yang jeritannya hampir tidak pernah didengar oleh para penguasa dan pengambil keputusan. Wilayah-wilayah elit di kota-kota besar telah mencapai bentuk scrupa benteng-benteng pertahanan yang dilindungi tembok tinggi serta laskar-laskar pribadi yang membuktikan pertentangan kalangan miskin dan kaya dalam penguasaan tanah pemukiman. Pihak yang bermodal kuat "mengusir" penduduk miskin dari tempat tinggalnya. Di dekat tembok-tembok kawasan elit itulah mereka mendirikan gubuk-gubuk liar sebagai tempat tinggal dengan harapan dapat mengais remah-remah atau barang-barang bekas dari kawasan elit tersebut.

Pembangunan dibidang transportasi juga menyebabkan tergusurnya para penarik becak dari lapangan perekonomian mereka. Bus-bus kota dan kendaraan umum buatan pabrik sebagai sarana transportasi umum bertenaga mesin yang murah dengan cepat menggusur abang-abang becak dari jalanan sehingga kehidupan mereka makin terpuruk. Berbagai jenis alat transportasi dengan mudah masuk ke Indonesia dan dimiliki oleh kalangan kelas atas. Pemandangan di jalan-jalan pun menjadi ironis karena mobil-mobil buatan luar negeri sebagai simbol keberhasilan pembangunan transportasi dan simbol gengsi kaum borjuis bebas melaju, tetapi alat-alat transportasi tradisional yang juga menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat kelas bawah di perkotaan harus tersingkir ke pinggiran dan semakin sulit mendapat penumpang yang berakibat pula makin sulitnya mengais rezeki, seperti kritik Thukul dalam sajak "Kepada Ibuku", "Jalan", "Apa yang Berharga dari Puisiku" "Sajak Setumbu Nasi Sepanci Sayur" dan "Sajak Bapak Tua" berikut ini.

Ibu  
aku tidak punya data komplit tentang ketidakadilan  
hanya matakु terpukau di hingar bingar jalan raya aspalan  
kendaraan bikinan Jepang Itali Amerika laju  
tetapi abang-abang becak disingkirkan oleh kebijakan  
pembangunan

.....  
(AIJP, 80)

.....  
jalan kiri kanan dilebarkan  
becak-becak melompong di pinggiran  
*diliwati* bis sarat penumpang

(AIJP, 32)

Apa yang berharga dari puisiku  
Kalau bapak bertengkar dengan ibu  
Ibu menyalahkan bapak  
Padahal becak-becak terdesak oleh bis kota  
Kalau bis kota lebih murah siapa yang salah?

(AIJP, 43)

.....  
berjongkok di dapur  
angan terbuka seperti layar bioskop  
bising mesin  
bis kota merdeka berlaga di jalan raya  
becak-becak berpeluh melawan jalan raya

(AIJP, 30)

.....  
pipinya gosong disapu angina panas  
tenaganya dikuras  
di jalan raya siang tadi

sekarang bapak mendengkur

dan ketika bayangan esok pagi datang  
di dalam kepalaku  
bis tingkat itu tiba-tiba berubah

jadi ikan kakap raksasa  
becak-becak jadi ikan teri  
yang tak berdaya

(AIJP, 9)

Kasus penggusuran yang paling menghebohkan adalah penggusuran pemukiman penduduk Kedung Ombo. Kasus Kedung Ombo merupakan kasus yang paling menghebohkan dan menyita perhatian publik sampai tingkat internasional karena sarat dengan nuansa kekerasan. Berbagai elemen masyarakat, seperti LSM, LBH, mahasiswa, wartawan, dan rohaniawan bahu membahu membantu perjuangan rakyat Kedung Ombo yang dipaksa transmigrasi untuk mendapat hak-haknya. Kedung Ombo dipagar betis dan dinyatakan sebagai daerah tertutup oleh aparat keamanan. Penduduk yang terpaksa mau menerima ganti rugi tak layak pun masih mendapat perlakuan tidak adil dari aparat desa berupa pemotongan uang anti rugi. Penduduk yang menolak transmigrasi atau dipindahkan diintimidasi dengan kekerasan fisik dan mental berupa pemberian tanda ET/OT pada KTP dan cap komunis sehingga banyak penduduk yang ketakutan dan melarikan diri ke hutan atau menginap di kantor LBH. Bahkan, pemerintah tanpa belas kasihan menenggelamkan rumah-rumah penduduk yang tetap bertahan sehingga mengakibatkan lebih dari 10 orang penduduk ikut tenggelam. Mahasiswa bersama-sama berbagai elemen masyarakat membentuk KSKPKO, yaitu Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo yang gigih membela mereka melalui demonstrasi, advokasi, dan "pendudukan" wilayah yang mulai ditenggelamkan dan dinyatakan terlarang bersama-sama penduduk Kedung Ombo yang tetap bertahan. LSM pun bergerak di wilayah internasional dalam pertemuan INGI (*International NGO Forum*

on Indonesia) di Nieuwport, Belgia dengan mendesak Presiden Direktur Bank Dunia, Barber Conbel, sebagai sponsor pembangunan Kedung Ombo agar memperhatikan masalah pemukiman kembali secara paksa sekitar 5000 keluarga. Pemerintah RI akhirnya mendapat teguran dari Bank Dunia sehingga mengubah cara penanganannya meskipun tetap menyisakan banyak masalah menyangkut ganti rugi yang dinilai tetap tidak layak (Stanley, 1994: 445—451). Kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat itu tidak luput dari perhatian Thukul, seperti tampak dalam sajaknya yang berjudul "Ceritakanlah Ini Kepada Siapapun".

.....  
koran hari ini memberitakan  
Kedung Ombó menyusut kekeringan  
korban pembangunan dam  
muncul kembali ke permukaan  
tanah-tanah bengkak  
pohon-pohon besar melintang  
makam-makam bangkit dari ingatan

kali ini  
cerita itu siapa akan membantah  
dasar waduk ini dulu dusun rumah-rumah  
(AIJP, 16)

Tanah bagi masyarakat memiliki banyak makna, antara lain sebagai sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Secara budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, dan bermakna sakral karena berkaitan dengan masalah warisan (Nugroho, 2001: 206). Pada tingkat yang lebih tinggi, tanah juga memegang peran penting karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan mata pencaharian penduduknya

dari sistem pertanian. Akan tetapi, pentingnya tanah-tanah pertanian sebagai sumber mata pencaharian mayoritas penduduk dikalahkan oleh prioritas pembangunan industri. Tanah-tanah petani yang subur diubah menjadi kawasan industri dengan pabrik-pabrik yang hasilnya tidak membuat kaum tani menjadi makmur. Para petani yang terbiasa hidup dari sistem pertanian tiba-tiba tidak lagi memiliki tanah garapan dan dipaksa menjadi buruh pabrik. Nasib kaum tani tanpa tanah garapan itu juga menjadi pertanyaan Thukul. Kecemasan Thukul terhadap penguasaan tanah oleh segelintir orang serta pengalihan lahan-lahan pertanian untuk dijadikan pabrik dapat dilihat membuahkn kritik terhadap penguasa yang seharusnya memprioritaskan tanah sebagai lahan pertanian, bukan areal pabrik yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat kecil, antara lain dalam sajaknya yang berjudul "Tanah" berikut ini.

tanah mestinya dibagi-bagi  
jika cuma segelintir orang  
yang menguasai  
bagaimana hari esok kaum tani  
tanah mestinya ditanami  
sebab hidup tidak hanya hari ini  
jika sawah diratakan  
rimbun semak pohon diratakan  
apa yang kita harap  
dari cerobong asap besi

(AIJP, 36)

Penguasaan tanah khususnya, dan masalah tanah umumnya tidak hanya menyangkut kelangsungan hidup manusia secara umum, tetapi juga membuat anak-anak kehilangan tempat bermain. Kritik terhadap pesatnya pembangunan fisik di perkotaan yang menyebabkan anak-anak kehilangan tempat bermain diungkapkan dalam sajak "Sajak Anak-anak" dan "Kampung". Dalam sajak ini Thukul

mengkritik perubahan lahan kosong tempat bermain anak-anak menjadi gedung-gedung perumahan atau pabrik sehingga anak-anak kecil kehilangan tempat bermain. Anak-anak yang sedang tumbuh berkembang dan membutuhkan tempat untuk menyosialisasikan diri dan mengembangkan kreativitasnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan terpaksa harus bermain di jalan-jalan. Bermain di jalan-jalan tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi akan membahayakan keselamatan mereka sehingga Thukul memperingatkan para pelaku pembangunan agar memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut ketika mendirikan bangunan.

anak-anak kecil  
bermain di jalan-jalan  
kehilangan tanah lapang

pohon tumbang  
tembok didirikan  
kiri kanan menyempit  
anak-anak terhimpit

anak-anak itu anak-anak kita  
ingatlah ketika kau mendirikan rumah  
ingatlah ketika kau menancapkan  
pipa pabrik

anak-anak kecil berdesakan  
sepak bola di jalan-jalan  
bila jendela kacamu berantakan  
tengoklah anak-anak itu  
pandanglah pagar besimu  
sungguh luas halaman rumahmu

(AIJP, 56)

dan anak-anak terus lahir berdesakan  
tak mengerti rumahnya di pinggir selokan  
bermain di muka genangan sampah  
di belakang tembok-tembok

menyumpal gang-gang  
berputar dalam bayang-bayang  
mencari tanah lapang

(AIJP, 44)

Pembangunan juga telah menghapuskan kenangan banyak orang terhadap kotanya dengan menghilangnya bangunan-bangunan bersejarah dan bangunan-bangunan tradisional. Bangunan-bangunan bersejarah di pinggir-pinggir jalan yang strategis berubah menjadi bangunan-bangunan baru yang dianggap modern. Thukul melontarkan kritik terhadap masalah ini, antara lain dalam sajaknya "Jalan Slamet Riyadi Solo" dan "Jalan" berikut ini.

dulu kanan dan kiri jalan ini  
pohon-pohon asam besar melulu  
saban lebaran dengan teman sekampung  
jalan berombongan  
ke taman sriwedari nonton gajah

banyak yang berubah kini  
ada holland bakery  
ada diskotik ada taksi  
gajahnya juga sudah dipindah  
loteng-loteng arsitektur cina  
kepangkas jadi gedung tegak lurus  
....

(AIJP, 14)

aspal leleh tengah hari  
silau aku oleh sinar matahari  
gedung-gedung baru berdiri  
arsitektur lama satu-satu hilang  
dimakan pembangunan  
....

(AIJP, 32)

### 3.1.1.2 Pembangunan Menyengsarakan Kaum Buruh

Masalah perburuhan ikut mencuat dalam wacana ketidakadilan pembangunan karena salah satu korban pembangunan adalah para buruh. Digalakkannya sektor industri berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga buruh yang dipekerjakan di pabrik-pabrik. Salah satu ciri berkembangnya sektor ini adalah banyaknya wanita dan anak-anak yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi (Faruk, 2000:93). Kehadiran buruh perempuan pada hampir setiap sektor industri di perkotaan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari proses berubahnya negara Indonesia dari negara agraris menjadi negara industri. Thukul mengkritik menjamurnya pabrik di kota-kota sebagai realitas pembangunan dengan suatu ironi, yaitu diperlakukannya para buruh seperti barang atau benda melalui sajak “Kampung” dan “Lingkungan Kita Si Mulut Besar” berikut ini.

....  
lalu gadis-gadis umur belasan  
keluar kampung menuju pabrik  
bermata kusut keletihan  
menjalani hidup tanpa pilihan  
.... (AIJP, 44)

lingkungan kita si mulut besar  
dihuni lintah-lintah  
yang kenyang menghisap darah keringat tetangga  
dan anjing-anjing yang taat beribadah  
menyingkiri para penganggur  
yang mabuk minuman murahan

....  
perempuannya disetor  
ke mesin-mesin industri  
yang membayar murah

(AIJP, 19)

Proses industrialisasi di Indonesia tidak hanya menimbulkan masalah pelik menyangkut perburuhan perempuan, tetapi juga permasalahan tingkat kesejahteraan buruh. Perkembangan industri yang pesat akan selalu diikuti dengan meningkatnya jumlah buruh perempuan, tetapi tidak diikuti dengan laju perbaikan kehidupan buruh (Dewi, 1994: 193). Potret buram kehidupan buruh merupakan salah satu perwujudan bentuk kemiskinan yang masih luas. Fabel, Heinrich, dan Kroye (dalam Thamrin, 1994: 121) mencatat tingkat upah buruh dalam industri manufaktur di Indonesia adalah yang terendah di dunia. Ironisnya, hal itu dipromosikan di media masa asing oleh pemerintah Indonesia sebagai keunggulan komparatif untuk meraih investor asing.

Dampak aktivitas ekonomi yang melibatkan buruh perempuan itu adalah adanya kesengajaan menetapkan standar upah yang rendah. Buruh-buruh seringkali diperlakukan secara tidak adil oleh pihak perusahaan. Sangat banyak perusahaan yang belum memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum (Mardimin, 1996:121). Buruh di Indonesia merupakan buruh termurah di antara negara-negara lain. Sementara itu, kesejahteraan buruh tidak diperhatikan terbukti dengan jam kerja yang sangat panjang sehingga hampir tidak ada waktu istirahat, kecuali tidur malam, dan tidak adanya jaminan keselamatan kerja (Budiman, 1993: 350—351). Dengan gaji yang sangat minim, para buruh ini harus mampu membaginya untuk memenuhi kebutuhan hidup di kota yang tidak kecil di tambah lagi dengan biaya kesehatan. Kritik Thukul terhadap rendahnya upah para buruh ini terlihat, antara lain pada sajak “Catatan Malam”, “Sajak Kepada Bung Dadi”, dan “Suti” berikut ini.

....  
pikiranku mengawang  
membayang pernikahan  
(pacarku buruh  
harganya tak lebih  
dua ratus rupiah perjam)

(AIJP, 5)

....  
manusia dan nestapa  
kampung halaman gadis-gadis muda  
buruh-buruh berangkat pagi pulang sore  
dengan gaji tak pantas

(AIJP,12)

....  
Suti kusut masai  
di benaknya menggelegar suara mesin  
kuyu matanya membayangkan  
buruh-buruh yang berangkat pagi  
pulang petang  
hidup pas-pasan  
gaji kurang  
dicekik kebutuhan

(AIJP, 40)

Kritik terhadap masalah perburuhan yang banyak dikemukakan Thukul terutama menyangkut buruh perempuan. Para buruh perempuan dipekerjakan secara tidak manusiawi. Upah buruh yang terdiri dari uang lembur, uang makan, dan transport dalam hitungan seringkali dilakukan secara tidak jujur semata-mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pihak perusahaan (Dewi, 1994: 191). Fasilitas kerja tidak diperhatikan sehingga buruh harus berdiri sepanjang hari menyebabkan gangguan fisik dan stress yang makin lama makin serius. Keamanan dan keselamatan kerja tidak pernah terpikir oleh pihak perusahaan. Mereka diperas

tenaganya, dibayar murah, dan tidak diperhatikan keselamatan kerjanya sehingga para buruh kerap mengalami gangguan kesehatan, seperti sakit punggung, mata pedas, kesemutan, sesak nafas, telinga berdengung, dan gatal-gatal. Hal itu bisa pula karena kurang gizi akibat upah yang rendah sehingga tidak mencukupi untuk menunjang kehidupan yang layak (Dewi, 1994: 191—192). Meskipun mereka sudah bekerja keras, upah mereka tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk biaya pengobatan ketika sakit. Kritik tentang kehidupan dan nasib para buruh perempuan dapat disimak dalam sajak “Suti” berikut ini.

Suti tidak pergi kerja  
pucat ia duduk dekat *ambemya*  
Suti di rumah saja  
tidak ke pabrik tidak ke mana-mana  
Suti tidak ke rumah sakit  
batuknya memburu  
dahaknya berdarah  
tak ada biaya

Suti kusut masai  
di benaknya menggelegar suara mesin  
kuyu matanya membayangkan  
buruh-buruh yang berangkat pagi  
pulang petang  
hidup pas-pasan  
guji kurang  
dicekik kebutuhan

Suti meraba wajahnya sendiri  
tubuhnya makin susut saja  
makin kurus menonjol tulang pipinya  
loyo tenaganya  
bertahun-tahun dihisap kerja

Suti batuk lagi  
ia ingat kawannya  
Sri yang mati  
karena rusak paru-parunya

Suti meludah  
dan lagi-lagi darah

Suti memejamkan mata  
suara mesin kembali menggemuruh  
bayangan kawannya bermunculan  
Suti menggelengkan kepala  
tahu mereka dibayar murah

Suti meludah  
dan lagi-lagi darah

Suti merenungi resep dokter  
tak ada uang  
tak ada obat

(AIJP, 40)

Kecadaan yang memprihatinkan itu masih ditambah lagi dengan perlakuan buruk pemilik perusahaan yang selalu curiga pada buruhnya. Seringkali terjadi kasus penganiayaan terhadap buruh atau PHK secara sepihak karena buruh dianggap mencuri barang milik pabrik. Para buruh perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau melawan perlakuan buruk yang diterimanya. Gambaran tentang buruh perempuan yang sudah dieksploitasi tenaganya, tetapi masih diperlakukan tidak senonoh terdapat dalam sosok Warsini dalam "Ayolah Warsini".

Warsini Warsini  
apa kamu sudah pulang Warsini  
apa kamu tidak letih  
seharian di pabrik Warsini  
ini sudah malam Warsini  
apa celana dan kutangmu digeledah lagi  
karena majikanmu curiga  
kamu menyelipkan moto  
ini malam Minggu Warsini  
berapa utangmu minggu ini  
apa kamu bingung hendak membagi gaji

(AIJP, 53)

### 3.1.1.3 Pembangunan Menciptakan Kemiskinan

Dalam 25 tahun pertama pembangunan di Indonesia memang menghasilkan bangunan-bangunan fisik yang menakjubkan, tetapi ternyata banyak pengorbanan atau *social cost* yang harus dibayar, berupa meningkatnya jumlah penduduk miskin yang mencapai lebih dari 120 juta. Pengeluaran perhari tiap orang tidak lebih dari Rp 1000,- termasuk PNS, militer, buruh, dan pengangguran yang hidup tidak layak (Pamungkas, 1994: 49). Dengan kata lain, bahwa pembangunan yang gencar dilaksanakan rezim Orde baru justru telah memperluas kemiskinan.

Kemiskinan yang tercipta karena pembangunan adalah sebuah ironi karena pembangunan pada dasarnya bercita-cita luhur untuk memerdekakan dan menyejahterakan manusia. Kemiskinan tidak hanya berurusan dengan masalah ekonomi, tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan budaya dan politik. Kemiskinan berdimensi ekonomi atau material adalah dalam bentuk kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kemiskinan berdimensi sosial budaya berwujud berkembangnya nilai-nilai apolitis, apatis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Kemiskinan berdimensi struktural terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial yang paling bawah (Nugroho, 1995, 1994: 31—32).

Secara ekonomi, kemiskinan menggambarkan keadaan rumah tangga atau penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup tertentu (Nasution, 1994: 100). Konsep kemiskinan yang dianut secara resmi di Indonesia adalah mengacu

pada kemampuan penduduk dalam memenuhi tingkat kehidupan tertentu (Nasution, 1994: 109). Kemiskinan adalah kondisi kekurangan yang dialami seseorang atau sebuah keluarga. Raharjo (1994: 146—147) mengemukakan sebab-sebab yang menimbulkan kemiskinan yaitu kesempatan kerja yang tidak tersedia, upah yang di bawah standar, produktivitas kerja yang rendah, ketiadaan aset atau modal dasar, diskriminasi antara pekerja perempuan dengan laki-laki, tekanan harga dengan tata niaga dan berbagai bentuk penipuan, dan perampasan atau penjualan tanah pertanian.

Istilah kemiskinan ini tidak hanya dipahami atau digunakan secara statis, yaitu untuk menunjuk suatu keadaan atau realitas objektif yang dapat dihitung dengan angka karena kemiskinan yang ada di Indonesia sesungguhnya lebih tepat bila dibicarakan dalam pengertian pemiskinan. Pemiskinan menekankan adanya sebuah proses, yaitu ada yang menjadi subjek dan ada yang menjadi objek (Heryanto, 1996:144).

Hak berpartisipasi dalam pembangunan seharusnya berada di tangan setiap warga negara tanpa melihat golongan dan aliran politiknya (Pamungkas, 1994: 58), tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat hanya dijadikan sebagai objek penderita. Thukul juga menangkap gejala tersebut. Ia melihat bahwa dalam proses pembangunan, rakyat hanya dijadikan sebagai penonton atau sebagai objek seperti tampak dalam sajak “Batas Panggung: Kepada Para Pelaku” dan “Sajak Kota” berikut ini”.

mi daerah kekuasaan kami  
jangan lewati batas itu  
jangan campuri apa yang terjadi di sini  
karena kalian penonton  
kalian adalah orang luar

jangan rubah cerita yang kami susuni  
jangan belokan jalan cerita yang telah  
kami rencanakan

.....  
biarkan kami menjalankan kekuasaan kami  
tontonlah  
tempatmu di situ

(AIJP, 15)

kota macam apa yang kita bangun  
mimpi siapa yang ditanam  
di benak rakyat  
siapa merencanakan

lampu  
lampu  
menyibak jalan raya  
jalan raya dilicinkan  
diaspal oleh uang rakyat  
motor-motor mulus meluncur  
*merck-merck* iklan  
*merck-merck* iklan  
di atap gedung  
menyala  
berjejer-jejer  
took roti  
tako sepatu  
berjejer-jejer  
salon-salon kecantikan  
siapa rencanakan  
nasib rakyat?

(AIJP, 27)

Kemiskinan yang ada dalam masyarakat, menurut Thukul, disebabkan oleh pemiskinan yang dilakukan oleh penguasa melalui ironi slogan-slogan pembangunan atau apa yang dikenal sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural lebih menunjukkan pada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakat yang timpang, tidak berpihak kepada golongan

yang lemah. Mereka tetap miskin meskipun sudah berusaha bekerja keras setiap hari (Sunarso dan J. Mardimin, 1996:24), seperti antara lain nampak dalam sajaknya yang berjudul "Balada Pak Bejo" dan "Kepada Ibuku" berikut ini.

Pak Bejo membentak bininya  
hari ini sepi  
mbok Bejo tak mau kalah  
anak-anak minta baju seragam  
Pak Bejo juga  
aku sudah keliling kota  
aku sudah kerja keras  
tapi kalah dengan bus kota  
hari ini aku cuma dapat uang setoran

(AIJP, 48)

Ibu  
di dadamu subur aku melihat lading-ladang tebu  
tetapi petani ditipu pabrik gula  
dan Jakarta seperti paris penuh Honda Suzuki mercy jimny  
udara kotor jalan macet  
tetapi mengapa abang-abang becak disingkirkan  
oleh kebijaksanaan pembangunan?  
mali-gah dibunuh mati koruptor korupsi hidup aman sentosa  
sehat wal afiat seperti sedia kala  
dan radio kita semakin rajin warta berita:  
pembangunan di Indonesia berkembang pesat dan jauh  
dibandingkan ketika kami berkunjung kemari tahun lalu,  
demikian menurut menteri luar negeri Anu

(AIJP, 80)

Kritik terhadap pemiskinan ini juga nampak dalam sajak-sajaknya yang berjudul "Suara dari Rumah Miring", "Sajak Bapak Tua", "Gumam Sehari-hari", "Kuburan Purwoloyo", "Pemandangan", "Sajak Setumbu Nasi Sepanci Sayur", dan "Nyanyian Abang Becak". Dalam sajak "Nyanyian Abang Becak" Thukul

mengkritik pembangunan yang tidak berpihak kepada golongan miskin sehingga yang miskin justru bertambah miskin, seperti berikut.

jika harga minyak *mundhak simbok*  
semakin *ajeg*  
berkelahi sama bapak  
harga minyak *mundhak lombok-lombok*  
akan *mundhak*  
sandang pangan akan *mundhak*  
maka terpaksa tukang-tukang *lebon*  
lintah darat bank *plecit* tukang kredit  
harus dilayani

.....  
siapa tidak marah bila kebutuhan hidup semakin mendesak, seribu lima ratus uang belanja tertinggi dari bapak untuk *simbok*, siapa bisa mencukupi sedangkan kebutuhan hidup semakin mendesak  
maka *simbok mencak-mencak*  
"pak-pak anak kita *kebacut metu papat* lho!  
bayaran sekolah anak-anak nunggak lho!  
Si Penceng muntah *ngising*, perutku malah sudah *isi* lagi dan suk Selasa Pon *ana* sumbangan *maneh*  
Si Seblok *dadi mantan!*"  
jika bbm naik masih disebut langkah-langkah  
kebijaksanaan  
maka aku tidak akan lagi memohon pembangunan  
nasib  
kepadaMu duh Pangeran Gusti  
sebab nasib adalah permainan kekuasaan

(AIJP, 31)

Sajak di atas mengungkap kemiskinan sebuah keluarga tukang becak. Dengan penghasilan yang semakin kecil akibat lahan mencari nafkahnya tergusur dengan hadirnya sarana angkutan masal yang murah, keluarga ini terpaksa menyandarkan hidupnya pada tukang kredit dan bank *plecit* untuk menyambung hidup. Menyandarkan hidup pada bank *plecit* tidak membuat keluarga itu dapat terbebas

dari kemiskinan karena kebutuhan yang terus meningkat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk kehidupan sosial berupa sumbangan.

Kemiskinan telah memaksa orang untuk melakukan apa saja atau menyantap apa saja demi menghilangkan rasa lapar. Dalam sajak "Catatan Suram" dan "Gumam Sehari-hari". Dalam "Catatan Suram", Thukul mengkritik kemiskinan dengan mengungkapkan orang-orang yang demi memenuhi kebutuhan pangannya terpaksa memburu dan membunuh seekor kucing sebagai santapan. Dalam "Gumam Sehari-hari" diungkapkan tentang ketiadaan daya beli sehingga demi menyambung hidup mereka terpaksa membeli sisa-sisa atau remah-remahnya.

kucing hitam jalan pelan  
meloncat turun dari atap  
tiga orang muncul dalam gelap  
sembunyi menggenggam besi

kucing hitam jalan pelan-pelan  
dikuti bayang-bayang  
ketika sampai di mulut gang  
tiga orang menggeram  
melepaskan pukulan

bulan disaput awan meremang  
saksikan perayaan kemiskinan  
daging kucing pindah  
ke perut orang!

(AIJP, 22)

di ujung sana ada pabrik roti  
kami beli yang remah-remah  
karena murah  
di ujung sana ada tempat  
penyembelihan sapi  
dan kami kebagian bau

kotoran air selokan dan tai  
di ujung sana ada perusahaan  
daging abon  
setiap pagi kami beli kuahnya  
dimasak campur sayur

(AIJP, 23)

Kritik terhadap kemiskinan juga dilontarkan menyangkut pemiskinan dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa papan atau tempat tinggal. Masyarakat bawah di perkotaan yang tergusur dari lahan-lahan tempat tinggal mereka terpaksa mendirikan tempat-tempat tinggal di daerah pinggiran yang tidak layak sebagai tempat tinggal dan membentuk *slum area*. Kritik terhadap masalah kemiskinan atau pemiskinan dalam hal ketiadaan tempat tinggal yang layak, antara lain dapat dilihat pada sajak "Suara-suara dari Rumah Miring" berikut ini.

di sini kamu bisa menikmati cicit tikus  
di dalam rumah miring ini  
kami mencium bau selokan dan sampah  
bagi kami setiap hari adalah kebisingan  
di sini kami berdesak-desakan dan berkeringat  
bersama tumpukan gombal-gombal  
dan piring-piring  
di sini kami bersetubuh dan melahirkan  
anak-anak kami

di dalam rumah miring ini  
kami melihat matahari menyelinap  
dari atap ke atap  
meloncati selokan  
seperti pencuri

(AIJP, 4)

Kritik terhadap kemiskinan dapat dilihat juga dalam sajak-sajak lainnya, seperti "Hujan", "Pasar Malam Sri Wedari", "Gentong Kosong", "Catatan 10 Januari

1989, Siang”, “Jam Dua Malam Dingin Sampai Ke Tulang”, “Kampung”, “Dalam Kamar 6 x 7 Meter”, “Kepada Nasri dan Adikku yang Lain”, dan “Apa yang Berharga dari Puisiku”. Selain “Pasar Malam Sriwedari” dan “apa yang Berharga dari Puisiku”, sajak-sajak itu pada umumnya mengkritik rezim Orde Baru dengan menceritakan kehidupan orang-orang di perkampungan kumuh dengan pendapatan yang sangat rendah.

#### **3.1.1.4 Pembangunan Menciptakan *Gap* Sosial**

Kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan berbagai terminologi lain serta perwujudannya merupakan dua sisi mata uang dalam konteks perekonomian dan pembangunan. Ketidakmerataan pembagian hasil-hasil pembangunan dapat dengan mudah dilihat dari segi pendapatan, yang paling banyak adalah golongan bawah yang lemah dan petani miskin. Berbagai macam fasilitas umum, seperti jalan raya super market, pusat-pusat perdagangan, tempat-tempat rekreasi terbuka bagi siapa saja sebagai tempat publik yang dapat dikonsumsi secara kolektif. Akan tetapi, tempat-tempat tersebut dibangun bukan untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan hidup kelas bawah karena masyarakat bawah tidak memiliki daya beli sehingga mereka tidak dapat ikut memanfaatkan, apalagi menikmati. Bangunan-bangunan sederhana diubah menjadi bangunan-bangunan modern. Pasar-pasar tradisional tersingkir ke tempat-tempat yang tidak strategis, sedangkan tempat-tempat yang menarik dijadikan tempat pembangunan pasar-pasar modern. Dengan sendirinya pedagang kecil tergusur oleh pedagang besar (Raharjo, 1994:50). Di kota-kota besar, pemandangan yang timpang itu menjadi hal yang sangat lazim.

Masalah kesenjangan sosial tidak luput dari perhatian dan kritik Thukul. Kesenjangan sosial timbul karena pembangunan yang hanya memihak kepada segelintir orang atau kaum elit sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Rakyat kecil hanya mampu berdiri di pinggir dan menonton proses pembangunan yang tak pernah menjangkau mereka. Strategi *trickle-down effect* yang diterapkan pemerintah ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana dan harapan karena yang terjadi ternyata adalah terciptanya konglomerasi di lingkaran kekuasaan. Pelaku ekonomi yang diberi berbagai fasilitas kemudahan dengan harapan dapat memberikan tetesan ke bawah tidak memenuhi harapan tersebut.

Dalam sajak "Nonton Harga" Thukul mengkritik ketimpangan akibat pembangunan yang tidak merata dan tidak berpihak pada kaum miskin dengan mengkontraskan suatu pemandangan di perkotaan antara kemakmuran di satu sisi dengan kemiskinan di sisi yang lain. Di kota-kota besar bangunan-bangunan modern terus dibangun memamerkan suatu pemandangan yang sekilas nampak sebagai wujud pencapaian kemakmuran dengan seremonial yang dihadiri pejabat tinggi. Mobil-mobil sebagai simbol kemewahan digambarkan sangat banyak jumlahnya, menggambarkan kondisi kota yang kian kaya dan megah. Akan tetapi, suatu pemandangan yang bertolak belakang segera dijumpai di lingkungan masyarakat bawah. hotel berbintang lima dioposisikan dengan rumah kontrak yang sangat kecil sehingga untuk tidur pun harus berderet-deret supaya tidak memakan tempat. Mobil-mobil pribadi yang begitu banyak dikontraskan pula dengan kendaraan umum yang sulit di dapat sehingga "kita" harus bergegas supaya dapat menemukan, seperti pada kutipan di bawah ini.

.....  
ayo kita keliling kota  
hari ini ada peresmian hotel baru  
berbintang lima  
dibuka pejabat tinggi  
dihadiri artis-artis ternama dari ibukota  
lihat  
mobil para tamu berderet-deret  
satu kilometer panjangnya  
kota kita memang makin megah dan kaya  
tapi hari sudah malam  
ayo kita pulang  
ke rumah kontrakan  
sebelum kehabisan kendaraan  
ayo kita pulang  
ke rumah kontrakan  
tidur berderet-deret seperti ikan tangkapan  
.....

(AIJP, 127)

Dalam "Gumaman Sehari-hari" Thukul juga mengkritik perubahan yang terjadi di kota-kota dengan berdirinya toko-toko baru dan berbagai macam bangunan menggantikan bangunan-bangunan lama di tempat-tempat yang strategis, yakni di pinggir-pinggir jalan. Pemandangan kota pun sekilas nampak berubah menjadi modern dan megah. Akan tetapi, di belakang gedung-gedung yang megah itu berdiri kampung-kampung kumuh tempat tinggal mereka yang harus tersingkir dan berkorban demi pembangunan. Kesenjangan sosial itu nampak dari kontrasnya antara bangunan-bangunan baru dengan perkampungan kumuh di belakangnya. Sajak ini mengkritik proses pembangunan yang telah menciptakan jarak sosial di antara sesama warga negara yang mestinya juga dapat bersama-sama menikmati hasil-hasil pembangunan. Pada kenyataannya, ada pihak yang "berdiri megah" dan pihak lain harus tersingkir, seperti nampak pada sajak "Gumaman Sehari-hari" berikut.

....  
di pinggir jalan  
berdiri took-toko baru  
dan macam-macam bangunan  
kampung kami di belakangnya  
riuh dan berjubel  
seperti kutu kere kumal  
terus berbiak!  
membengkak tak tercegah!

(AIJP, 23)

Meskipun secara fisik mereka dekat, tetapi secara ekonomi ada jurang menganga yang memisahkan si kaya dengan si miskin, yakni ketiadaan daya beli masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, meskipun pertokoan baru bermunculan dan berdiri megah, masyarakat kelas bawah tetap tidak dapat menikmati berbagai barang yang ditawarkan di dalamnya. Rakyat bawah hanya dapat menonton megahnya pertokoan tanpa mampu menjangkaunya. *Aku* sebagai representasi masyarakat kelas bawah dalam sajak "Catatan" merasa asing dengan kemodernan pertokoan di kotanya. Kesenjangan sosial dalam sajak ini sangat mencolok dengan dikontraskannya gambaran kemegahan atau kemakmuran dengan kemelaratan. Sandal jepit sebagai simbol rakyat kecil atau kalangan tidak mampu dikontraskan dengan ubin yang mengkilat sebagai lambang kekayaan. *Aku* tidak hanya asing dengan udara ac, tetapi juga harus menahan diri untuk tidak membeli. Buku yang ditawarkan di toko itu menjadi barang mewah karena uang yang sedikit pun lebih berguna untuk menyambung hidup keluarganya. Thukul merfleksikan dan mengkritik kesenjangan antara gemerlapnya took-toko dengan kekumuhan di perkampungan miskin sebagai dua dunia yang tidak mungkin dapat bertemu.

....  
udara ac asing di tubuhku  
....

musik stereo mengitariku  
penjaga stand cantik-cantik  
sandal jepit dan ubin mengkilat  
betapa jauh jarak kami

uang sepuluh ribu di sakuku  
di sini hanya dapat 2 buku  
untuk keluargaku cukup buat makan seminggu

gemerlap toko-toko di kota  
dan kumuh kampungku  
dua dunia yang tak pernah bertemu

(AIJP, 7)

Dalam "Kota Ini Milik Kalian", Thukul melontarkan kritik terhadap terciptanya *gap* sosial dengan menempatkan diri sebagai 'si pemilik' yang berhadapan dengan "si penonton". Pembalikan posisi ini secara langsung menunjukkan pandangan Thukul terhadap penguasa sebagai pengambil keputusan dalam proses pembangunan. Dengan mengambil posisi sebagai 'si pemilik' atau pelaku, Thukul mengkritik pembangunan yang tidak menyentuh kalangan bawah. Kalangan bawah hanya diberi remah-remah dan kesempatan menikmati fasilitas publik untuk dapat dikonsumsi secara kolektif yang dengan sendirinya memperlihatkan bagaimana kaum tertindas ini diposisikan atau diperlakukan dalam proses pembangunan. Secara harafiah, masyarakat kelas bawah memang memiliki kota karena tinggal di kota, tetapi mereka tidak memiliki isinya, tidak dapat memiliki bangunan-bangunan megah di dalamnya. 'Si pemilik' yang sebenarnya dari kemegahan dan kekayaan kota sendiri tidak peduli dengan kehidupan masyarakat bawah.

di belakang gedung-gedung tinggi  
kalian boleh tinggal  
kalian bebas tidur di mana kapan saja

....  
apa belum cukup terang benderang itu lampu merkuri taman  
apa belum cukup nyaman tidur di bawah langit kawan  
kota ini milik kalian  
kecuali gedung-gedung tembok pagar besi itu jangan

(AIJP, 77)

### 3.1.2 Kritik Terhadap Militerisme

Militer dan militerisme seringkali dianggap sama, meskipun sesungguhnya berbeda. Militer sebagai aparatur negara diperlukan di setiap negara yang berdaulat. Keberadaan militer bertujuan menjaga pertahanan teritori dari serangan luar. Akan tetapi, di berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, militer telah berkembang menjadi militerisme. Keinginan berbagai elemen masyarakat untuk mengakhiri militerisme di Indonesia tidak berarti memusuhi atau membubarkan kekuatan militer sebagai aparatur negara (Heryanto, 2000:246).

Michael Mann (dalam Heryanto, 2000:249) mengatakan bahwa militerisme adalah seperangkat sikap dan praktek sosial yang didasarkan pada anggapan bahwa "peperangan" dengan segala persiapannya sebagai sesuatu yang normal dan menggarahkan. Militerisme tidak sama dengan pemerintah yang dipimpin oleh perwira militer, tetapi sebuah gejala sosial dan kejiwaan yang dapat terjadi di negara yang dipimpin oleh warga sipil sekalipun. Militerisme adalah suatu perilaku yang memandang dunia sebagai suatu medan "peperangan" dengan prinsip paling utama adalah menyerang atau diserang, menguasai atau dikuasai. Budaya militerisme ditandai oleh rasa takut yang memasyarakat dan simbol kekerasan serta kekuasaan

(kejantanan) ditonjolkan (Heryanto, 2000:250). Kehadiran militer tidak secara otomatis merupakan perwujudan militerisme (Heryanto, 2000:249).

Dalam militerisme, badan-badan dan individu militer sibuk dalam dua hal, yaitu (1) mengurus kehidupan sosial politik mulai dari pendidikan, kebudayaan, kesenian, dan (2) dalam menjalankan berbagai kegiatan non militer itu, mereka tak segan-segan menggunakan cara dan kekuatan militer mulai dari lengan berotot, alat-alat dan teknologi membunuh, penyiksaan, penculikan, teror, dan pengerahan masa. Mereka menguasai dinas intelijen, pasukan tempur, dan persenjataan. Militerisme juga tidak hanya berarti penguasaan jabatan birokrasi pada badan-badan non militer, militerisme telah berkembang dalam bentuk kebudayaan, norma, angan-angan, cara berpikir, bergaul, dan berbicara. Semua itu bercirikan kejantanan, kekerasan, dan sikap kaku mempertentangkan realitas hidup menjadi dua bagian, yakni kawan—lawan atau kalah—menang (Heryanto, 2000:247).

Rezim Orde Baru yang kebetulan dipimpin oleh seorang mantan perwira tinggi militer telah memposisikan tentara sebagai unsur yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem praktek penyelenggaraan pemerintahan yang "korporatik", militer pada masa Orde Baru menjadi bagian inti dari kekuasaan (Prasetyo, 2001:125). Militer dijadikan sebagai tameng kekuasaan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, militer mendominasi kehidupan politik (Sulasmono, 1997:79). Oleh karena itu, militer menjadi kekuatan yang hegemonik, menjadi kekuatan yang mendominasi secara sosial, menjadi kekuatan pengendali, dan pengawal pembangunan (Prasetyo, 2001:125). Tentara dalam negara integralistik seperti Indonesia menempatkan tugas

utamanya pada kekuasaan sebagai penyatu struktur, tidak peduli bagaimana cara struktur itu ditegakan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengabsahan dalam melakukan tindak-tindak represif, militer menghidupkan kembali tiga wacana utama, yaitu bangkitnya ajaran komunis, Islam fundamentalis, dan kelompok separatis (Prasetyo, 2001:127). Ketiga wacana itulah yang selalu didengung-dengungkan dan dijadikan sebagai stigma bagi para aktivis, pengamat politik, dan anggota masyarakat lainnya yang melakukan perlawanan atau bersuara kritis terhadap pemerintah. Cap komunis, fundamentalis, dan separatis setiap saat dijadikan alat untuk menjerat para aktivis dan “pembangkang” dengan pasal karet yang bernama Undang-undang subversif. Masalah militerisme yang banyak dikritik oleh Thukul adalah kekerasan dan penyeragaman.

#### **3.1.2.1 Kekerasan dan Teror**

Kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, yakni perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dapat berarti pula pemaksaan (KBBI, 1994:485) Kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Orde Baru. Dengan kekerasan itulah aparat militer dan kepolisian yang berdiri di belakang penguasa sebagai penopang “menertibkan” dan “mendisiplinkan” orang-orang atau kelompok masyarakat yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Berbagai penyelesaian masalah yang terjadi antara rakyat dengan negara hampir selalu berakhir dengan kekerasan dan tetesan darah. Aparat militer dan kepolisian yang menguasai alat-alat pembunuh dan berbagai jenis persenjataan tidak segan-

segera menggunakan persenjataan itu untuk menghadapi masyarakat yang dianggap membangkang.

Dalam kasus pembangunan dam Kedung Ombo yang memaksa masyarakat desa yang tergusur secara tidak adil melakukan perlawanan, aparat militer dan kepolisian menunjukkan aksi kekerasan untuk menghadapi mereka. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Kedung Ombo, aparat menggunakan pola penyiksaan intimidasi, teror, cap PKI, pemaksaan cap jempol persetujuan ganti rugi, tamparan, jambakan, pukulan, tendangan, ancaman akan di “petrus”kan, dan penggenangan paksa areal pemukiman (Prasetyo, 2001: 137). Masalah yang sangat menarik perhatian media masa dan masyarakat luas itu juga tidak luput dari kritikan Thukul. Dalam sajak “Ceritakanlah ini Kepada Siapa pun” Thukul mengkritik aparat bersenjata yang menjadi penopang kekuasaan yang tidak adil. Dalam pelaksanaan “melindungi” dan “mengamankan” keputusan penguasa, aparat bersenjata melakukan kekerasan fisik berupa tendangan atau injakan menggunakan kaki /sepatu di atas kepalamu/di atas kepala kita/ dan senjata pun ditodongkan kepada para pengunjuk rasa.

....  
waktu juga yang menyingkap  
retorika penguasa  
walau senjata ditodongkan kepadamu  
walau sepatu di atas kepalamu  
di atas kepalaku  
di atas kepala kita

ceritakanlah ini kepada siapa pun  
sebab cerita ini belum tamat

(AIJP.16)

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer dan kepolisian tidak jarang membuat seseorang menderita cacat fisik. Senjata yang dimiliki oleh aparat, selama rezim Orde Baru berkuasa, lebih banyak digunakan untuk melukai rakyatnya sendiri yang tidak sejalan atau setuju dengan kebijakan penguasa. Thukul mengkritik perilaku ini melalui sajak "Tetangga Sebelahku" yang merefleksikan akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan senjata. Penggunaan senjata untuk melukai seseorang tidak saja menyebabkan kerusakan atau cacat fisik, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Orang yang telah mengalami kekerasan itu selalu merasa tidak aman atau terancam jiwanya, meskipun berada di rumahnya sendiri. Cara-cara kekerasan yang selalu ditunjukkan oleh penguasa telah menjadi teror bagi rakyatnya.

....  
kuping sebelahnya rusak  
dipopor senapan

tetangga sebelahku  
hidup bagai dalam benteng  
melongok-longok selalu  
membaca bahaya

tetangga sebelahku  
diteror masa lalu

(AIJP, 17)

Militer yang semula ditunjukkan dalam rangka tugas-tugas pengamanan beralih menjadi mesin penindasan gerakan rakyat yang berusaha menjalankan kontrol pada negara (Prasetyo, 2001; 171). Bahkan, dalam berbagai kasus membuktikan bagaimana tentara secara sistematis melakukan penyiksaan terhadap

siapapun yang dianggap musuh negara (Prasetyo, 2001: 135). Sejak kekuasaan Soeharto dimulai, militer menjadi kelompok strategis yang dapat mendefinisikan sendiri tujuan dan mengendalikan semua arus kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap itu seringkali bertabrakan dengan kepentingan politik kelompok lain dan gerakan-gerakan pro demokrasi (Prasetyo, 2001: 134). Penggunaan alat-alat persenjataan untuk menakuti atau meneror rakyat seringkali berlebihan. Hal itu disebabkan pilihan penguasa untuk menggunakan cara-cara kekerasan setiap kali menghadapi masalah. Dalam "Sajak Suara" Thukul mengkritik cara penguasa menghadapi kritikan dari masyarakatnya sendiri. Thukul menganggap bahwa suara kritis, suara-suara ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa, suara-suara yang mencoba menuntut keadilan hanyalah suara yang perlu didengarkan. Masyarakat yang selama proses pembangunan hanya dijadikan objek dan pelengkap penderita berhak untuk berbicara ketika rasa keadilannya terlukai. Akan tetapi, penguasa yang merasa ketakutan, menghadapi suara-suara itu dengan senjata yang siap ditembakkan.

....  
sesungguhnya suara itu bukan perampok  
yang ingin merayah hartamu  
ia ingin bicara  
mengapa kaukokang senjata  
dan gemetar ketika suara-suara itu  
menuntut keadilan?

....  
(AIJP, 58)

Untuk menjaga stabilitas nasional agar proses pembangunan berjalan lancar, penguasa melalui aparat militernya tidak lagi menghormati hak asasi manusia.

Ketakutan penguasa terhadap sikap kritis dan perlawanan rakyat semakin mengentalkan sikap represif penguasa yang tidak segan-segan menghadapinya seperti menghadapi tikus atau hama pengganggu. Wajah kekuasaan yang ditunjukkan rezim Orde baru adalah wajah kejam. Thukul mengkritik perilaku kekerasan yang lebih kejam dalam sajaknya yang berjudul "Tikus". Dalam sajak itu, wajah bengis kekuasaan digambarkan lebih menakutkan daripada harimau si raja hutan. Penguasa tidak menghargai harkat dan martabat manusia karena memperlakukan manusia hanya sebagai seekor tikus yang dapat dilindas, diburu, digebuk, dan ditembak kemudian dibiarkan tergeletak di jalanan. Kritik Thukul itu bukan suatu hal yang mengada-ada karena sepanjang rezim Orde Baru berkuasa tidak terhitung banyaknya pelanggaran HAM dalam bentuk penafikan terhadap harkat kemanusiaan seseorang yang berani berseberangan dengan penguasa. Demi tercapainya stabilitas politik, pemerintah menciptakan sentralisasi kekuasaan dengan pengucilan politik yang ditopang oleh penggunaan aparat represif Komkamtib/Bakorstanas dan Intelijen. Pengucilan politik itu terlembaga dalam bentuk depolitisasi lembaga-lembaga pemerintah, pers, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pengintroduksian sistem "masa mengambang" di pedesaan (Sulasmono, 1997:79). Protes-protes atau demonstrasi di luar institusi dianggap tidak benar dan illegal serta dituduh anti pembangunan dan subversif (Budiman, 1996:87). Melalui tangan-tangan jaksa, penguasa juga tidak segan-segan menyeret seseorang dan mendudukannya sebagai terdakwa hanya karena masuk dalam sebuah organisasi atau berani mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan penguasa. Wajah kekuasaan menjadi sangat mengerikan karena tidak hanya meneror, tetapi juga memperlakukan manusia seperti

memperlakukan binatang. Kekejaman yang dilakukan aparat telah melampau batas-batas rasa kemanusiaan, seperti terlihat pada kutipan di bawah ini.

....  
kekuasaan sering jauh lebih ganas  
ketimbang harimau hutan yang buas  
korbannya berjatuhan  
seperti tikus-tikus  
kadang tak terkubur  
tak tercatat  
seperti tikus  
dilindas  
kendaraan lewat

siapa suka harkat manusia  
senilai tikus  
diburu  
dgebuk  
ditembak  
seperti tikus

siapa mau  
disamakan dengan tikus  
didudukkan  
di kursi terdakwa  
dituding tuan jaksa  
ingin menggulingkan negara  
hanya karena berorganisasi  
dan punya lain pendapat

(AJP, 131)

Penculikan dan penyiksaan merupakan wujud kekerasan fisik yang juga sering digunakan oleh penguasa untuk menyelesaikan masalah. Untuk membungkam para aktivis atau orang-orang yang dianggap "berbahaya" militer tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, penculikan, bahkan penghilangan orang. Selama Rezim Orde Baru berkuasa ada tiga kasus penghilangan orang secara paksa yang

menonjol, yaitu (1) korban penculikan aktivis tahun 1998, (2) penculikan petani dan buruh, dan (3) penculikan di Aceh dan Irian Jaya. Penghilangan orang terjadi di berbagai tempat dari Aceh sampai Jaya Pura. Tahun 1981—1990 sebanyak 490 orang di Kediri, Malang, dan Tanjung Priok hilang. Ratusan orang hilang di Aceh selama diterapkannya DOM, terbanyak adalah aktivis yang hilang sebagai akibat peristiwa 27 Juli (*Kompas*, 31 Agustus 2001). Sepanjang kekuasaan Rezim Orde Baru tidak terhitung lagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara berupa penculikan, pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Melalui sajak yang berjudul “Ibunda”, Thukul melontarkan kritik terhadap kekerasan berupa penyiksaan dan pemenjaraan tanpa proses peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa memeberitahu kesalahannya penguasa melalui aparat militernya dengan semena-mena dapat menangkap dan menyiksa orang-orang yang dianggap berbahaya. Cap berbahaya yang dilemparkan pada seseorang juga bersifat sepihak atau menurut versi penguasa. Dalam kasus penculikan para aktivis PRD terkait peristiwa Sabtu kelabu, 27 Juli 1996 aparat menggunakan pola penyiksaan berupa pemukulan, penyetruman, kawat yang diikat di kaki untuk menjepit bak air, penggrebekan kantor, intimidasi, pemukulan, tendangan, sulutan dengan rokok, tusukan dengan pistol, penyetruman, dan penelanjangan. Kritik Thukul ini dilontarkan melalui mulut seorang ibu yang anaknya menjadi korban kebiadaban penguasa. Bentuk-bentuk penyiksaan, seperti pemukulan, penyetruman, tendangan, dan tamparan dilakukan diluar prosedur hukum yang berlaku Thukul mempertanyakan kesewenang-wenangan penguasa yang sebenarnya tidak mempunyai hak untuk melakukan penyiksaan terhadap manusia.

ibunda  
akhirnya menjengukku juga  
datang ke penjara  
dari kampung ke ibukota  
melihat anak tersayang  
babak belur  
dianiaya tentara

....

kejahatan apakah  
yang direncanakan oleh anakku  
hingga kalian pukuli dia  
siang malam  
seperti anjing liar saja

kejahatan macam apakah  
yang dijalani oleh anakku  
hingga kalian main strom seenaknya  
sampai anakku demam  
tinggi suhu panas badannya

durhaka apakah  
yang diperbuat oleh anakku  
hingga tubuhnya mati rasa kalian siksa  
hak istimewa apakah yang kalian miliki  
begitu sewenang-wenang kalian  
main hakim menjalankan pengadilan  
tanpa undang-undang

....

(AIJP, 137)

Kritik terhadap pemenjaraan dan penggunaan kekerasan bersenjata untuk menopang kekuasaan yang dilakukan oleh aparat juga nampak dalam sajak Thukul yang berjudul "Merontokkan Pidato". Dalam sajak ini, Thukul tidak hanya mengkritik pemenjaraan seseorang dalam tahanan yang tidak layak, seperti yang dialami para aktivis PRD, yang disekap di ruang bawah tanah yang lembah dan gelap gulita, tetapi juga mengkritik perilaku penguasa yang menggunakan peralatan militer

dan kekerasan sebagai pembenar dan pemaksa rakyat untuk selalu tunduk pada keputusan yang dibuatnya.

berminggu-minggu ratusan jam  
aku dipaksa  
akrab dengan sudut-sudut kamar  
lobang-lobang udara  
lalat semut dan kecoa

....

kukibas-kibaskan pidatomu itu  
dalam kepalaku hingga rontok  
maka terang benderanglah  
ucapan penguasa selalu dibenarkan  
laras senapan!

(AIJP, 153)

Penyiksaan aparat terhadap para aktivis atau orang-orang yang dianggap bersuara kritis atau melawan penguasa seringkali dilakukan di luar batas-batas perikemanusiaan. Penyiksaan itu dapat berdampak dua hal, yaitu membuat orang yang disiksa merasa ketakutan dan trauma selama hidupnya atau justru semakin tegar dan kuat dalam melakukan perlawanan. Oleh karena itu, meskipun penyiksaan yang dilakukan telah melampaui ambang batas kemampuan manusia untuk menerimanya, tidak membuat orang menjadi takut, tetapi justru makin tegar. Tubuh yang babak belur dan darah yang menetes menjadi energi yang kuat untuk mengentalkan semangat perlawanan. Sebagai aktivis gerakan rakyat yang selalu terlibat dengan berbagai aksi masa, bentuk-bentuk penyiksaan sudah menjadi bagian hidup Thukul. Ia sendiri pernah hampir buta matanya karena dipukul dengan senjata di sudut kiri matanya dalam aksi protesnya bersama warga kampung di Solo. Sebagai penduduk

Jagalan Pucangsawit, ia bergabung dengan masyarakat sekampungnya untuk memprotes pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tekstil PT Sari Warna Asli. Tahun 1995, ia memimpin demo di pabrik tekstil PT Sritex Sukoharjo. Dalam demo itu, ia hampir kehilangan mata kirinya karena dipopor tentara. Kritik terhadap penyiksaan yang melampaui batas-batas peri kemanusiaan itu dilontarkan Thukul dalam sajak "Derita Sudah Naik Seleher".

kaulempar aku dalam gelap  
hingga hidupku menjadi gelap

kausiksa aku sangat keras  
hingga aku makin mengeras

kaupaksa aku menunduk  
tapi keputusan tambah tegak

darah sudah kauteteskan  
dari bibirku  
luka sudah kaubilurkan  
ke sekujur tubuhku  
cahaya sudah kaurampas  
dari biji mataku

derita sudah naik seleher  
kau  
menindas  
sampai  
di luar batas

(AIJP, 139)

Ketegaran serupa yang diakibatkan oleh kekerasan fisik yang diterimanya dapat pula disimak pada kritik Thukul dalam "Rumput Ilalang". Thukul menganggap bahwa kekerasan dan ancaman dengan menggunakan senjata tidak akan dapat menumpas rakyat yang rasa keadilannya telah terluka. Bagaikan rumput ilalang yang

selalu tumbuh, meski sudah berulang kali dicabuti dan dimusnahkan, rakyat yang termarginalisasi juga akan selalu bangkit kembali melakukan perlawanan setiap kali aparat menindasnya. Meskipun aparat militer dengan penguasaan persenjataannya dapat menakuti, meneror, dan mengancam rakyat, tetapi tidak akan pernah berhasil memupuskan perlawanan yang ada di dalam pikiran setiap orang yang tertindas. Thukul mengkritik kekerasan penguasa terhadap rakyatnya sebagai upaya yang sia-sia karena rakyatlah atau kebenaranlah yang pada akhirnya akan menang mengalahkan kesewenang-wenangan..

tumbuh lagi  
harapanku  
menaklukan  
ketakutan  
yang kauternakan  
lewat pidato  
dan laras senapan

aku melihat ilalang  
o siasialah  
kekuasaan memasang  
palang penghalang  
ilalang  
tetap hidup tumbuh  
dan menang

walau seratus kali digaru

(AIJP, 141)

Ancaman kekerasan fisik dan teror menjadi cara yang selalu ditempuh penguasa untuk mengontrol dan mendisiplinkan rakyat. Orang-orang yang berani bersuara kritis diancam dengan undang-undang karet, yakni undang-undang subversif yang sangat mudah ditarik ulur atau ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan

dan kehendak penguasa. Sebagaimana dalam sajak “Rumput Ilalang”, dalam sajak yang berjudul “Harimau” Thukul mengkritik cara-cara kekerasan, intimidasi, teror, dan ancaman pada orang-orang yang bersuara kritis sebagai tindakan yang sia-sia karena sepanjang ketidakadilan masih merajalela, suara kritis dan kritik tidak dapat dibungkam. Dalam sajak “Harimau”, Thukul menggunakan diksi “tertawa” untuk merepresentasikan suara kritis atau vokal yang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Larangan terhadap “tertawa” juga disertai ancaman yang menakutkan. Akan tetapi, sekali lagi Thukul mengejek segala upaya kekerasan fisik dan mental itu tidak akan pernah berhasil mematahkan kekritisannya dan kevakalan seseorang. Kritik terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru dipusatkan pada tiga isu: korupsi kalangan pejabat negara termasuk sanak keluarganya; ketergantungan pada penanaman modal, natuan, dan perdagangan luar negeri; dan bukti kian melebarnya kesenjangan antara elit kota yang kaya dengan masa miskin pedesaan. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan tameng kekuasaan dengan memberikan tafsir sesuai dengan kebutuhan. Pancasila harus menjadi azas tunggal atau satu-satunya azas yang boleh dipakai dalam suatu organisasi. Thukul sebagai ketua JAKKER, yakni organisasi di bawah PRD yang dituding hendak melakukan makar merasakan sendiri akibat dari pilihannya masuk ke dalam organisasi politik yang tidak mencantumkan azas Pancasila PRD dituduh sebagai reinkarnasi Partai Komunis yang merupakan musuh laten rezim Orde baru. Oleh karena itu, tidak saja dinyatakan terlarang, aktivis PRD juga menjadi korban penculikan dan penyiksaan. Pemasungan terhadap kebebasan berpikir, bersuara, bertindak, dan berorganisasi dikritik oleh Thukul dalam sajak “Harimau”.

.....  
sekarang aku mendengar semakin banyak  
suara tawa  
tapi  
penguasa  
risi rupanya  
karena orang yang berani tertawa  
diancam dengan undang-undang subversi  
dan hukuman mati  
tapi  
meskipun para terdakwa  
sudah dimasukkan bui  
dan diadili  
suara tawa itu tak juga kunjung berhenti  
meskipun surat kabar radio dan televisi  
telah menyiarkan ke seluruh sudut negeri  
bahwa tertawa terbahak-bahak  
itu liberal  
bertentangan dengan budaya nasional  
dan merongrong stabilitas negara  
karena itu  
orang yang berbicara  
tertawa  
berpendapat  
dan berserikat  
harus mencantumkan apa azasnya  
kalau nekat  
tembak di tempat  
.....

(AIJP, 156 -157)

Ketakutan penguasa terhadap gerakan perlawanan membuatnya melakukan segala cara untuk menumpasnya, termasuk memburu seseorang sampai ke rumah pribadinya. Dalam upaya memperoleh informasi, aparat juga tidak segan-segan melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa mempertimbangkan hak pribadi atau *privacy* seseorang. Keluarga Thukul pernah mengalami mimpi buruk itu, yakni didatangi aparat yang tanpa dibekali surat izin sesuai prosedur melakukan penggeledahan di rumahnya. Pada tanggal 5 April 1996, delapan polisi berpakaian

preman bergerak ke kampung Kalangan untuk menggerebeg rumah Thukul. Di rumah kecil sederhana berlantai tanah yang berdiri di pinggir sungai itu, polisi tidak menemukan Thukul. Polisi membawa buku-buku kumpulan puisi, antara lain karya Thukul yang berjudul *Mencari Tanah Lapang*, buku-buku lain, poster, dan surat-surat yang dibuat Thukul selaku ketua JAKKER serta sejumlah stiker. Penggeledahan itu membuat anak-anak Thukul ketakutan dan mengalami trauma sehingga selalu ketakutan setiap kali melihat orang bertampang polisi atau militer. Dalam sajaknya yang berjudul "(Tanpa Judul)", Thukul melontarkan kritik terhadap cara-cara kekerasan berupa penggeledahan yang dilakukan aparat tanpa memperhatikan perasaan pemiliknya. Secara langsung, cara-cara seperti itu juga dianggap sebagai pendidikan kekerasan terhadap anak-anak sebagai generasi muda yang tidak seharusnya mendapatkan pendidikan atau mengalami kekerasan dan penindasan.

kuterima kabar dari kampung  
rumahku kalian geledah  
buku-bukuku kalian jahat

tapi aku ucapkan banyak terima kasih  
karena kalian telah memperkenalkan  
sendiri  
pada anak-anakku  
kalian telah mengajar anak-anakku  
membentuk makna kata penindasan  
sejak dini

ini tak diajarkan di sekolahan  
tapi rejim sekarang ini memperkenalkan  
kepada semua kita  
setiap hari di mana-mana  
sambil nenteng-nenteng senapan

kekejaman kalian

adalah bukti pelajaran  
yang tidak pernah ditulis

(AIJP, 140)

### 3.1.2.2 Penyeragaman

Penyeragaman adalah proses atau cara perbuatan menyeragamkan (KBBI, 1994:921). Penyeragaman merupakan salah satu perwujudan berlangsungnya militerisme yang memang memfokuskan pada dua hal, yaitu mengurus kehidupan sosial politik mulai dari pendidikan, kebudayaan, kesenian, dan menggunakan cara dan kekuatan militer mulai dari lengan berotot, alat-alat dan teknologi membunuh, penyiksaan, penculikan, teror, dan pengerahan masa. Militerisme tidak hanya berarti penguasaan dinas intelijen, pasukan tempur, dan persenjataan, tetapi juga penguasaan jabatan birokrasi pada badan-badan non militer. Militerisme telah berkembang dalam bentuk kebudayaan, norma, angan-angan, cara berpikir, bergaul, dan berbicara. Semua itu bercirikan kejantanan, kekerasan, dan sikap kaku mempertentangkan realitas hidup menjadi dua bagian, yakni kawan—lawan atau kalah—menang (Heryanto, 2000:247). Penyeragaman termasuk dalam budaya militerisme karena tidak ada penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang berada pada sudut pandang berbeda akan dianggap sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Untuk tidak ditempatkan sebagai target yang harus dihilangkan, seseorang harus sependapat dengan penguasa. Thukul melontarkan kritik yang tajam terhadap upaya penyeragaman itu dalam sajaknya yang berjudul “Buron”. Sajak yang merefleksikan pengalaman pribadi Thukul ketika hidup sebagai buron setelah meletus peristiwa 27 Juli itu mengkritik penguasa

dengan tangan-tangan perpanjangannya yang selalu siaga dan siap memenjarakan orang-orang yang berani berpikiran tidak sama dengan penguasa. Dalam upaya penyeragaman itu pula, penguasa memanfaatkan pasal karet undang-undang subversi. Dengan terang-terangan dan nada mengejek, Thukul mengkritik upaya penguasa untuk menyeragamkan rakyatnya, tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga dalam penampilan fisik sehingga seseorang tidak dapat menjadi dirinya sendiri.

baju lain  
celana lain  
potongan rambut lain  
buku yang dibaca lain  
nama lain  
ekspresi lain  
menjadi  
diri  
sendiri  
adalah tindakan  
subversi  
di negeri ini  
maka  
selalu siaga  
polisi  
tentara  
hukum dan penjara  
bagi siapa saja  
yang menolak  
menjadi  
orang lain

(AIJP, 142)

Meskipun penguasa dan aparat selalu berupaya menyeragamkan pendapat dan kehendak semua orang, media elektronik relatif dapat lebih bebas karena dengan pancarannya yang luas, media elektronik dapat dinikmati di luar negeri yang tingkat kebebasannya sudah tinggi. Sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru, dunia

internasional juga menyoroti dan memberi penilaian yang buruk terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Membuat semua orang berada dalam satu pikiran atau memaksa seseorang untuk berpikir sendiri merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Media elektronik dengan cepat dapat menyiarkan berbagai bentuk pelanggaran HAM itu dan dapat memberitakannya ke seluruh penjuru dunia. Dalam sorotan dunia internasional, penguasa Indonesia harus berpikir ulang untuk mengendalikan dan menyeragamkan pers juga. Oleh karena itu, dengan nada mengejak Thukul mengkritik ketidakberdayaan aparat penguasa menyeragamkan suara dalam pers dalam sajaknya yang berjudul "Aku Berkelana di Udara" berikut ini.

di udara kalian tak bisa mendusta  
gelombang radio tak bisa dibungkam  
dengan senjata

di udara tak ada pembreidelan  
di sana menteri luar negeri  
menteri penerangan dan presiden  
tak bisa ngomong seenaknya

di udara seribu suara berbicara  
kalian tak bisa menyeragamkannya

ketika meletus peluru laras senapan  
gemanya menyebar ke sudut-sudut benua

(AIJP, 150)

### 3.1.3 Kritik Terhadap Masalah Politik

Masalah politik yang paling banyak dikritik oleh Thukul dalam sajak-sajaknya adalah berkaitan dengan Pemilu. Masalah ini sangat berkaitan dengan masalah sosial lain karena melalui peristiwa politik yang disebut Pemilu inilah penguasa mendapat legitimasi untuk mendapatkan kembali dan menjalankan kekuasaannya. Pemilu-pemilu Orde Baru adalah pengukur yang tidak valid tentang kehendak politik rakyat. Pemilihan-pemilihan yang dilangsungkan selama kekuasaan rezim Orde Baru mencerminkan proses elektoral yang dikelola serta dikontrol dengan sangat ketat yang dirancang oleh pemerintah—yang kekuasaannya terutama berasal dari dukungan Angkatan Bersenjata -- untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyat dan dunia luar. Sementara itu, pada saat yang bersamaan menghindari sejauh mungkin pertarungan nyata di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersaing (Liddle, 1992:90). Dalam setiap Pemilu, Golkar sebagai partai pemerintah yang berkuasa selalu menang lebih dari 60 % suara. Kemenangan-kemenangan Golkar tidak lepas dari berbagai kecurangan, seperti pengaturan pemerintah atas Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Kepartaian serta berbagai bentuk peraturan pelaksanaannya yang menguntungkan Golkar dan memanipulasi partai yang tidak berkuasa. Secara organisasional, Golkar adalah campuran dari militer dan birokrasi sipil. Di beberapa daerah, pimpinan Golkar dimonopoli oleh militer sampai ke tingkat desa. Strategi utama Golkar dalam setiap Pemilu adalah memobilisasi pejabat-pejabat pemerintah untuk memobilisasi para pendukung. Pejabat-pejabat daerah tingkat provinsi, kotamadya, dan kecamatan menerapkan tekanan kepada kepala-kepala desa untuk mengumpulkan suara. Kepala-kepala desa akan menekan

para ketua RT untuk melakukan hal yang sama. Strategi itu sangat berhasil di pedesaan Jawa, yang pejabat-pejabat daerahnya cenderung memiliki kontrol yang kuat terhadap sumber-sumber nilai dan secara tradisional dipatuhi untuk urusan-urusan di atas desa (Liddle, 1992: 91—92).

### **3.1.3.1 Pemilu Tidak Membawa Perubahan**

Dalam setiap Pemilu, para kontestan atau juru bicara partai politik, utamanya Golongan Karya sebagai partai yang berkuasa selalu memberikan janji-janji yang menggiurkan. Janji-janji itu pada umumnya tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup kesejahteraan rakyat, pengurangan angka pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan prasarana fisik, dan pendidikan yang murah bagi kalangan tidak mampu. Masyarakat bawah yang merupakan jumlah mayoritas penduduk Indonesia hampir tidak pernah tersentuh oleh jaring-jaring pembangunan sehingga menjadi sasaran empuk untuk melontarkan janji-janji menggiurkan. Dalam masa kampanye, pejabat-pejabat pusat dan daerah, yang tidak pernah sungguh-sungguh memiliki kepedulian dan keberpihakan pada masyarakat miskin, ramai-ramai turun menyapa dan mendengar keluhan warganya dengan sikap ramah dan bersahabat serta tidak lupa membungkus maksud licik mereka dengan sedikit bantuan yang akan segera disambut gembira warga yang memang kekurangan. Pada masa menjelang Pemilu itulah “nasib” rakyat sedikit meningkat karena di ‘raja’ kan oleh elit-elit politik yang bertarung memperebutkan kursi dewan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi sesudah Pemilu akan sangat berbeda. Elit-elit politik dapat duduk di kursi enak menikmati segala fasilitas yang dibiayai dengan

uang rakyat. rakyat sendiri tetap saja hidup dalam kubangan kemiskinan dan penderitaan berkepanjangan. Jelaslah bahwa elit-elit penguasa hanya menjadikan rakyat sebagai instrumen untuk mendulang suara. Rakyat yang tidak mampu tetap saja tidak dapat memperoleh jaminan kesehatan karena biaya berobat yang mahal, yang rumahnya terkena proyek pembangunan tetap saja harus “berkorban demi pembangunan” dengan ganti rugi yang sangat merugikan, yang mempunyai anak usia sekolah juga harus tersengal-sengal memenuhi biaya pendidikan yang tinggi atau bahkan membiarkan anaknya tidak bersekolah, dan sebagainya. Masyarakat bawah yang selalu dengan setia mengambil andil dalam Pemilu dan membantu menipu penguasa untuk menunjukkan pada dunia bahwa demokrasi sudah berjalan di Indonesia, tetapi tetap tidak meningkat taraf hidupnya mengusik Wiji Thukul yang juga menjadi bagian dari golongan masyarakat tersebut. Thukul mengkritik penguasa yang hanya menjadikan rakyat sebagai alat meraih kekuasaan, tetapi melupakannya setelah berkuasa dalam sajak “Kuburan Purwoloyo”. Dalam sajaknya ini Thukul mengkritik rezim Orde Baru dengan menyodorkan “fakta-fakta” yang memperlihatkan penderitaan sampai mati yang harus ditanggung rakyat kecil meskipun mereka selalu ikut menyukseskan Pemilu. *Mbok* Cip meninggal karena tidak mampu membayar biaya pengobatan, *mbok* Pin mati karena rumah tempat bernaungnya digusur, tukang becak yang sepanjang hidupnya mengurus teringat dan bermandi matahari, para buruh yang sepanjang hidupnya diperas tenaganya dan dihimpit hutang, dan orang-orang kecil lainnya. Kuburan Purwoloyo, meskipun bisu dan sunyi, tetapi cerita pilu terus terngiang dari dalamnya dan menjadi saksi bahwa sejarah belum berubah.

di sini terbaring  
mbok Cip  
yang mati di rumah  
karena ke rumah sakit  
tak ada biaya

di sini terbaring  
pak Pin  
yang mati terkejut  
karena rumahnya tergusur

di tanah ini  
terkubur  
orang-orang yang  
sepanjang hidupnya memburuh  
terhisap dan menanggung hutang  
di sini  
gali-gali  
tukang becak  
orang-orang kampung  
yang berjasa dalam setiap Pemilu  
terbaring  
dan keadilan masih saja janji

di sini kubaca kembali  
: sejarah kita belum berubah!

(AIJP, 24)

Sebagaimana tergambar dalam sajak “Kuburan Purwoloyo” yang mengkritik Pemilu yang tidak pernah menghasilkan perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat, dalam sajak “Hari Ini Aku Bersiul-siul” Thukul juga melontarkan kritik yang pedas terhadap pesta demokrasi itu. Dalam masa kampanye, juru kampanye partai saling “berperang” menawarkan janji-janji perbaikan kesejahteraan hidup. Pada era Orde Baru, juru kampanye hanya diizinkan untuk menawarkan program-program partainya jika menang dan berkuasa sehingga juru kampanye berlomba-lomba mengobral janji

dan membujuk rakyat agar memilih partainya serta menyakinkan bahwa kesejahteraan yang merata akan terwujud bila partainya berkuasa. Ironi dan paradoks pun tidak dapat dihindari, terutama ketika Golkar sebagai partai yang berkuasa menurunkan para menteri sebagai juru kampanyenya. Para menteri mengumbar janji hendak mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kecil, mengurangi pengangguran, dan menegakan serta menegakan janji-janji Orde Baru untuk melaksanakan amanat yang ada dalam Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Janji-janji itu sangat bertentangan dengan yang mereka lakukan, yaitu membiarkan kesenjangan sosial dan kemiskinan makin meluas, moral dan akhlak merosot, dan KKN merajalela. Janji-janji para juru kampanye dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan bagaikan jauh panggang dari api. Setelah rakyat berhasil ditipu untuk memberikan suaranya, wakil rakyat yang sudah duduk di kursi empuknya tidak peduli lagi pada janjinya. Rakyat kembali harus bergelut dengan kemiskinan dan kemelaratan serta berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa ada Pemilu atau tidak ada, bagi rakyat kecil tidak ada bedanya karena nasib mereka sama saja. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan pun mereka tetap tak mampu. Dalam sajak "Hari Ini Aku Akan Bersiul-siul" Thukul mengkritik keadaan itu dengan "mengibarkan bendera hak pilihnya tinggi-tinggi" dalam arti tidak mau dibujuk atau ditipu untuk ikut mencoblos dalam hari pemilihan. Menurut Thukul, setelah pemilihan umum selesai nasib mereka juga tidak pernah berubah menjadi lebih baik sehingga tidak ada gunanya memberikan hak suara. Pemilu menjadi peristiwa yang memilukan.

pada hari coblosan nanti  
aku akan masuk dapur  
akan kujumlah gelas dari sendokku  
apakah jumlahnya bertambah  
setelah pemilu bubar?

pemilu o pilu pilu

bila hari coblosan tiba nanti  
aku tak akan pergi ke mana-mana  
aku ingin di rumah saja  
mengisi jambangan  
atau menanak nasi

pemilu o pilu pilu  
nanti akan kuceritakan kepadamu  
apakah jadi penuh karung beras kita  
minyak tanah  
gula  
atau bumbu masak  
setelah suaramu dihitung  
dan pesta demokrasi dinyatakan selesai  
nanti akan kuceritakan kepadamu

pemilu o pilu pilu

kini tiba harinya  
hari coblosan  
aku tak akan ikut berbondong-bondong  
ke tempat pemungutan suara  
aku tidak akan datang  
aku tidak akan menyerahkan suaraku  
aku tidak akan masuk  
ke dalam kotak suara itu

pemilu  
o pilu pilu  
aku akan bersiul-siul  
memproklamasikan kemerdekaanku

....

(AIJP, 151)

### 3.1.3.2 Demokrasi Manipulatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa penguasa dengan berbagai cara dapat memanipulasi fakta-fakta menyedihkan menjadi nampak menggembirakan. Melalui kotrolnya terhadap pers, terutama yang berafiliasi kepada pemerintah, seperti RRI, TVRI, dan *Suara Karya*, pemerintah dapat memberikan informasi yang sesungguhnya membohongi publik. Radio-radio pemerintah yang tersebar di seluruh penjuru tanah air tidak henti-hentinya menjadi penyambung lidah penguasa untuk memberitakan bahwa pembangunan ekonomi dan politik telah sukses dilaksanakan., tidak terkecuali dalam masalah Pemilu. Berita yang dilansir media pemerintah selalu memuji pemerintah sebagai pihak yang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan bukti partisipasi rakyat yang sangat besar. Kemenangan Golongan Karya sebagai partai penguasa dan sudah dapat dipastikan kemenangannya sebelum Pemilu digelar selalu diklaim sebagai bukti bahwa rakyat mendukung pemerintah Orde Baru dan strategi pembangunannya. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan keadaan yang sungguh bertentangan. Rakyat berbondong-bondong memilih Golkar, bukan karena mendukung pemerintahan, tetapi takut dengan intimidasi, teror, dan dipersulitnya urusan administrasi di kelurahan, kecamatan, kepolisian, atau kabupaten. Bukan rahasia umum lagi bahwa Golongan Karya yang berunsur utama militer dan birokrasi sipil melakukan berbagai kecurangan demi selalu dapat memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas dan melanggengkan kekuasaannya. Kecurangan tidak hanya dilakukan dengan aturan kampanye yang jelas-jelas menguntungkan Golkar, yakni juru kampanye tidak boleh mengkritik kebijakan yang diambil pemerintah karena dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa serta

membatasi masa kampanye hanya 25 hari hingga PDI dan PPP tidak dapat menyosialisasikan program partainya, tetapi juga dengan membuat UU Partai Politik yang tidak memungkinkan partai politik membuat jaringan organisasinya sampai ke tingkat daerah. Sementara itu, dengan dukungan militer dan birokrasi sipil yang infrastrukturnya menjangkau sampai ke tingkat desa di seluruh penjuru tanah air dengan mudah penguasa dapat memobilisasi masa untuk mendukungnya. Tangan-tangan birokrasi sipil dan militer bergerak bersama 'meneror' dan menanamkan rasa takut pada warga. Ketua RT, Kepala Desa, kepolisian, kecamatan, Koramil akan mempersulit pengurusan surat-surat warga yang diketahui menjadi simpatisan partai lain. Setiap pegawai negeri dan ketua RT harus mendata warganya yang belum Golkar dan diharuskan dapat meng-Golkarkan tetangganya. Ketua RT dan PNS yang tidak dapat memenuhi target akan mendapat teguran atau sanksi administrasi dari atasan yang lebih tinggi sehingga dengan berbagai cara mereka pun akan mengupayakan dapat menarik tetangganya yang belum Golkar menjadi Golkar. Tidak jarang sesama tetangga akhirnya tidak saling bertegur sapa atau kepala desa dan ketua RT tidak mau menyapa warganya sendiri yang memilih partai lain. Golongan Karya juga mempraktekan politik uang atau *money politics* dengan menyuap para pemilih agar memilih Golkar yang diwujudkan dengan berbagai cara, seperti pemberian uang transport, bantuan pendidikan, sembako, dan serangan fajar. Hal itu menimbulkan iri dari partai lain yang tidak memiliki sumber daya sebesar Golkar. Di berbagai daerah, mobilisasi tidak hanya dilakukan di tingkat penduduk yang memang telah memiliki hak pilih, tetapi juga di sekolah-sekolah dengan cara menyertakan siswa dalam kampanye untuk menyanyikan lagu Golkar dan

menginterogasi siswanya yang kedatangan menonton kampanye partai lain. Kenyataan pahit itu juga dialami sendiri oleh keluarga Thukul yang dicap sebagai penjahat negara. Anak Thukul menjadi korban politik yang bahkan belum dimengertinya. Teman-temannya yang orang tuanya Golkar dilarang bermain dengannya. Penguasa menutup mata terhadap konflik-konflik horisontal yang terjadi di tingkat akar rumput. Dengan nada mengejek panggung politik pemerintah tidak lebih dari arena “dagelan”, Thukul mengkritik sistem Pemilu yang diselenggarakan pemerintah dan berita-berita tentang keberhasilan pembangunan di radio sebagai hal yang memuakkan karena tidak sesuai dengan kenyataan. Thukul mengkritik perilaku istri ketua RT sebagai pihak yang mestinya melindungi semua warganya justru tidak mau menyapa warganya yang tidak memilih Golkar. Kritik juga dilontarkan pada lembaga pendidikan yang sudah menjadi mesin pendulang suara Golkar melalui tangan-tangan gurunya dengan adanya siswa yang diinterogasi hanya karena menonton kampanye partai lain. Oleh karena itu, dalam sajak “Aku Lebih Suka Dagelan”, Thukul merasa lebih suka mendengarkan dagelan daripada “dagelan” pemerintah melalui siaran berita.

di radio aku mendengar berita  
kata partisipasi politik rakyat kita  
sangat menggembirakan  
tapi kudengar dari mulut seorang kawanku  
dia diinterogasi dan dipanggil gurunya  
karena ikut kampanye PDI  
dan di kampungku ibu RT  
tak mau menegur sapa warganya  
hanya karena ia GOLKAR  
ada juga yang saling bertengkar  
padahal rumah mereka bersebelahan  
penyebabnya hanya karena mereka berbeda



tanda gambar

ada juga kontestan yang nyogok  
tukang-tukang becak  
akibatnya dalam kampanye banyak  
yang mencak-mencak

di radio aku mendengar berita-berita  
tapi aku jadi muak karena isinya  
kebohongan yang tak mengatakan kenyataan  
untunglah warta berita segera bubar  
acara yang kutunggu-tunggu datang: dagelan!

(AIJP, 29)

Partisipasi politik rakyat sangat dibutuhkan dalam setiap pemilu karena Indonesia sebagai negeri penghutang juga menjadi sorotan dunia Internasional, terutama dari negara-negara pendonor. Sebagai penghutang, Indonesia harus mematuhi syarat-syarat kesepakatan yang ditetapkan oleh negeri pendonor. Salah satu syarat dikucurkannya dana bantuan adalah jika Indonesia dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara demokratis dan salah satu indikasi sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya mekanisme pemilihan kepemimpinan nasional dan anggota parlemen melalui Pemilihan Umum yang Luber. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali itu menjadi ajang evaluasi oleh negara-negara pendonor untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan negara yang demokratis dan memutuskan melanjutkan atau menghentikan bantuannya. Pemerintah sangat berkepetingan untuk melanggengkan kekuasaan dan tetap mendapatkan kucuran dana pinjaman. Oleh karena itu, "pesta" demokrasi pun digelar dan diupayakan melibatkan rakyat sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara dari cara yang lunak, seperti *money politik* dan janji-janji perbaikan kesejahteraan

sampai cara-cara kekerasan berupa intimidasi dan teror. Setiap selesai Pemilu yang sudah pasti dimenangkan Golkar di atas 60 %, pemerintah membuat laporan bahwa pesta demokrasi telah selesai dan partisipasi politik rakyat sangat baik. Akan tetapi, laporan itu sungguh-sungguh bertolak belakang dengan kenyataan. Rakyat sebenarnya hanya dianggap sebagai angka-angka, bukan makhluk bernyawa dan berperasaan, yang dijadikan instrumen saja untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Thukul mengkritik manipulasi ini dengan mempertanyakan posisi rakyat di hadapan penguasa yang kenyataannya hanya menempatkannya sebagai benda, angka-angka yang dapat dijumlahkan dalam daftar statistik untuk dijadikan jaminan hutang. Demokrasi yang dilaporkan kepada Bank Dunia telah dilaksanakan 100 % dengan dukungan angka-angka partisipasi rakyat sesungguhnya merupakan demokrasi semu. Demokrasi seharusnya menghargai pluralitas pikiran, gagasan, pendapat, dan menghargai hak setiap individu, tetapi demokrasi di Indonesia dilakukan sambil membungkam suara-suara kritis dan mengeliminir perbedaan pendapat melalui tindakan kekerasan. Pemilu yang digelar bukanlah cermin demokrasi yang berhasil, tetapi hanya formalitas untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Tidak mengherankan bahwa akhirnya setiap kali Pemilu, tidak ada perubahan politik dan kebijakan. apalagi kesejahteraan rakyat yang meningkat. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang sesungguhnya dijamin oleh konstitusi dan dilindungi dalam negara demokrasi ternyata juga tidak dapat dinikmati oleh rakyat. Penguasa tetap saja melarang kritik karena dianggap akan mengganggu ketertiban dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Buruh-buruh yang berani berdemonstrasi atau mogok untuk

menuntut kenaikan upah dan kesejahteraannya hidupnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara negara. Penguasa tidak mengubah kebijakannya dengan terus melindungi kelas kapitalis dan perusahaan-perusahaan multinasional dengan memarginalkan kaum buruh. Kenyataan seperti itu, tidak lepas dari kritik Thukul. Dalam sajaknya yang berjudul "Terus Terang Saja", Thukul mengkritik klaim pelaksanaan demokrasi yang seratus persen, tetapi paradok dengan tiadanya kebebasan berpendapat dan tetap dimarginalkannya masyarakat bawah yang mayoritas dalam proses pembangunan. Dalam negara yang sungguh-sungguh demokratis, pihak masyarakatlah yang menang, tetapi kenyataan rakyat tetap diposisikan sebagai objek eksploitasi.

.....  
apakah aku ini cuma angka-angka  
yang menarik untuk bahan disertasi  
dan meraih gelar doctor  
yang tidak berotak  
tak bermulut  
yang secara rutin dilaporkan kepada bank dunia  
sebagai jaminan utang  
dan landasan  
tinggal landas?

sekarang demokrasi sudah 100%  
bulat  
tanpa debat  
tapi aku belum menjadi aku sejati  
karena aku dibungkam oleh demokrasi 100%  
yang tidak bisa salah

namun aku sangsi  
karena kemelaratan belum dilumpuhkan  
aku sangsi pada yang 100% benar  
terus terang saja

(AIJP, 143)

### 3.2 Perlawanan

Sajak-sajak Thukul dianggap berbahaya karena langsung 'bertabrakan' dengan penguasa. Pertabrakan itu merupakan sesuatu yang telanjang, begitu kasat mata Bahasa dan isinya sangat transparan hingga interpretasi atasnya dapat dilakukan tanpa pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan ketidakadilan sosial (Situmorang, 2004). Materi sajak yang ditulis Thukul sesungguhnya sangat sederhana, tetapi dibalik kesederhaan sajaknya mampu menjadi energi bagi gerakan mahasiswa dan elemen pro demokrasi. Di balik kesederhaannya pula, sajak-sajak Thukul menyembunyikan bara kelugasan cita-cita kebebasan dari pembodohan sebuah rezim yang sangat bobrok (Sugiharto, 2004). Apabila dimaknai secara referensial, banyak sajak Thukul yang dapat dikategorikan sebagai *demagogi* sehingga *danger of all the danger* (Dhakidae, 2000). Sajak-sajak itu saat dibacakan atau dilisankan di hadapan orang-orang, memiliki kekuatan tersendiri, seperti provokasi atau hasutan di mata penguasa yang terancam eksistensinya. Oleh karena itu, polisi dan tentara mencari dan menggrebeg *gubuk* Thukul. Sajak-sajak Thukul dihadapi dengan ribuan *moncong* senapan (Dhakidae, 2000:11).

#### 3.2.1 Perlawanan Thukul Sebelum Kasus 27 Juli

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang Wiji Thukul di bab II, Wiji Thukul telah mulai menulis sajak sejak masih SMP. Sajak-sajak yang ditulis sebelum *droup out* dari SMKI dinilai banyak kalangan menggunakan bahasa yang berbeda, yakni lebih simbolis. Setelah *droup out* dari SMKI dan terpaksa berkerja sebagai buruh pelitir di pabrik meubel, Thukul mengalami perubahan cara pandang

yang cukup radikal. Meskipun kemiskinan sudah menjadi bagian lekat dari hidupnya sejak lahir, merasakan dan melihat sendiri kehidupan buruh sangat berbeda dengan dunia sekolah yang segalanya sudah diatur dan ditentukan. Kesadaran untuk menyuarkan nasib dirinya dan teman-temannya yang seakan hilang ditelan deru mesin-mesin pembangunan dan melawan penindasan yang dilakukan terhadapnya, Thukul mengubah bahasa sajak-sajaknya yang simbolis menjadi “terang”. Proses perubahan itu disadari oleh Thukul sebagai bagian dari proses kesadarannya terhadap penderitaan yang dialami komunitasnya sehingga untuk menciptakan ikatan solidaritas Thukul harus menulis dengan bahasa yang dimengerti pula oleh teman-temannya. Sajak-sajak yang ditulisnya tidak hanya mengkritik kebijakan pembangunan yang tidak mendatangkan kesejahteraan yang merata, tetapi juga bernada perlawanan.

Kata yang bermakna perlawanan secara eksplisit muncul dalam sajak yang berjudul “Peringatan” yang ditulis pada tahun 1986. Sajak itulah yang telah mencatatkannya sebagai seorang penyair yang telah menorehkan sajak perlawanan. Baris terakhir sajak itu, **maka hanya ada satu kata:lawan!** Telah menjadi simbol kekuatan dan tekad bagi sebuah perubahan oleh berbagai kelompok perlawanan untuk melawan rezim otoritarianisme (Munir, 2000:xv). Sajak “Peringatan” yang ditulis Thukul di Solo pada tahun 1986 menjadi favorit para aktivis jalanan dan pengagum Thukul. Oleh karena itu, sajak sederhana itu menjadi sangat diperhitungkan oleh penguasa Orde Baru (Sugiharto, 2004). Angka tahun penulisan sajak itu, yakni tahun 1986, menunjukkan bahwa Thukul sudah mengibarkan bendera perlawanan yang kasat mata ketika penguasa Orde Baru masih dalam posisi yang

sangat kuat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Thukul telah lama menjadi target operasi militer dan polisi dengan dalih menjaga dan memelihara stabilitas politik dan keamanan.

Sebagaimana judulnya, sajak Thukul itu berisi peringatan terhadap penguasa agar mau mendengarkan rakyatnya. Peringatan yang diberikan Thukul terhadap para penguasa terkait dengan perilaku mereka dan tanggapan rakyat terhadapnya. Penguasa yang otoriter dan tidak menghendaki adanya suara-suara kritis atau kritik, apalagi perlawanan dalam bentuk sekecil apa pun. Dengan otoritarianisme seperti itu, rakyat hanya dapat membicarakan masalah yang mereka hadapi di antara mereka sendiri. Hal itu merupakan sesuatu yang sesungguhnya berbahaya karena dapat meletup menjadi aksi masa. Oleh karena itu, penguasa sebaiknya mendengarkan keluhan rakyatnya. Jika penguasa tetap tidak mau mendengarkan suara rakyat, maka tidak ada cara lain kecuali melawannya. Sajak ini merupakan bentuk perlawanan yang terang benderang dengan kata-kata yang tidak sulit dicerna maknanya. Dalam sajak itu tergambar sebuah tekad perlawanan yang sudah bulat apabila penguasa melarang kritik dan membungkam suara-suara kritis. Larik terakhir sajak ini seringkali dikutip dalam tulisan dan orasi orang-orang yang mengkritik perilaku politik dan operasi kekuasaan Orde baru

jika rakyat pergi  
ketika penguasa pidato  
kita harus hati-hati  
barangkali mereka putus asa  
kalau rakyat sembunyi  
dan berbisik-bisik  
ketika membicarakan masalahnya sendiri  
penguasa harus waspada dan belajar mendengar

bila rakyat tidak berani mengeluh  
itu artinya sudah gawat  
dan bila omongan penguasa  
tidak boleh dibantah  
kebenaran pasti terancam  
apabila usul ditolak tanpa ditimbang  
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan  
dituduh subversif dan mengganggu keamanan  
maka hanya ada satu kata:lawan!

(AIJP, 61)

Peringatan itu dilanjutkan dengan ancaman yang lebih keras berupa tekad untuk terus memburu penguasa yang fasis dan mengancam akan melakukan pemberontakan seperti tampak pada sajak "Sajak Suara". Dalam sajak itu masih terdapat nada peringatan, tetapi sudah disertai suatu ancaman dalam wujud tindakan nyata. Peringatan Thukul itu ditujukan kepada penguasa agar tidak memenjarakan dan membungkam orang-orang yang dinilai vokal. Apabila penguasa terus memaksa orang-orang untuk diam, maka tidak ada cara lain kecuali melawannya dalam bentuk yang lebih nyata berupa pemberontakan. Pemberontakan merupakan kata yang sangat menakutkan bagi penguasa yang dengan segala cara selalu berusaha menghindari kritik dan perlawanan dalam bentuk sekecil apapun melalui tindakan represif. Ancaman untuk melakukan pemberontakan ini akan terus didengungkan selama penguasa tidak mau mendengarkan suara rakyatnya.

....  
suara-suara itu tak bisa dipenjarakan  
di sana bersemayam kemerdekaan  
apabila engkau memaksaku diam  
aku siapkan untukmu pemberontakan!

....  
sesungguhnya suara itu akan menjadi baik

ialah yang mengajari aku bertanya  
dan pada akhirnya tidak bisa tidak  
engkau harus menjawabnya  
apabila engkau tetap bertahan  
aku akan memburumu seperti kutukan

(AIJP, 58)

Mulut dapat saja dibungkam, tetapi kegelisahan jiwa akibat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan tidak dapat dibungkam begitu saja. Suara-suara yang menuntut keadilan bukan suatu kesalahan. Penguasa harus menjawab kegelisahan-kegelisahan itu. Dengan memberikan keadilan yang merata. Hasil-hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh kelas dalam masyarakat, tidak terkecuali kelas bawah. Jika pemerataan hasil-hasil pembangunan tidak segera dilakukan, apalagi jika suara-suara yang menuntut keadilan tersebut selalu dibungkam, maka mereka akan terus memburu penguasa itu sampai mereka dapat berlaku adil. Pada awalnya, hanya sebuah peringatan untuk melakukan perubahan, tetapi jika tidak ada perubahan, maka harus dilawan. Perlawanan dan ancaman harus diwujudkan dalam bentuk pemberontakan, yakni tindakan nyata sesuatu yang secara langsung mengancam struktur kekuasaan.

Perubahan sosial politik hanya dapat dilakukan dengan suatu tindakan nyata daripada hanya sekedar kata-kata. Berbagai tuntutan yang dilontarkan ternyata tidak efektif karena tidak dihiraukan oleh penguasa. Oleh karena itu, Thukul berkesimpulan bahwa kata-kata saja tidak akan dapat menyelamatkan atau memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya. Tekad melakukan perlawanan dalam bentuk tindakan dianggap sudah mendesak untuk dilaksanakan, seperti nampak dalam sajak yang berjudul "Untuk D" dan "Istirahatlah Kata-kata".

.....  
mari pulang saja  
sebelum tipu menipu tambah seru  
malam makin beku  
aku tidak betah, aku ingin masuk  
aku tak terhibur lagi  
oleh percakapan-percakapan  
yang menyelamatkan kita bukan omong besar  
bukan mimpi bukan ketakutan

mari tidur  
persiapkan  
perlawanan, esok pagi!

(AIJP, 59)

istirahatlah kata-kata  
jangan menyembur-nyembur  
orang-orang bisu

kembalilah ke dalam rahim  
segala tangis dan kebusukan  
dalam sunyi yang mengiris  
tempat orang-orang mengingkari  
menahan ucapannya sendiri

tidurlah kata-kata  
kita bangkit nanti  
menghimpun tuntutan-tuntutan  
yang miskin papa dan dihancurkan  
nanti kita akan bangkit mengucapkan bersama tindakan  
bikin perhitungan  
tak bisa lagi ditahan-tahan

(AIJP, 60)

Senada dengan kedua sajak di atas, Thukul juga mengajak orang-orang untuk bergabung dalam barisan perlawanan secara nyata, yakni dalam bentuk tindakan. Kata-kata tidak ada gunanya dilontarkan kepada penguasa yang telah menjadi tuli dan bisu. Keadaan yang makin hari makin buruk, terutama yang berlangsung di kalangan bawah memaksa Thukul untuk memprovokasi orang-orang yang tersingkir

atau tergusur oleh pembangunan itu agar bersatu dan masuk ke dalam barisannya. Thukul langsung menghadapkan dirinya dan tujuan perlawanannya, yaitu presiden sebagai kekuatan tertinggi di negeri ini dan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap proses pembangunan.

jalan raya dilebarkan  
kami terusir  
mendirikan kampung  
digusur  
kami pindah-pindah  
menempel di tembok-tembok  
dicabut  
terbuang

kami rumput  
butuh tanah  
dengar!  
Ayo gabung ke kami  
Biar jadi mimpi buruk presiden!

(AIJP, 6)

Sebuah gerakan tidak mungkin dilakukan sendirian dan hanya dengan diam. Thukul menyadari bahwa untuk melakukan perlawanan dan perubahan tidak mungkin dapat dilakukan sendirian. Sebuah perubahan, dalam pandangan atau doktrin PRD, hanya mungkin dilakukan dengan memobilisasi masa, khususnya kaum tani dan buruh untuk melakukan aksi masa yang revolusioner. Tanpa gerakan masa yang revolusioner, sebuah perubahan dalam konteks kekuasaan tidak mungkin terwujud. Perubahan-perubahan itu menyangkut pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pembagian tanah secara merata karena setiap orang membutuhkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak itu hanya mungkin dapat direalisasikan jika kebutuhan pokok manusia berupa *pangan*, *sandang*, dan *papan* dapat terpenuhi.

Model pembangunan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok rakyat itu secara merata. Posisi yang sangat lemah dan marginal diduduki oleh kaum tani dan buruh yang tidak memiliki daya dan kemampuan untuk ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mendapatkan hak-haknya, kaum tani dan buruh harus melakukan gerakan masa sebagai satu-satunya nilai tawar yang mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Thukul mengajak orang-orang yang senasib untuk bergabung dengannya dalam barisan perlawanan dan membuat perhitungan dengan penguasa, seperti dalam sajak "Tentang Sebuah Gerakan" berikut ini.

tadinya aku pengen bilang  
aku butuh rumah  
tapi lantas kuganti  
dengan kalimat:  
setiap orang butuh tanah  
ingat: setiap orang!

aku berpikir tentang  
sebuah gerakan  
tapi mana mungkin  
aku nuntut sendirian?

aku bukan orang suci  
yang bisa hidup dari sekepal nasi  
dan air sekendi  
aku butuh celana dan baju  
untuk menutup kemaluanku

aku berpikir tentang gerakan  
tapi mana mungkin  
kalau diam?

(AIJP, 122)

### 3.1.3.2 Perlawanan Thukul Setelah Kasus 27 Juli

Setelah meletus peristiwa 27 Juli 1996, Thukul diburu oleh militer karena keterlibatannya dalam organisasi PRD sebagai salah satu ketua lembaga di bawah PRD, yaitu Jakker. PRD dituduh sebagai dalang peristiwa kerusuhan Sabtu Kelabu dan dianggap sebagai organisasi anak muda militan yang hendak melakukan makar, apalagi dalam AD/ART-nya tidak mencantumkan Pancasila sebagai azasnya. Oleh karena itu, PRD dicap sebagai reinkarnasi dari PKI. Untuk menghindari tangantangan militer, Thukul memilih bersembunyi sebagai pelarian. Dalam pelariannya itu, ia tetap menulis sajak yang dikirimkan kepada teman-temannya dengan menggunakan nama samaran Budi Bang Branang. Sajak-sajak Thukul yang ditulis dalam pelarian itu tetap menunjukkan satu tekad perlawanan, meskipun dia tidak yakin bahwa dirinya akan selamat atau dapat pulang kembali ke rumahnya mengingat watak kejam penguasa yang tidak akan membiarkan orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas dapat menghirup udara bebas. Dalam pernyataannya Menkopolkam Soesilo Soedarman mengatakan bahwa kerusuhan itu didalangi oleh PRD yang merupakan reinkarnasi dari PKI. Kemiripan itu ditunjukkan dengan adanya organisasi-organisasi *onderhouwnya*, yaitu Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) yang diketuai Dita Indah Sari sama dengan SOBSI, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID dengan ketua umumnya Andi Arief sama dengan CGMI, Serikat Tani Nasional (STN) dianggap penjelmaan BTI, dan Jaringan Kesenian Rakyat atau Jaker yang diketuai Wiji Thukul dianggap sama dengan LEKRA. PRD merupakan jelmaan dari PKI yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1966 (*Kedaulatan Rakyat*, 30 Juli 1996, hlm. 1).

Pada tanggal 2 Agustus 1996, secara resmi Mabes ABRI mengumumkan bahwa otak kerusuhan 27 Juli adalah Budiman Soedjatmiko sebagai ketua umum PRD. Mabes ABRI memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan Budiman Soedjatmiko dan rekan-rekannya, seperti Wiji Thukul sehingga mempermudah pihak berwenang untuk menangkapnya.

Dalam pandangan Thukul, penguasa yang terus memburu para aktivis telah menjelma menjadi *momok hiyong*, yakni sejenis hantu di Jawa yang sering diceritakan untuk menakuti anak-anak yang susah atau tidak mau tidur. Di dalam pelariannya, Thukul menuliskan sikap perlawanannya terhadap *momok hiyong* dengan menanyakan berapa ember lagi darah yang ingin diminumnya? Penguasa digambarkan sebagai *momok hiyong* yang memiliki banyak siasat licik, kejam seperti Nero, fasis seperti Hitler, feodal seperti raja ketoprak, dan *doyan* memakan apa saja, tidak terkecuali nyawa manusia.

momok hiyong si biang kerok  
paling jago bikin ricuh  
kalau situasi keruh  
jingkrakjingkrak ia

bikin kacau dia ahlinya  
akalnya bulus siasatnya ular  
kejamnya sebanding nero  
sefasis hitler sefeodal raja ketoprak

luar biasa cercasnya  
di luar batas culasnya

demokrasi dijadikan bola mainan  
hak azazi ditafsir semau gue

emas doyan hutan doyan  
kursi doyan nyawa doyan

luar biasa

tanah air  
digadaikan  
masa depan rakyat digelapkan  
dijadikan jaminan utang

momok hiyong momok hiyong  
apakah abadi  
apakah tak bisa mati?  
momok hiyong momok hiyong  
berapa ember lagi  
darah yang ingin kau minum?

(AIJP, 154)

Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, tentara menggunakan cara-cara kekerasan untuk membubarkan demonstran atau aksi unjuk rasa yang semakin memanas setelah meledaknya kasus Sabtu Kelabu. Keadaan seringkali tampak tidak seimbang, demonstrasi mahasiswa yang hanya mengandalkan suara dihadapi dengan tank dan senjata laras panjang seperti hendak berperang. Meskipun dalam pelarian, Thukul tidak memperlihatkan semangat melemah terhadap tekanan aparat yang diperlihatkan dalam menghadapi aksi masa tersebut. Dalam sajaknya yang berjudul "Polisi Menolak Patuh" dan ditulis tanggal 17 Januari 1997, Thukul menantang aparat dengan menegaskan ketidaktakutannya pada persenjataan yang dipergunakan tentara. Penolakan untuk patuh terhadap penguasa makin terlihat jelas. Dalam sajak ini, Thukul tetap memperlihatkan perlawanannya, tidak mau menyerah dan tunduk pada penindasan dan penganiayaan penguasa. Bahkan, ia mengatakan bahwa penjara pun tidak akan membuatnya menjadi patuh.

walau penguasa menyatakan keadaan darurat  
dan memberlakukan jam malam  
kegembiraanku tak akan berubah  
seperti kupu-kupu  
sayapnya tetap akan indah  
meski air kali keruh

....

dan terbitnya kata-kata dalam diriku  
tak bisa dicegah  
bagaimana kau akan membungkamku?  
penjara sekalipun  
tak bakal mampu  
mendidikku jadi patuh

(AIJP, 155)

Ketidakmauan Thukul untuk tunduk pada penguasa karena keyakinannya bahwa penguasa telah berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri dan keyakinan bahwa rakyatlah atau kebenaranlah yang pada akhirnya akan menang walau penguasa berusaha mematahkan perlawanannya dengan berbagai cara. Thukul telah menanamkan benih-benih perlawanan terhadap kaum tertindas yang tumbuh bersama tumbuhnya perkotaan menjadi model keberhasilan pembangunan, seperti dalam sajak "Bunga dan Tembok" berikut ini.

seumpama bunga  
kami adalah bunga yang tak  
kaukehendaki tumbuh  
engkau lebih suka membangun  
rumah dan merampas tanah

seumpama bunga  
kami adalah bunga yang tak  
kaukehendaki adanya  
engkau lebih suka membangun  
jalan raya dan pagar besi

seumpama bunga  
kami adalah bunga yang  
kaurontokkan di bumi kami sendiri

jika kami bunga  
engkau adalah tembok  
tapi di tubuh tembok itu  
telah kami sebar biji-biji  
suatu saat kami akan tumbuh bersama  
dengan keyakinan: engkau harus hancur!

dalam keyakinan kami  
di mana pun –tiran harus tumbang!

(AIJP, 57)

Dalam sajak "Catatan" Thukul menceritakan dirinya yang menjadi buron hanya karena berorganisasi dan memperjuangkan hak-haknya yang dirampas oleh penguasa. Thukul harus berjuang untuk menemui keluarganya karena aparat telah menyebarkan intel di berbagai penjuru. Thukul sepertinya menyadari bahwa dirinya tidak akan selamat dari pengejaran aparat dan seperti memiliki perasaan tidak akan dapat pulang ke rumahnya lagi untuk selamanya, tetapi ia mencoba untuk tetap berharap. Oleh karena itu, ia berpesan agar istrinya dapat menceritakan perjuangannya untuk mendapatkan hak-haknya yang telah dirampas oleh penguasa itu kepada anak-anaknya.

gerimis menderas tengah malam ini  
dingin dari telapak kaki hingga ke sendi-sendi  
dalam sunyi hati menggigit lagi  
ingat  
saat pergi  
dan pipi kananmu  
kucium  
tak sempat  
mencium anak-anak

khawatir  
membangunkan tidurnya (terlalu nyenyak)  
bertanya apa saat mereka terjaga  
aku tak ada (seminggu sesudah itu  
sebulan sesudah itu  
dan ternyata lebih panjang dari yang kalian harapkan)  
dada menggepal perasaan  
waktu itu  
cuma terbisik beberapa patah kata  
di depan pintu kaulepas aku  
meski matamu tak terima  
karena waktu sempit  
aku harus gesit

genap ½ tahun aku pergi aku masih bisa merasakan  
bergegasnya pukulan jantung  
dan langkahku  
karena penguasa fasis  
yang gelap mata

aku pasti pulang dan pasti pergi lagi  
karena hak  
telah dikoyak-koyak  
tidak di kampus  
tidak di pabrik  
tidak di pengadilan  
bahkan rumah pun mereka masuki  
muka kita sudah diinjak

kalau kelak anak-anak bertanya mengapa  
dan aku jarang pulang  
katakana ayahnya tak ingin jadi pahlawan  
tapi dipaksa menjadi penjahat  
oleh penguasa  
yang sewenang-wenang  
kalau mereka  
bertanya  
“apa yang dicari?”  
jawab dan katakan  
dia pergi untuk merampok  
haknya yang dirampas dan dicuri.

(AIJP, 134—134)

Dalam pelariannya yang kian melelahkan, Thukul tetap memperlihatkan sikap perlawanannya yang tidak mengendur. Kata-kata dalam sajaknya juga tetap memperlihatkan nada perlawanan “kasat mata” dan “bertabrakan” dengan kekuasaan. Dalam sajak “Kata Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binas” yang ditulis pada tanggal 18 Juni 1997 Thukul tetap menempatkan diri dalam posisi berhadapan langsung dengan penguasa, meskipun ia tahu betul bahwa aparat sedang memburunya. Sajak itu seakan menantang langsung perburuan terhadap dirinya yang dilakukan oleh penguasa dan menunjukkan bahwa selama dalam pengejaran pun Thukul tetap memantau dan mengikuti perkembangan situasi politik menjelang keruntuhan rezim Orde Baru. Hal itu membuktikan pula bahwa sajaknya ditulis sebagai respon atau jawaban atau bahkan tantangan langsung terhadap aparat dan penguasa yang jelas-jelas sedang menyebarkan personilnya untuk menangkapnya. Thukul menegaskan bahwa meskipun ia terus diburu dan terpaksa hidup menjadi buronan, tetapi dirinya masih hidup dan akan tetap menulis sajak. Segala penderitaan yang harus dialaminya dalam memperjuangkan hak-haknya tidak akan menyurutkan semangatnya untuk terus melawan penguasa yang dianggapnya zalim, seperti yang tertuang dalam sajaknya berikut ini.

aku bukan artis pembuat berita  
tapi aku memang selalu kabar buruk buat  
penguasa

puisiku bukan puisi  
tapi kata-kata gelap  
yang berkeringat dan berdesakan  
mencari jalan  
ia tak mati-mati  
meski bola mataku diganti  
ia tak mati-mati

meski bercerai dengan rumah  
ditusuk-tusuk sepi  
ia tak mati-mati  
telah kubayar yang dia minta  
umur-tenaga-luka

kata-kata itu selalu menagih  
padaku ia selalu berkata  
kau masih hidup

aku memang masih utuh  
dan kata-kata belum binasa

(AIJP, 160)

Tekad dan semangat untuk terus melawan dan tidak tunduk pada penguasa seperti dalam sajak "Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa" ditegaskan kembali dalam sajak "Tujuan Kita Satu Ibu", sajak terakhir yang berhasil dikirimkan kepada teman-temannya dalam perburuan. Sajak ini merupakan pesan perlawanan yang tidak memperlihatkan nada mengendur sedikit pun, bahkan seperti menjadi penegas dari semua maksud perlawanannya. Sajak ini juga merupakan pesan langsung kepada para personil militer dan polisi serta penguasa yang sedang memburunya bahwa ia tidak akan berhenti melawan sebelum tujuan perjuangannya tercapai. Sajak ini memperlihatkan tekad yang lebih keras dari Thukul untuk tidak menundukan kepala atau menyerah pada penguasa. Segala bentuk perlawanannya adalah dengan satu tujuan yang bulat, yakni kebebasan. Untuk memperjuangkan kebebasan itu, telah banyak korban jatuh. Mereka yang bergerak di dalam aksi masa banyak yang menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan pemenjaraan tanpa melalui proses peradilan sesuai hukum. Meskipun penculikan, penyiksaan, dan pemenjaraan siap menghadang gerak orang-orang yang berani bersuara lantang terhadap

penguasa, sedikit pun tidak menyurutkan tekad banyak orang untuk terus berjuang. Rasa hormat dan penghargaan Thukul hanya untuk mereka yang menjadi korban. Sementara itu, terhadap penguasa apapun ancamannya Thukul menolak untuk tunduk. Selagi kebebasan yang diperjuangkannya belum didapat, Thukul bertekad akan terus melawan dan tidak akan menunduk atau menyerah kepada penguasa yang zalim sekalipun maut mengepung dirinya. Sajak "Tujuan Kita Satu Ibu" merupakan sajak terakhir yang ditulis Thukul dalam pelarian dan berhasil dikirimkan kepada temannya, yakni tertanggal 4 Juli 1997.

....  
kutundukkan kepalaku  
kepadamu kawan yang dijebloskan  
ke penjara negara  
hormatku untuk kalian  
sangat dalam  
karena kalian lolos dan lulus ujian  
ujian pertama yang mengguncang

kutundukkan kepalaku  
kepadamu ibu-ibu  
hukum yang bisu  
telah merampas hak anakmu

tapi bukan cuma anakmu ibu  
yang diburu dan dianiaya difitnah  
dan diadili di pengadilan yang tidak adil ini  
karena itu aku pun anakmu  
karena aku ditindas  
sama seperti anakmu

kita tidak sendirian  
kita satu jalan  
tujuan kita satu ibu: pembebasan!

kutundukkan kepalaku  
kepada semua kalian para korban

sebab hanya kepada kalian kepalaku tunduk

kepada penindas  
tak pernah aku membungkuk  
aku selalu tegak

(AIJP, 158)

## BAB IV SIMPULAN

Kehidupan sosial dan politik era Orde Baru yang tergambar dalam sajak-sajak Thukul merupakan refleksi zamannya. Dengan kata lain, keadaan tersebut merupakan gambaran yang ada dalam masyarakat Indonesia di era Orde Baru yang menjadi tempat Thukul hidup, beraktivitas, dan berinteraksi. Sebagai bagian dari masyarakat yang tertindas, baik secara sosial maupun ekonomi, Thukul menunjukkan reaksi berupa kritik dan perlawanan. Oleh karena Thukul adalah seorang penyair, kritik dan perlawanan itu tidak hanya ditunjukkan melalui gerakan fisik berupa demonstrasi, tetapi juga melalui aktivitas imajinasi berupa sajak.

Kritik dan perlawanan Thukul dalam sajak-sajaknya merefleksikan kehidupan pengarang sebagai bagian masyarakat kelas bawah yang sangat dirugikan oleh

kebijakan pembangunan rezim Orde Baru. Berbagai kegetiran hidup yang dialami dan dilihatnya di lingkungan kampungnya yang miskin dan kumuh masuk ke dalam pikirannya yang selanjutnya terekspresikan dalam karya sajaknya. Tidak seperti para penyair umumnya, yang berasal dari kelas menengah, Thukul mengalami sendiri berbagai kegetiran dan penindasan. Oleh karena itu, ia dapat menggambarkan semua bentuk ketidakadilan, ketimpangan, dan peminggiran terhadap orang-orang kecil dengan hidup dan jujur. Bahasa yang dipilih Thukul pun bahasa yang "kasat mata" sehingga mudah dipahami oleh komunitasnya yang rata-rata berpendidikan rendah, bahkan buta huruf.

Kritik dan perlawanan Thukul juga ditujukan kepada rezim Orde Baru atas gaya kekuasaannya yang militeristik. Lagi-lagi, Thukul tidak berbicara sebagai pengamat yang hanya melihat. Thukul merasakan dan mengalami sendiri kekejaman penguasa yang militeristik karena aktivitasnya di Partai Rakyat Demokratik. Gubuk kontraknya didatangi dan diobrak-abrik aparat hingga menimbulkan trauma pada anak-anaknya. Istrinya juga pernah diinterogasi Kodim sepanjang hari terkait dengan aktivitas Thukul. Penjara dan siksaan bukan lagi hal baru bagi Thukul. Semua pengalaman itu terefleksikan dalam sajak-sajaknya.

Dengan demikian, sajak-sajak Thukul dapat menjadi bukti bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara pengarang, karya, dan latar belakang sosial yang melingkunginya. Karya sastra sebagai refleksi masyarakat dengan jelas dapat ditemukan dalam sajak-sajak Thukul ini.

## Daftar Pustaka

- Ajidarma, Seno Gumira. 1997. *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara*. Yogyakarta: Bentang
- Basis. 2001. "Misteri Momok Hiyong" dalam majalah *Basis* No. 11—12, Th. Ke-50, November—Desember
- Budiman, Arief. 1986. "Gerakan Sosial Negara dan Demokrasi di Indonesia" dalam Yohanes Mardimin (ed). *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- \_\_\_\_\_. 1993. "Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi" dalam *Pembangunan di Indonesia: Memandang dari Sisi Lain*. Jakarta: Yayasan Obor dan INFID
- Borch, Rossi von Der. 1987. "Poets Against Silence" dalam majalah *Inside Indonesia*, Australia, No. 12, Oktober
- Curtis, Richard. 2000. "Where is Wiji Thukul? The Dreadful Silence of an Outspoken Poet" dalam majalah *Inside Indonesia*, Australis, No. 63, Juli—September
- Damono, Sapardi Djoko. 1984. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- \_\_\_\_\_. 1987. "Umar Kayam Sebagai Sampel Sistem Pengarang Indonesia". Makalah disampaikan dalam acara Purnabakti Prof. Dr. Umar Kayam di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 1991. *Politik Idcologi dan Sastra Hibrida*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Dewi, Kumara. 1994. Rantai Kemiskinan pada Buruh perempuan di Perkotaan" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awan Setya Dewanta dkk. (ed). Jakarta: Adytia Media
- Dhakidae, Daniel. 2000. "Pengarang, Dunia Kepengarangan, dan Kekuasaan". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Kajian Budaya dan Sastra" di Fakultas Sastra Universitas Kristen Petra Surabaya pada Tanggal 23 November

- Evers, Hans-Dieter. 1982. *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
- Faruk, Bakdi Soemanto, dan Bambang Purwanto. 2000. *Konteks Sosial-Ideologis Kritik Sastra Tionghoa Peranakan Tahun 1970-an dan Tahun 1980-an*. Magelang: Teraindonesia
- Firdausy, Carunia Mulya. 1998. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Gatra. 1996. "Mereka yang Dihujani, Mereka diancam Subversif" dalam majalah *Gatra* Tanggal 17 Agustus 1996
- Grebstein, Sheldon Norman. 1968. *Perspectives in Contemporary Criticism*. New York: Harper Row
- Haluan. 1989. "Penyair Wiji Thukul Mendapat Sambutan Hangat di kedutaan Besar Jerman" dalam *Haluan*, Senin, 13 November 1989
- Kompas. 2001. "Negara Harus Bertanggung Jawa Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa" dalam *Kompas*, Jakarta, 31 Agustus
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Laksmi, Gita Widya. 2001. ""Menunggu Thukul Pulang. Hanya Ada Satu Kata: Lawan!" dalam *Pantau: Kajian Media dan Jurnalisme*, Th. II, No. 017, September
- \_\_\_\_\_. 2001. ""Menunggu Thukul Pulang. Hanya Ada Satu Kata: Lawan!" dalam *Pantau: Kajian Media dan Jurnalisme*, Th. IV, No. 021, November
- Kedaulatan Rakyat. 1996. "Mimbar Bebas Akan Dinyatakan Terlarang" dalam *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 23 Juli 1996, hlm. 1
- \_\_\_\_\_. 1996. "Megawati Membubarkan Mimbar Bebas" dalam *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 26 Juli 1996, hlm. 1
- \_\_\_\_\_. 1996. "Tragedi 27 Juli Ditunggangi PRD" *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 30 Juli 1996, hlm. 1
- \_\_\_\_\_. 1996. "Otak Kerusakan Terus Dibuu: Kerugian 'Sabtu Kelabu Rp 200M' " *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 3 Agustus 1996, hlm. 1

- \_\_\_\_\_. 1996. "Di Solo 24 Aktivis PRD Terus Diburu" *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 9 Agustus 1996, hlm. 1
- Leirissa, R.Z. et.al. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Liddle, William R. 1992. *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta : Lembaga penelitian, Pendidikan, dan penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Luwiarso, Lucas, Johan Budi SP, Jalil Hakim. 1997. "Sudah Divonis Masih Diusut" dalam *Forum Keadilan* Nomor 03 Tahun Ke-VI, Tanggal 19 Mei 1997
- Maulana, Soni Farid. 2002. "Menyambut Festival Puisi Internasional Indonesia: Karya Sastra dan Harga Diri Bangsa" dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung, 30 Januari
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-17. Bandung: Rosdakarya
- Munir. 2000. "Wiji Thukul: Esai Pengantar" dalam *Aku Ingin Jadi Peluru*. Magelang: Teraindonesia
- Nasution, Darmin. 1995. "Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awan Setya Dewanta dkk. (ed). Jakarta: Adytia Media
- Noer, Deliar. 1997. "Kampanye Pemilu" dalam *Forum Keadilan* Nomor 03 Tahun ke-VI, Tanggal 19 Mei 1997
- Nugroho, Heru. 1995. "Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awan Setya Dewanta dkk. (ed). Jakarta: Adytia Media
- \_\_\_\_\_. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pamungkas, Sri Bintang. 1995. "Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia: Suatu Evaluasi Atas Kebijakan Pembangunan Pemerintah" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awan Setya Dewanta dkk. (ed). Jakarta: Adytia Media
- Prasetyo, Eko. 2001. *HAM: Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar
- Priyono B, Subagyo. 1996. "Gerakan Menolak Azas Tunggal" dalam *Gatra* tanggal 10 Agustus 1996

- Raharjo, Dawam. 1995. "Program-program Aksi untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan pada PJP II" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awan Setya Dewanta dkk. (ed). Jakarta: Adytia Media
- Salam, Aprinus. 2004. *Opcisi Sastra Sufi*. Yogyakarta: LKiS
- Sardjono, Agus R. 2001. *Sastra Dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Sastrosatomo, Soebadio. 1998. "Politik dasamuka Rezim Orde Baru Rapuh dan Sengsarakan rakyat". Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49
- Sinaga, Kastorius. 1996. "Taruhan untuk Sang Tikus" dalam *Gatra* tanggal 10 Agustus 1996
- Sindunata. 1998. "ABRI dan Penghalang Demokrasi" dalam majalah Basis nomor 09—10, Tahun ke-47, September—Oktober 1998
- Stanley. 1994. *Seputar Kedung Ombo*. Jakarta: ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Sujatmiko, Budiman. 1996. "Suara Sebelum Buron" dalam *Gatra* tanggal 10 Agustus 1996
- Sulasmono, Bambang Suteng. 1996. "Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Bidang Politik" dalam Yohanes Mardimin (ed). *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Sungkowati, Yulitin. 2001. "Masalah Sosial dalam Puisi-puisi Wiji Thukul" dalam: *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 2, No. 3, Desember
- \_\_\_\_\_. 2002. "Wiji Thukul dan Puisi-puisi Perlawanannya Atas Rezim Orde Baru" dalam *Atavisme: Majalah Analisis Kesastraan*, Vol.5, Edisi Januari—Maret, Jakarta
- Suseno, Franz-Magnis. 1998. "Belajar dari Krisis: Tahun Krisis Bangsa" dalam majalah Basis nomor 03—04, Tahun ke-47, Maret—April 1998
- Thamrin, Juni. 1995. "Agenda mempersempit Ketimpangan dan Kemiskinan" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awan Setya Dewanta dkk. (ed). Jakarta: Adytia Media
- Thukul, Wiji. 2000. *Aku Ingin Jadi Peluru*. Magelang: Teraindonesia

Wachid, Abdul. 2000. *Sastra Melawan Slogan*. Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama (FkBA)

Winters, Jeffrey A. 1999. *Dosa-dosa Politik Orde Baru*. Cet. Ke-5. Jakarta: Djambatan

Wachid, Abdul. 2000. *Sastra Melawan Slogan*. Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama (FkBA)

Winters, Jeffrey A. 1999. *Dosa-dosa Politik Orde Baru*. Cet. Ke-5. Jakarta: Djambatan